



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA MADIUN



2022



Oleh
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kota Madiun tahun 2022 telah berhasil diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana yang seharusnya.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance*, maka perlu disusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Madiun tahun 2022 merupakan bentuk evaluasi untuk mengungkapkan keberhasilan ataupun menjelaskan ketidakberhasilan penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu Laporan Kinerja merupakan rangkaian proses akuntabilitas penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 ke dalam perencanaan sasaran, program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini diupayakan untuk menyampaikan kinerja Pemerintah Kota Madiun atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun tahun 2022 dalam mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.



Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja maka dalam penyusunan Laporan Kinerja perlu terus diupayakan penyempurnaan, terutama dukungan ketersediaan data kinerja yang baku, valid, serta handal dari masing-masing indikator kinerja.

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pembangunan, maupun dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat, maka masukan dari semua pihak sangat diharapkan, sehingga akan memberikan dukungan terhadap terwujudnya *good governance* di Kota Madiun.

Madiun, Maret 2023

WALIKOTA MADIUN

Drs. HJ. MAIDI, SH, MM, M.Pd.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	KP – 1
DAFTAR ISI.....	DI – 1
BAB I PENDAHULUAN.....	BAB I – 1
A. Gambaran Umum Daerah	BAB I – 4
B. Permasalahan dan Isu-isu Strategis.....	BAB I – 32
C. Sistematika.....	BAB I – 40
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	BAB II – 1
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024	BAB II – 2
B. Perjanjian Kinerja.....	BAB II – 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	BAB III – 1
A. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja.....	BAB III – 2
1) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran	BAB III – 2
2) Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	BAB III – 3
3) Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja.....	BAB III – 6
1. Misi Pertama : Mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	BAB III – 7
2. Misi Kedua : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.....	BAB III – 36
3. Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun	BAB III – 45
4. Misi Keempat : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.....	BAB III – 61
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	BAB III – 92



BAB IV PENUTUP.....	BAB IV – 1
A. Kesimpulan.....	BAB IV – 1
B. Permasalahan	BAB IV – 2
C. Upaya Meningkatkan Kinerja.....	BAB IV – 3



BAB I

PENDAHULUAN

Birokrasi yang kapabel, kolaboratif, lincah dan fleksibel berintegritas dan memiliki budaya melayani, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan birokrasi yang mampu menjawab dan menyelesaikan isu strategis di tengah masyarakat, yaitu isu kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi pemerintahan.

Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas.

Tata kelola pemerintahan yang baik diawali dari aparatur pemerintah, sehingga reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan pemerintahan yang memenuhi karakteristik tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak yang jelas dan diimplementasikan secara konkrit dan konsekuen.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala Daerah menyusun Laporan



Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Pejabat publik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja dihasilkan oleh suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan.



Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 merupakan capaian kinerja yang disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Madiun Tahun 2022, yang penyusunannya berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Rencana Kinerja Tahun 2022 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Madiun merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Madiun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Madiun tahun 2022 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kota Madiun dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Madiun adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kota Madiun dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Presiden, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Madiun. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Kota Madiun untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Madiun;



2. Menjadikan Pemerintah Kota Madiun yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Mejadikan masukan dan umpan balik bagi penyusunan perencanaan Pemerintah Kota Madiun dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagai upaya dalam peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Madiun guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
5. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kota Madiun terhadap penyelenggara Pemerintah Kota Madiun.

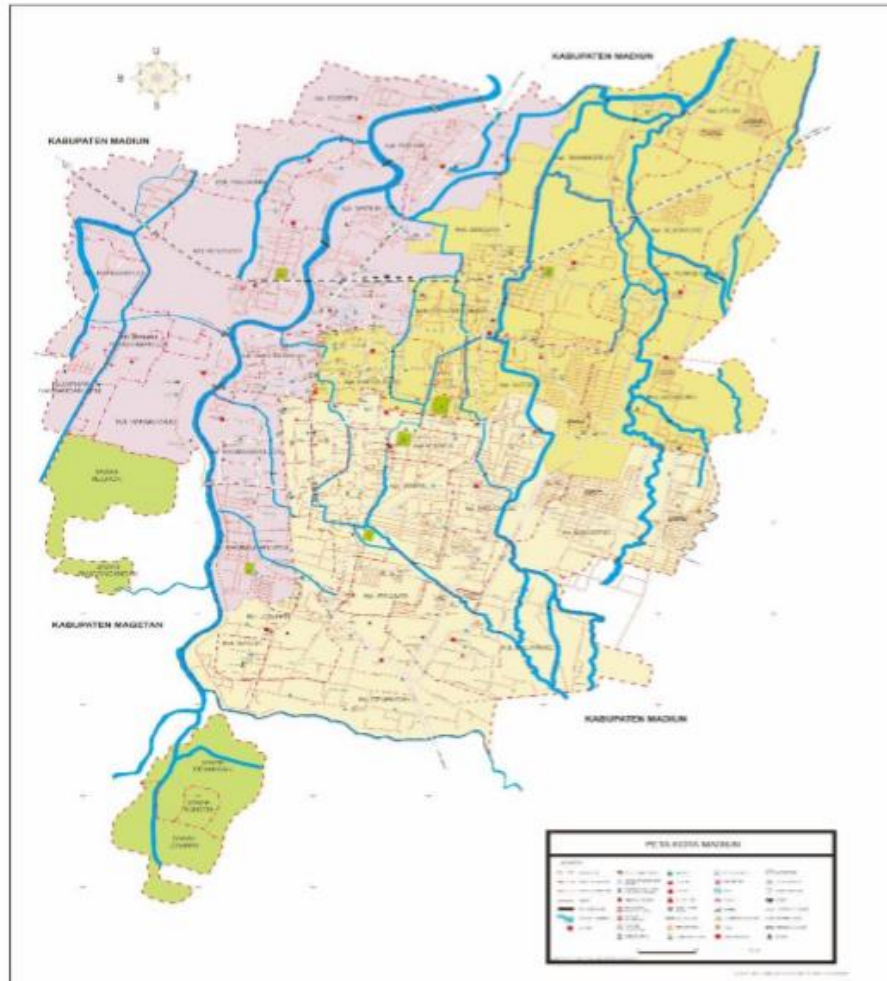
A. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Madiun sebagai salah satu wilayah pemerintahan daerah dibawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat. Kota Madiun mempunyai letak yang strategis karena menjadi perlintasan transportasi darat utama antar provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, sehingga posisi ini menjadi pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Dengan topografi tanahnya yang datar maka Kota Madiun mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api serta alat transportasi darat lainnya. Hal ini diperkuat dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, yang menetapkan Kota Madiun sebagai pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur bagian barat.



Gambar I.1. Wilayah Administrasi Kota Madiun

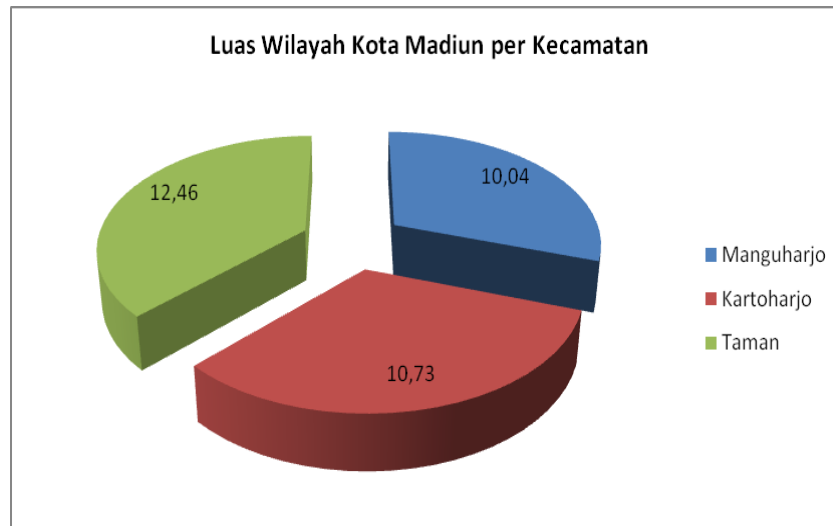


Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2022

Secara astronomis, Kota Madiun terletak antara 7° - 8° Lintang Selatan dan antara 111° - 112° Bujur Timur. Wilayah Kota Madiun secara administrasi berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan sebelah barat Kota Madiun berbatasan dengan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Berdasarkan BPS Kota Madiun, Kota Madiun mempunyai luas wilayah sebesar 33,23 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu meliputi Kecamatan Taman dengan luasan sebesar 12,46 km² (37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas 10,73 km² (32,29%), dan Kecamatan Manguharjo seluas 10,04 km² (30,21%). Pada masing-masing kecamatan terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga total di Kota Madiun terdapat 27 Kelurahan. Berikut ditampilkan luas wilayah dan persentase tiap kecamatan di Kota Madiun.

Gambar I.2. Luas wilayah Kota Madiun per Kecamatan



Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2022

Secara administratif, Kota Madiun terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo terdiri dari 9 kelurahan, Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan, dan Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan. Berikut ditampilkan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tiap kecamatan di Kota Madiun, yaitu :

- Kecamatan Manguharjo terdiri dari 325 RT dan 88 RW ;
- Kecamatan Taman terdiri dari 396 RT dan 107 RW ;
- Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 309 RT dan 74 RW.



Secara rinci untuk luas wilayah dan jumlah RT, RW di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun

No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah	
			RW	RT
I.	Manguharjo	10,04	88	325
1.	Manguharjo	1,40	8	36
2.	Sogaten	1,12	9	29
3.	Patihan	0,84	6	22
4.	Ngegong	1,34	5	17
5.	Winongo	2,00	11	37
6.	Madiun Lor	0,73	9	41
7.	Pangongangan	0,61	9	26
8.	Nambangan Lor	0,98	16	71
9.	Nambangan Kidul	1,02	15	46
II.	Taman	12,46	107	396
1.	Mojorejo	1,54	14	64
2.	Pandean	0,32	18	60
3.	Banjarejo	1,92	9	35
4.	Kuncen	1,83	4	9
5.	Manisrejo	0,92	12	60
6.	Kejuron	1,59	15	50
7.	Josenan	1,06	9	31
8.	Demangan	1,26	11	36
9.	Taman	2,02	15	51
III.	Kartoharjo	10,73	74	309
1.	Kartoharjo	0,94	9	38
2.	Oro-Oro Ombo	0,81	9	43
3.	Klegen	0,84	10	48
4.	Kanigoro	1,62	12	52
5.	Pilangbango	1,21	5	22
6.	Rejomulyo	2,03	11	38
7.	Sukosari	0,55	6	18
8.	Tawangrejo	1,77	6	24
9.	Kelun	0,96	6	26
Jumlah		33,23	269	1.030

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Madiun



Berdasarkan kondisi topografi wilayah Kota Madiun didominasi oleh dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian \pm 63 meter di atas permukaan laut (dpl). Di bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 meter dpl dan selanjutnya menurun hingga 63 meter dpl, sedang di bagian utara kota, ketinggian rata-rata mencapai 64 meter dpl. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Kota Madiun terletak di lembah sungai Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai terbesar dari Sungai Bengawan Solo. Bila dilihat dari daerah sekelilingnya, maka terdapat rangkaian pegunungan, yaitu sebelah timur terdapat Gunung Wilis (2.169 m), di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m dpl. Di sebelah barat Kota Madiun, terdapat Gunung Lawu (3.285 m) dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m – 500 m.

2. Kondisi Demografis

Dari aspek demografi, Kota Madiun berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan Semester II Tahun 2022 sebanyak 201.760 jiwa, tersebar di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 55.866 jiwa, Kecamatan Manguharjo 60.167 jiwa, dan Kecamatan Taman 85.727 jiwa. Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel I.2. Jumlah Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin per-Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KARTOHARJO	ORO-ORO OMBO	3,276	3,493	6,769
2	KARTOHARJO	SUKOSARI	1,452	1,550	3,002
3	KARTOHARJO	KLEGEN	4,172	4,238	8,410
4	KARTOHARJO	REJOMULYO	5,023	5,225	10,248
5	KARTOHARJO	PILANGBANGO	2,271	2,268	4,539
6	KARTOHARJO	TAWANGREJO	2,033	2,094	4,127
7	KARTOHARJO	KANIGORO	4,533	4,653	9,186
8	KARTOHARJO	KARTOHARJO	2,437	2,555	4,992
9	KARTOHARJO	KELUN	2,204	2,389	4,593
KEC. KARTOHARJO			27,401	28,465	55,866
10	MANGUHARJO	MANGUHARJO	3,791	3,842	7,633
11	MANGUHARJO	SOGATEN	2,137	2,093	4,230
12	MANGUHARJO	PATIHAN	2,436	2,523	4,959
13	MANGUHARJO	NGEGONG	1,594	1,639	3,233
14	MANGUHARJO	WINONGO	3,737	4,043	7,780
15	MANGUHARJO	MADIUN LOR	3,288	3,587	6,875
16	MANGUHARJO	PANGONGANGAN	1,642	1,782	3,424
17	MANGUHARJO	NAMBANGAN LOR	6,213	6,184	12,397
18	MANGUHARJO	NAMBANGAN KIDUL	4,659	4,977	9,636
KEC. MANGUHARJO			29,497	30,670	60,167
19	TAMAN	MOJOREJO	5,479	5,793	11,272
20	TAMAN	PANDEAN	4,860	5,084	9,944
21	TAMAN	BANJAREJO	4,484	4,405	8,889
22	TAMAN	KUNCEN	699	707	1,406
23	TAMAN	MANISREJO	7,722	8,072	15,794
24	TAMAN	KEJURON	4,384	4,766	9,150
25	TAMAN	JOSENAN	3,572	3,664	7,236
26	TAMAN	DEMANGAN	4,661	4,774	9,435
27	TAMAN	TAMAN	6,185	6,416	12,601
KEC. TAMAN			42,046	43,681	85,727
JUMLAH			98,944	102,816	201,760

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2



Sedangkan rincian data jumlah penduduk Kota Madiun berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel I.2. Data Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

THN 20	RANGE USIA	KECAMATAN									JUMLAH		
		KARTOHARJO			MANGUHARJO			TAMAN			L	P	JML
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML			
1	0 - 1 Thn	241	236	477	271	267	538	402	348	750	914	851	1,765
2	1 - 2 Thn	336	326	662	337	349	686	487	433	920	1,160	1,108	2,268
3	2 - 3 Thn	370	343	713	381	337	718	556	508	1,064	1,307	1,188	2,495
4	3 - 4 Thn	355	360	715	396	377	773	583	512	1,095	1,334	1,249	2,583
5	4 - 5 Thn	342	342	684	375	377	752	554	527	1,081	1,271	1,246	2,517
6	5 - 6 Thn	342	346	688	398	398	796	603	520	1,123	1,343	1,264	2,607
7	6 - 7 Thn	396	324	720	380	392	772	577	570	1,147	1,353	1,286	2,639
8	7 - 8 Thn	360	367	727	409	343	752	583	531	1,114	1,352	1,241	2,593
9	8 - 9 Thn	380	377	757	400	408	808	640	624	1,264	1,420	1,409	2,829
10	9 - 10 Thn	392	382	774	436	428	864	597	552	1,149	1,425	1,362	2,787
11	10 - 11 Thn	376	369	745	447	409	856	631	616	1,247	1,454	1,394	2,848
	11 - 12 Thn	415	411	826	473	434	907	640	614	1,254	1,528	1,459	2,987
13	12 - 13 Thn	421	423	844	461	437	898	611	644	1,255	1,493	1,504	2,997
14	13 - 14 Thn	426	396	822	426	439	865	673	625	1,298	1,525	1,460	2,985
15	14 - 15 Thn	460	413	873	437	426	863	694	638	1,332	1,591	1,477	3,068
16	15 - 16 Thn	460	440	900	474	513	987	676	666	1,342	1,610	1,619	3,229
17	16 - 17 Thn	469	430	899	452	494	946	676	698	1,374	1,597	1,622	3,219
18	17 - 18 Thn	421	415	836	465	431	896	722	617	1,339	1,608	1,463	3,071
19	18 - 19 Thn	411	406	817	466	417	883	645	641	1,286	1,522	1,464	2,986
20	19 - 20 Thn	478	409	887	489	425	914	709	704	1,413	1,676	1,538	3,214
21	20 - 21 Thn	478	414	892	486	438	924	664	646	1,310	1,628	1,498	3,126
22	21 - 22 Thn	449	429	878	477	399	876	740	701	1,441	1,666	1,529	3,195
23	22 - 23 Thn	448	455	903	480	471	951	748	678	1,426	1,676	1,604	3,280
24	23 - 24 Thn	465	427	892	436	432	868	698	614	1,312	1,599	1,473	3,072
25	24 - 25 Thn	414	397	811	470	433	903	650	586	1,236	1,534	1,416	2,950
26	25 - 26 Thn	428	384	812	456	387	843	653	581	1,234	1,537	1,352	2,889
27	26 - 27 Thn	434	421	855	440	465	905	664	649	1,313	1,538	1,535	3,073
28	27 - 28 Thn	426	466	892	446	432	878	582	642	1,224	1,454	1,540	2,994
29	28 - 29 Thn	411	391	802	413	417	830	603	605	1,208	1,427	1,413	2,840
30	29 - 30 Thn	372	353	725	452	421	873	603	596	1,199	1,427	1,370	2,797
31	30 - 31 Thn	394	402	796	436	442	878	597	610	1,207	1,427	1,454	2,881



NO	RANGE USIA	KECAMATAN									JUMLAH		
		KARTOHARJO			MANGUHARJO			TAMAN			L	P	JML
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML			
32	31 - 32 Thn	408	388	796	396	415	811	505	514	1,019	1,309	1,317	2,626
33	32 - 33 Thn	380	347	727	436	400	836	521	577	1,098	1,337	1,324	2,661
34	33 - 34 Thn	378	384	762	444	394	838	584	587	1,171	1,406	1,365	2,771
35	34 - 35 Thn	366	399	765	370	387	757	539	524	1,063	1,275	1,310	2,585
36	35 - 36 Thn	354	355	709	401	404	805	518	531	1,049	1,273	1,290	2,563
37	36 - 37 Thn	360	363	723	434	421	855	560	565	1,125	1,354	1,349	2,703
38	37 - 38 Thn	451	378	829	408	459	867	610	597	1,207	1,469	1,434	2,903
39	38 - 39 Thn	419	400	819	459	454	913	699	688	1,387	1,577	1,542	3,119
40	39 - 40 Thn	392	429	821	468	485	953	665	684	1,349	1,525	1,598	3,123
41	40 - 41 Thn	415	464	879	512	497	1,009	730	767	1,497	1,657	1,728	3,385
42	41 - 42 Thn	432	431	863	473	422	895	674	661	1,335	1,579	1,514	3,093
43	42 - 43 Thn	449	463	912	500	486	986	670	687	1,357	1,619	1,636	3,255
44	43 - 44 Thn	431	421	852	505	474	979	688	696	1,384	1,624	1,591	3,215
45	44 - 45 Thn	401	441	842	455	474	929	635	628	1,263	1,491	1,543	3,034
46	45 - 46 Thn	407	419	826	429	428	857	638	632	1,270	1,474	1,479	2,953
47	46 - 47 Thn	447	445	892	465	476	941	691	724	1,415	1,603	1,645	3,248
48	47 - 48 Thn	431	421	852	440	386	826	633	644	1,277	1,504	1,451	2,955
49	48 - 49 Thn	379	369	748	407	424	831	584	622	1,206	1,370	1,415	2,785
50	49 - 50 Thn	384	394	778	410	399	809	597	592	1,189	1,391	1,385	2,776
51	50 - 51 Thn	414	401	815	467	443	910	620	628	1,248	1,501	1,472	2,973
52	51 - 52 Thn	390	452	842	429	389	818	592	586	1,178	1,411	1,427	2,838
53	52 - 53 Thn	376	412	788	388	411	799	599	625	1,224	1,363	1,448	2,811
54	53 - 54 Thn	381	424	805	399	438	837	543	632	1,175	1,323	1,494	2,817
55	54 - 55 Thn	349	408	757	370	423	793	571	636	1,207	1,290	1,467	2,757
56	55 - 56 Thn	309	372	681	360	387	747	495	529	1,024	1,164	1,288	2,452
57	56 - 57 Thn	287	340	627	317	353	670	458	541	999	1,062	1,234	2,296
58	57 - 58 Thn	378	411	789	360	423	783	571	650	1,221	1,309	1,484	2,793
59	58 - 59 Thn	330	334	664	279	313	592	450	539	989	1,059	1,186	2,245
60	59 - 60 Thn	298	389	687	280	364	644	444	536	980	1,022	1,289	2,311
61	60 - 61 Thn	286	332	618	288	347	635	443	522	965	1,017	1,201	2,218
62	61 - 62 Thn	239	310	549	280	337	617	369	502	871	888	1,149	2,037
63	62 - 63 Thn	277	323	600	299	361	660	448	525	973	1,024	1,209	2,233
64	63 - 64 Thn	280	285	565	280	307	587	432	465	897	992	1,057	2,049
65	64 - 65 Thn	238	282	520	242	338	580	376	443	819	856	1,063	1,919



NO	RANGE USIA	KECAMATAN									JUMLAH		
		KARTOHARJO			MANGUHARJO			TAMAN			L	P	JML
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML			
66	65 - 66 Thn	241	265	506	241	308	549	346	441	787	828	1,014	1,842
67	66 - 67 Thn	188	254	442	242	256	498	317	353	670	747	863	1,610
68	67 - 68 Thn	197	259	456	215	237	452	332	371	703	744	867	1,611
69	68 - 69 Thn	200	222	422	215	281	496	285	342	627	700	845	1,545
70	69 - 70 Thn	186	209	395	194	219	413	269	324	593	649	752	1,401
71	70 - 71 Thn	162	178	340	167	220	387	232	293	525	561	691	1,252
72	71 - 72 Thn	147	173	320	155	192	347	206	232	438	508	597	1,105
73	72 - 73 Thn	115	160	275	127	199	326	164	250	414	406	609	1,015
74	73 - 74 Thn	112	152	264	116	172	288	168	221	389	396	545	941
75	74 - 75 Thn	112	155	267	100	155	255	153	257	410	365	567	932
76	75 - 100 Thn	653	1,189	1,842	897	1,664	2,561	957	1,809	2,766	2,507	4,662	7,169
77	> 100 Thn	2	9	11	13	10	23	4	13	17	19	32	51
JUMLAH		27,401	28,465	55,866	29,497	30,670	60,167	42,046	43,681	85,727	98,944	102,816	201,760

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2

Persebaran penduduk serta perbandingan antara penduduk pria dengan wanita pada masing-masing kecamatan di Kota Madiun adalah sebagaimana tersaji pada grafik berikut ini. Sebagaimana terlihat pada grafik, tidak terdapat perbedaan yang terlalu besar antara banyaknya penduduk pria dengan wanita pada masing-masing kecamatan.

Hal ini menunjukkan bahwa persebaran penduduk pria maupun wanita cukup merata diseluruh wilayah masing-masing kecamatan. Dengan persebaran yang relatif merata, diharapkan dapat mempermudah Pemerintah Kota Madiun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena diharapkan tidak terjadi ketimpangan dan kesenjangan yang terlalu besar antara masing-masing kecamatan.

Sementara itu, menurut tingkat pendidikan sampai dengan Semester II Tahun 2022 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota Madiun merupakan tamat SLTA, yaitu sebesar 70.350 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 533 jiwa; D-III 6.033 jiwa; S-1 21.152 jiwa; S-2 1.490 jiwa, dan S-3 47 jiwa.



Secara lengkap, jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2018 s/d 2022 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel I. 3. Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 s/d 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk Berdasarkan Pendidikan :					
Belum Sekolah;	31.258	31.374	32.536	33.177	33.495
Belum Tamat SD					18.483
Tamat SD;	30.169	29.266	28.253	26.006	24.843
Tamat SLTP;	29.487	28.787	28.048	26.027	25.314
Tamat SLTA;	72.405	73.045	73.008	69.421	70.350
Tamat D-I/II;	468	498	502	519	553
Tamat D-III;	5.639	5.761	5.912	5.770	6.033
Tamat S-1;	19.431	20.071	20.536	20.170	21.152
Tamat S-2;	1.334	1.391	1.417	1.415	1.490
Tamat S-3.	31	35	39	41	47

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Semester II Tahun 2022

3. Kondisi Makro Ekonomi

Penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Kota Madiun pada Tahun 2022 disajikan pada Tabel 1.4.



Tabel 1.4 Indikator Makro Kota Madiun Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	81,25	82,01
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,73	
3	Inflasi	Persen	2,00	5,80
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,15	6,39
5	Kemiskinan	Persen	5,09	4,76

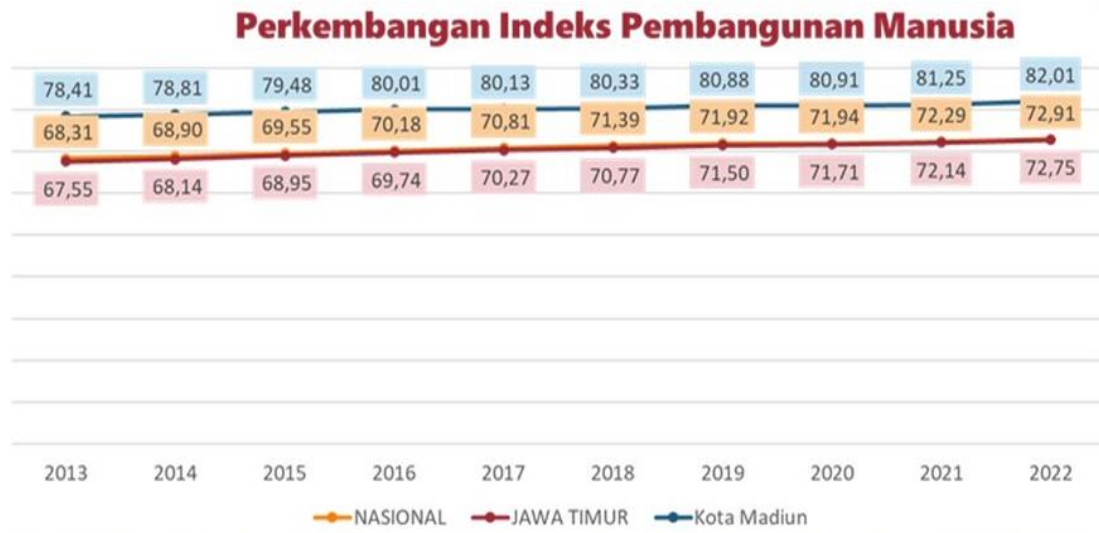
Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2022
Angka 2022 belum rilis dari BPS

1.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

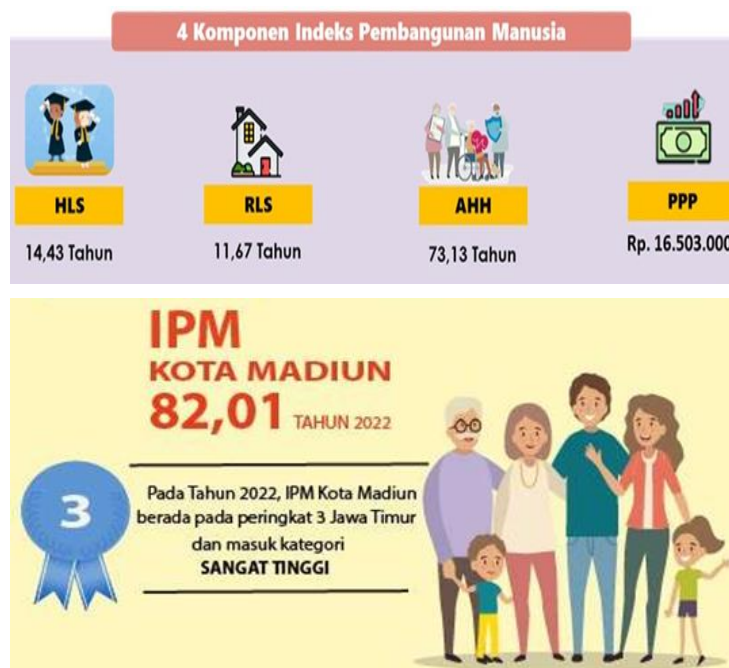
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini pembangunan manusia di Kota Madiun terus mengalami kemajuan. Pasca pandemi Covid-19 pertumbuhan komponen pengeluaran/kapita/tahun meningkat karena geliat ekonomi semakin membaik, sehingga di Tahun 2022 mencapai 82,01 atau tumbuh sebesar 0,94 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pemerintah Kota Madiun berada di peringkat 3 di Jawa Timur.

Gambar 1.3.



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun Tahun 2022

Tiga dimensi dasar yang membentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah



tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan



Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Tabel 1.6. IPM Kota Madiun dengan 4 Komponen Pendukungnya

Tahun	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Paritas Daya Beli
2018	72,59	14,21	11,10	15.616
2019	72,75	14,39	11,13	16.040
2020	72,81	14,40	11,14	16.018
2021	72,83	14,41	11,37	16.095
2022	73,13	14,43	11,67	16.503

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode Tahun 2018 hingga 2022, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,48 tahun (2018) menjadi 72,83 tahun (2022) atau naik sebesar 0,54 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun dari tahun ke tahun.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa



mendatang. Selama periode 2018 hingga 2022, HLS Kota Madiun meningkat dari 14,21 tahun (2018) menjadi 14,43 tahun (2022) atau naik sebesar 0,22 tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Madiun dalam memberikan fasilitas kepada penduduknya untuk bersekolah sehingga makin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,43 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2.

Di sisi lain rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,11 tahun (2018) menjadi 11,67 tahun (2022) atau naik 0,56 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kota Madiun usia 25+ setara dengan tingkat pendidikan SMA kelas XI. Pertumbuhan yang positif, baik RLS maupun HLS, menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita masyarakat Kota Madiun yang disesuaikan mencapai Rp 16,5035 juta per tahun, naik sebesar 2,53 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan di tahun sebelumnya yaitu 0,48 persen.

1.3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan ekonomi pada daerah tersebut pun meningkat. Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari perhitungan pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto)



PDRB di suatu wilayah. Definisi PDRB sendiri adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. Terdapat dua jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat data tentang pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sedang PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

**Tabel I.7. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan
Tahun 20187-2022 (Milyar Rupiah)**

Tahun	PDRB (Rp)	
	ADHB	ADHK
2022**	15.825,61	11.119,55
2021*	14.699,83	10.748,10
2020	13.769,29	10.262,44
2019	14.107,34	10.623,07
2018	13.128,89	10.051,29

Sumber : BPS Kota Madiun

*) Angka Sementara

***) Angka sangat sementara



Secara terperinci pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2018-2022* (%)

Lapangan Usaha/ Industry	2018	2019	2020x	2021x	2022xx
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,78	-0,94	11,57	-7,26	-5,67
B Pertambangan dan Penggalian	1,07	2,41	-5,65	-4,12	-8,49
C Industri Pengolahan	7,01	4,64	-12,84	6,44	2,17
D Pengadaan Listrik dan Gas	5,45	6,69	1,98	2,95	7,95
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,44	4,52	4,86	6,28	3,50
F Konstruksi	2,03	4,90	-4,71	-0,90	8,24
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,52	6,19	-11,18	10,16	7,98
H Transportasi dan Pergudangan	8,48	9,11	-4,38	7,17	16,90
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,23	8,86	-7,98	3,21	9,96
J Informasi dan Komunikasi	5,34	4,58	16,12	4,75	5,94
K Jasa Keuangan dan Asuransi	4,08	4,79	-0,66	0,47	0,32
L Real Estat	3,57	5,96	0,33	1,19	5,09
M,N Jasa Perusahaan	5,31	6,10	-3,18	0,77	5,26
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,48	3,85	-2,23	-0,99	-0,43
P Jasa Pendidikan	4,21	7,65	1,97	0,54	0,59
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,38	7,52	9,98	5,46	3,29
R,S,T,U Jasa Lainnya	5,74	6,92	-10,68	4,08	12,11
Produk Domestik Regional Bruto	5,96	5,69	-3,39	4,73	5,52

Sumber : BPS Kota Madiun

*) Angka Sementara

**) Angka sangat sementara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun Tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 15.825,61 milyar. Dalam periode yang sama, PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 11.119,55 milyar. Secara nominal, nilai PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar 8,78% jika dibandingkan terhadap PDRB Tahun 2021. Jika ditinjau struktur perekonomian Kota Madiun Tahun 2022, pergerakan lapangan usaha didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu Transportasi dan Pergudangan (16,90% dari total PDRB), Jasa Lainnya (12,11% dari total PDRB), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,96% dari total PDRB),



Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (7,98% dari total PDRB). Dibandingkan periode sebelumnya, posisi distribusi PDRB terjadi pergeseran dari kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di posisi pertama tergeser oleh Transportasi dan Pergudangan yang sebelumnya pada posisi kedua.

Secara umum, kinerja ekonomi Kota Madiun Tahun 2020 tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Pelemahan ekonomi Kota Madiun bersumber dari pelemahan daya beli masyarakat akibat penurunan sebagian besar kegiatan usaha. Penerapan PSBB dan terbatasnya aktivitas produksi serta konstruksi.

Untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama kurun waktu 2018-2022 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah tersebut. Data tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Provinsi Jawa Timur. Data mengenai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota eks Karesidenan Madiun ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel I.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Wilayah Karesidenan Madiun Tahun 2017-2021***

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020*	2021*	2022**
Kota Madiun	5,96	5,69	-3,39	4,73	5,52
Madiun	5,10	5,42	-1,69	3,34	4,32
Magetan	5,25	5,04	-1,64	3,04	3,89
Ngawi	5,26	5,05	-1,69	2,55	3,19
Pacitan	5,51	5,08	-1,84	2,49	5,54
Ponorogo	5,31	5,01	-0,90	3,19	3,24

Sumber : BPS Kota Madiun

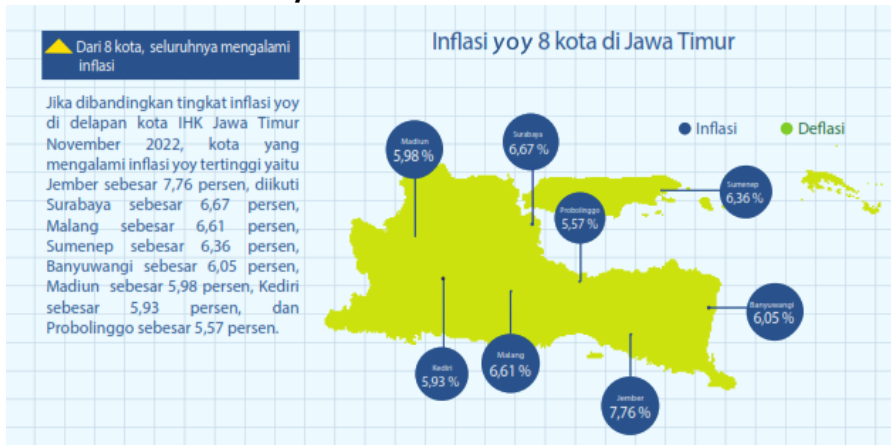
*) Angka Sementara

*) Angka Sangat Sementara

1.3.3. Inflasi

Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintamasyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kestabilan dan pengendalian inflasi perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.4. Inflasi/Deflasi Kota IHK di Provinsi Jawa Timur



Sumber : BPS Kota Madiun

Tingkat inflasi Kota Madiun tahun 2022 terhadap 2021 sebesar 5,80 persen. Adapun pada Bulan Desember 2022 sendiri terjadi inflasi sebesar 0,58 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,61. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Jember sebesar 7,39 persen dengan IHK 115,65 dan inflasi terendah terjadi di Probolinggo sebesar 5,45 persen dengan IHK 112,18. Adapun secara umum Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 6,52 persen dan Nasional mengalami inflasi sebesar 5,51 persen. Sedangkan tingkat inflasi tahun kalender Nasional dari tahun ke tahun (Desember 2022 terhadap Desember 2021) masing-masing sebesar 5,51 persen

**Gambar 1.5. Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Madiun
Tahun 2018-2022**

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah

Inflasi di Kota Madiun dipicu karena adanya kenaikan harga dibandingkan pada Desember tahun lalu pada hampir seluruh kelompok pengeluaran, seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi yoy sebesar 6,42 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,47 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,71 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,06 persen; kelompok kesehatan sebesar 9,87 persen; kelompok transportasi sebesar 16,18 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,01 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,69 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,32 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,73 persen. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan adalah satu satunya kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan atau deflasi dibandingkan pada Desember tahun lalu, yaitu sebesar 7,73 persen.



1.3.4. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Madiun.

Tabel. I.9. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021 – Agustus 2022

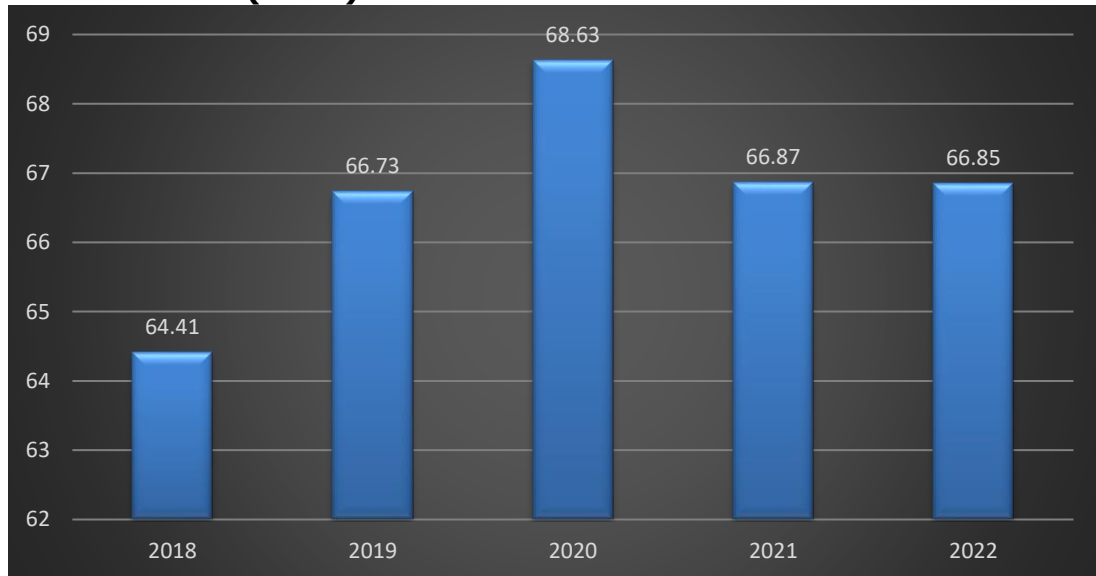
KOMPONEN	2021	2022	PERUBAHAN AGUSTUS 2021-2022	
a. Pengangguran Karena Covid-19	1.243	139	-1.140	-88,82
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19	1.165	256	-909	-78,03
c. Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	2.057	98	-1.959	-95,24
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengangguran Jam Kerja Karena Covid-19	19.920	3.747	-16.173	-81,19
Total	24.385	20.473	-3.912	-82,61
Penduduk Usia Kerja (PUK)	144.219	144.820	601	0,42
Persentase terhadap PUK	16,91%	2,93%	13,98%	

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

Pada diatas dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2022 sebanyak 20.473 orang, mengalami penurunan sebanyak 3.912 orang atau sebesar 82,61 persen dibandingkan dengan Agustus 2021. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri dari 139 orang pengangguran karena COVID-19; 256 orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19; 98 orang sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan 3.747 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2021. Penurunan terbesar adalah komponen sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebesar 95,24 persen.

✚ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Gambar I.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Madiun Tahun 2018-2022



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 66,85 persen, turun 0,02 persen poin dibanding Agustus 2021. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 75,94 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 58,56 persen. Apabila dibandingkan Agustus 2021, TPAK laki-laki mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,78 poin sedangkan TPAK perempuan tetap mengalami penurunan yaitu sebesar 0,75 poin.

✚ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka atau sering disebut dengan pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka



yang bekerja dan penganggur. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 6,39 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar delapan orang penganggur. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 1,76 poin persen dibandingkan Agustus 2021.

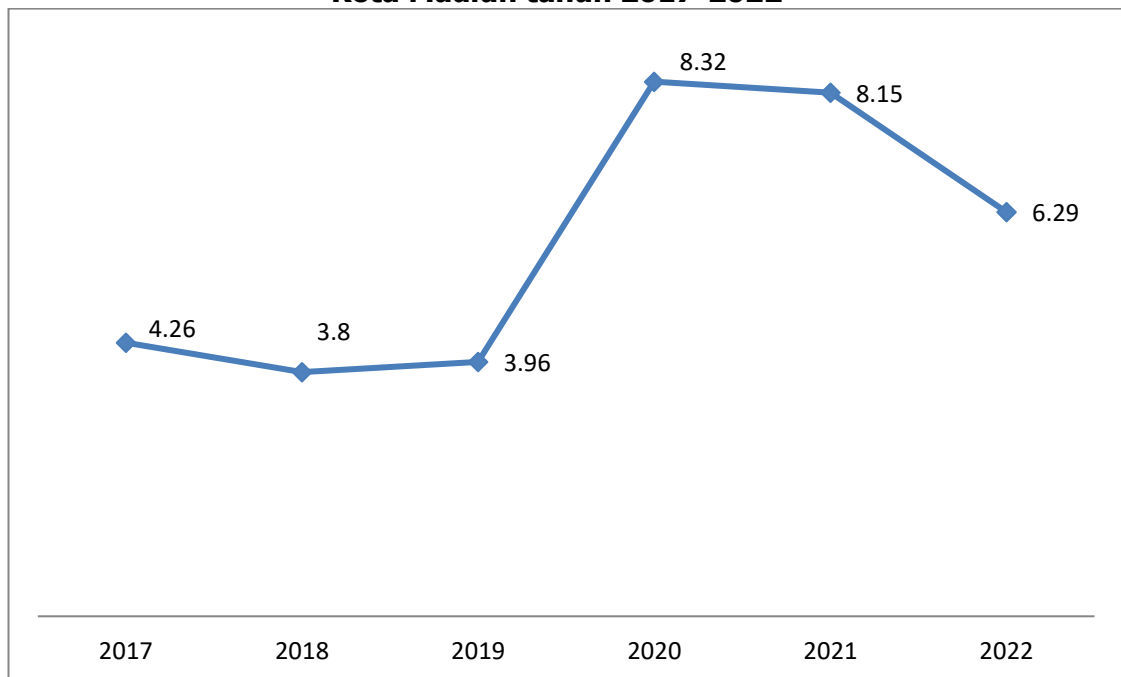
Tabel I.9. Angkatan Kerja Kota Madiun Tahun 2021-2022

KEGIATAN	2021	2022
ANGKATAN KERJA	96.439	96.815
- BEKERJA	88.580	90.627
- PENGANGGURAN	7.859	6.188
BUKAN ANGKATAN KERJA	47.780	48.005
PENDUDUK USIA KERJA	144.219	144.820

Apabila dilihat dari tabel di atas, dari tahun 2021 ke 2022 didapati kenaikan jumlah angkatan kerja yang disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja sedangkan jumlah pengangguran menurun. Pada tahun 2022 jumlah penduduk bekerja naik sebanyak 2.047 jiwa atau naik sebesar 2,31 persen. Sedangkan pengangguran turun dari 7.859 menjadi 6.188 jiwa, dengan jumlah penurunan sebanyak 1.671 jiwa atau 21,26 persen.

Kenaikan terjadi pada kelompok bukan angkatan kerja tahun 2022 dari 47.780 menjadi 48.005 jiwa, dengan jumlah kenaikan sebanyak 255 jiwa atau 0,47 persen. Jadi, Jumlah Penduduk Usia Kerja secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebanyak 144.219 jiwa menjadi 144.820 jiwa di tahun 2022, dengan persentase kenaikan sebesar 0,42 persen.

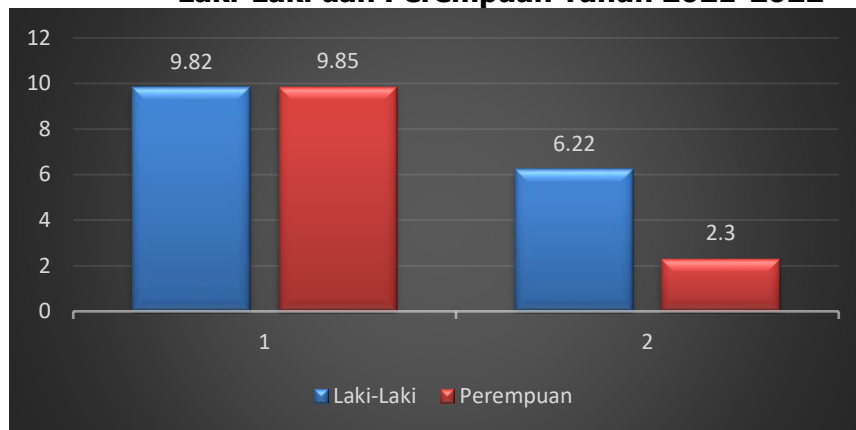
Gambar 1.7. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun tahun 2017-2022



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun ini masih merupakan akibat dari pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan, salah satu fenomenanya adalah banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan jumlah pengangguran masih tinggi. TPT laki-laki sebesar 9,85 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 2,30 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bulan Agustus 2022 menurut jenis kelamin memiliki pola yang sama dengan TPT Agustus 2021, dimana TPT laki-laki lebih besar dari TPT perempuan. Dibandingkan Agustus 2021, TPT laki-laki naik sebesar 0,03 persen poin dan TPT perempuan turun sebesar 3,92 persen poin.

Gambar 1.8. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2021-2022



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu :

- Pengangguran Karena COVID-19;
- Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena COVID-19;
- Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19;
- Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19.

Kondisi (a) dan (b) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi (c) dan (d) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja.

KOMPONEN	2021
a. Pengangguran Karena Covid-19	1.243
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19	1.165
c. Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	2.057
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	19.920
Total	24.385
Penduduk Usia Kerja (PUK)	144.219
Persentase terhadap PUK	16,91%



1.3.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Adapun persentase penduduk miskin yang lazim disebut tingkat kemiskinan, yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kota Madiun secara umum menunjukkan perkembangan yang fluktuatif masih dipicu oleh adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis BPS Kota Madiun, persentase penduduk miskin Kota Madiun Periode Maret Tahun 2022 sebesar 4,76 persen dengan garis kemiskinan apabila dibandingkan pada periode tahun 2021, maka terjadi penurunan sebesar 6,29 persen atau sekitar Rp 37.211,00 dimana Garis Kemiskinan Tahun 2021 berada pada level Rp 514.409,00 perkapita perbulan dan pada Tahun 2022 mencapai Rp 551.620,00 perkapita perbulan.

Tabel I.10. Profil Kemiskinan Tahun 2021 Kota Madiun*

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2017	404.959,00	8.700	4,94
2018	446.525,00	7.920	4,49
2019	478.304,00	7.690	4,35
2020	497.628,00	8.830	4,98
2021*	514.409,00	9.060	5,09

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah

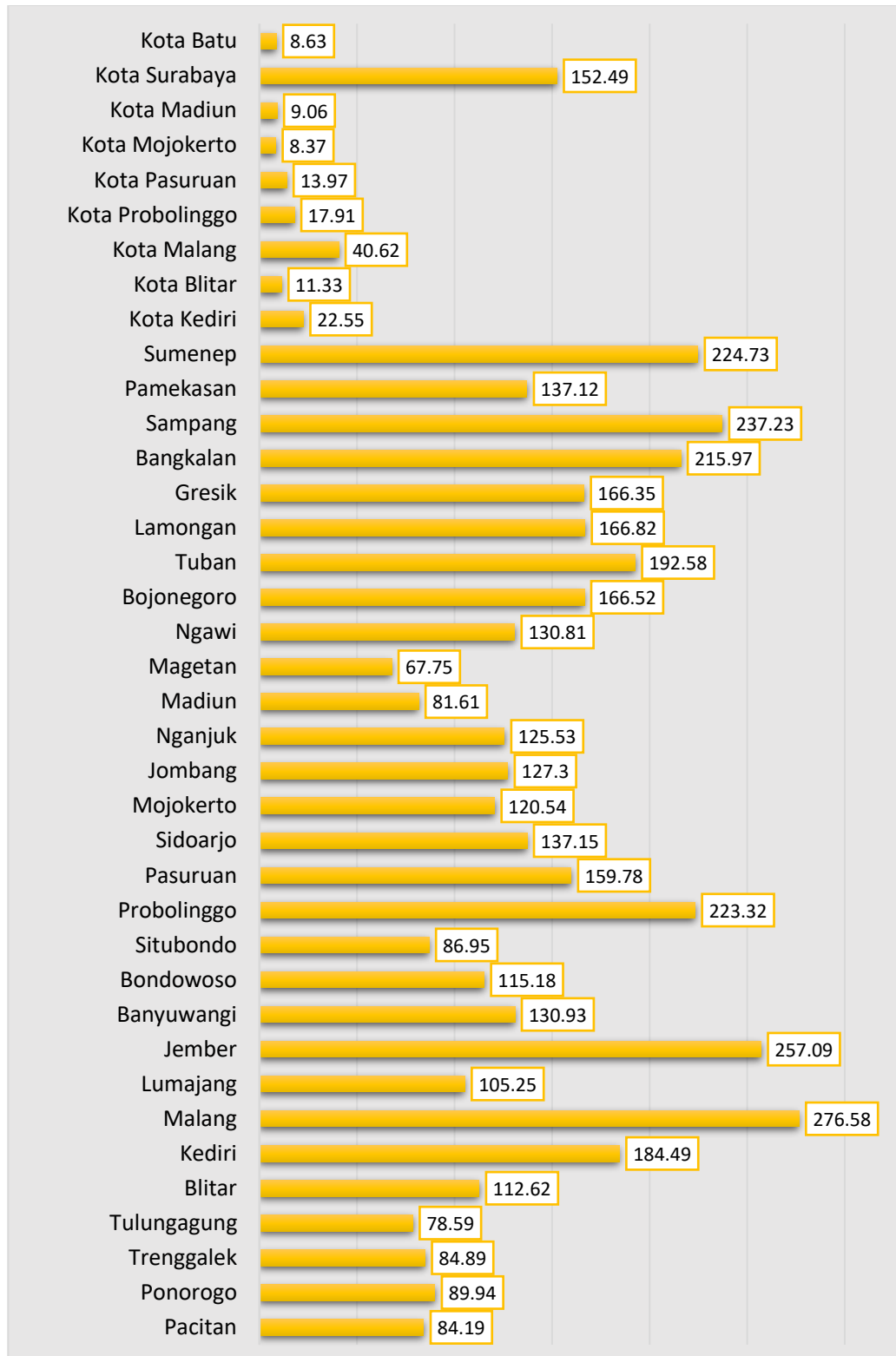


Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Berbagai upaya nyata diberbagai bidang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil.

Jumlah penduduk miskin di Kota Madiun kembali mengalami peningkatan jika banyak penduduk Kota Madiun masuk dalam golongan rawan miskin (*vulnerable*). Golongan *vulnerable* merupakan penduduk yang pengeluarannya berada persis di atas garis kemiskinan namun jaraknya tidak terlalu jauh. Peningkatan tersebut dapat terjadi karena adanya guncangan situasi dan kondisi ekonomi yang sangat berat. Perubahan yang sangat ekstrim terjadi di lapangan dengan adanya wabah Covid 19 yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Perubahan harga minyak dunia, ekspor menurun sejalan dengan kontraksi ekonomi global, sementara konsumsi rumah tangga dan investasi menurun sejalan dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat, kenaikan harga kebutuhan pokok dan hal-hal lain yang sangat berpengaruh terhadap penduduk miskin.



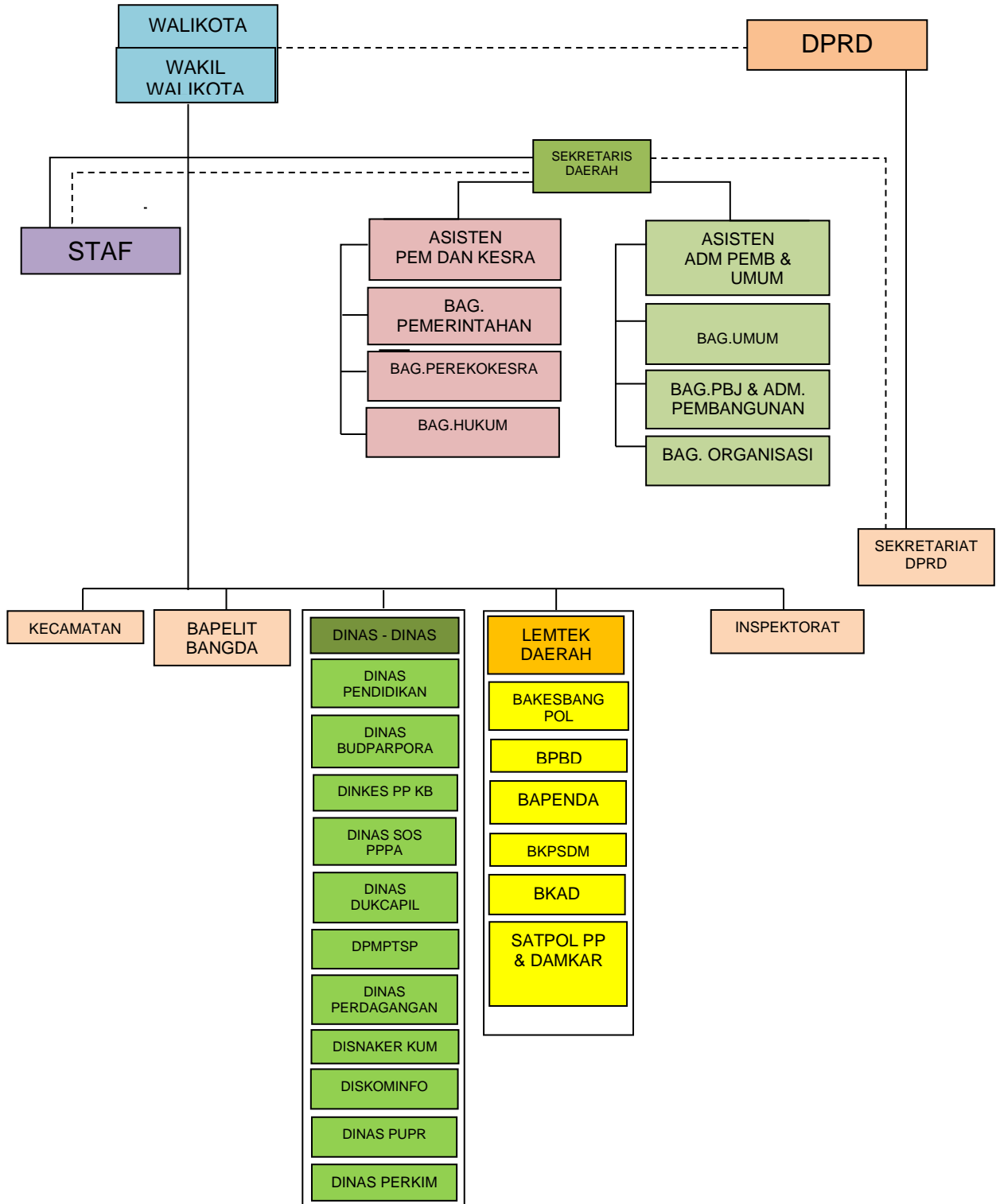
Gambar I.9. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Ribu Jiwa)*



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun



C. Struktur Organisasi



B. Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya disebabkan karena adanya peluang (potensi daerah) dan kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Terdapat lima pokok masalah pembangunan Kota Madiun berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan, yaitu :

1. Masih perlu ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia;
2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan kondisi sangat baik perlu ditingkatkan;
3. Pembangunan ekonomi perlu didorong untuk lebih berkualitas dan mampu pulih secepatnya sebagai dampak Covid-19;
4. Reformasi birokrasi mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkannya sesuai target; dan
5. Perlunya peningkatan kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonisasi. Hasil pemetaan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar I.10. Lima Masalah Pokok Pembangunan Kota Madiun



Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun(RPJMD Perubahan 2019-2024)



Dalam upaya mengatasi permasalahan pokok pembangunan, perlu diidentifikasi faktor penyebab (akar masalah) masalah pokok yang telah diidentifikasi. Permasalahan pokok masih perlu ditingkatkannya kualitas sumberdaya manusia, disebabkan oleh capaian IPM yang lambat meskipun IPM Kota Madiun tertinggi ketiga di Jawa Timur. Selain itu peningkatan kemiskinan dan permasalahan kesehatan akibat Covid-19 perlu juga menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Masih terbatasnya pencapaian ekonomi daerah yang inklusif disebabkan oleh masih rendahnya pertumbuhan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan relatif tingginya ketimpangan pendapatan. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya nilai investasi dan nilai tambah sektor unggulan, serta masih perlu ditingkatkannya infrastruktur ekonomi daerah dan kemampuan keuangan daerah. Berikut hasil pemetaan :

Tabel I.11. Hasil Pemetaan Masalah Pokok berdasarkan Identifikasi Permasalahan Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia	Indek Pembangunan manusia sudah sangat tinggi namun belum mencapai target RPJMD	Masih perlu ditingkatkannya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
			Masih perlu ditingkatkannya tenaga pendidik SD/MI dan SMP/MTS dengan kualifikasi lulusan S1/S2/S3
			Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang kesehatan
			Masih perlu ditingkatkannya pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
		Meningkatnya tingkat kemiskinan	Pandemic Covid-19 menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat
			Meningkatnya jumlah PMKS
	Masih terbatasnya jaring pengaman sosial		



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan	Kuantitas dan kualitas infrastruktur masih perlu peningkatan	Masih perlu ditingkatkannya indeks kenyamanan kota
			Perencanaan pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan dan direncanakan secara komprehensif
			Masih terdapat jalan berkualitas buruk
			Masih terbatasnya indeks infrastruktur ekonomi daerah
			Proporsi Belanja modal relatif rendah meskipun mengalami peningkatan
		Masih terbatasnya pengelolaan lingkungan hidup	Masih perlu ditingkatkannya sanitasi dan penyediaan air dan udara yang bersih
			Penurunan kualitas lingkungan
			Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kota
			Pengelolaan limbah dan persampahan
			Sanitasi dan penyediaan air bersih
3	Pembangunan ekonomi perlu didorong untuk lebih berkualitas	Menurunnya pertumbuhan ekonomi	Pandemic covid 19 masih belum pasti kapan akan diatasi
			Pembatasan mobilitas akibat Covid-19 dan menurunnya tingkat konsumsi
			Industri utama di Kota Madiun terdampak Covid-19 sehingga mengalami penurunan produksi
			Nilai tambah sektor unggulan masih terbatas
			Masih perlu ditingkatkannya infrastruktur ekonomi daerah
	Ketimpangan Pendapatan	Masih terjadinya ketimpangan antar wilayah khususnya antar kelurahan	
		Masih terbatasnya penggalian potensi PAD	
	Kapasitas fiskal daerah terbatas	Penentuan target pendapatan masih dalam skema pesimis	



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Reformasi birokrasi mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkannya sesuai target	Tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaannya belum optimal	Indeks reformasi birokrasi belum optimal
		Masih perlu ditingkatkannya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis sistem informasi dan teknologi / digitalisasi	Masih terbatasnya kualitas ASN Kualitas pelayanan terhadap masyarakat masih perlu ditingkatkan Masih terbatasnya kualitas aparatur Masih perlu ditingkatkannya kapasitas pengelolaan pemerintahan
5	Perlunya peningkatan kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat	Masih perlu ditingkatkannya harmonisasi dan stabilisasi kehidupan masyarakat	Masih terdapatnya kriminalitas Masih rawannya konflik sosial Masih perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keindahan serta masih perlu ditingkatkannya tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban ketentraman, keindahan)
		Masih rendahnya IPG dan IDG	Masih terbatasnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun(RPJMD Perubahan 2019-2024)

Penentuan isu-isu strategis merupakan langkah utama dalam menentukan arah kebijakan kedepan. Isu strategis merupakan kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal sebagaimana digambarkan dalam uraian kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan Kota Madiun. Analisis isu-isu strategis didefinisikan berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang yang terjadi dan akan terjadi termasuk memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan. Isu strategis juga disusun berdasarkan berbagai hal yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang sampai dengan berakhirnya masa perencanaan jangka menengah.



Isu strategis dirumuskan dalam RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2024 ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria dalam tabel di bawah. Setiap kriteria akan dikalikan dengan angka maksimum 100.

Tabel I.12. Kriteria Pembobotan Isu-isu Strategis Daerah Kota Madiun

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah	15
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	20
3	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	15
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
Total		100

Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun(RPJMD Perubahan 2019-2024)

Dari berbagai isu strategis kemudian dikelompokkan dan di ranking sebagai berikut :

Tabel I.13. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis Kota Madiun Tahun 2019-2024

No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
1	Sumberdaya manusia	Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	90	90	80	90	80	80	85,5	3
	Pencapaian SDGs									
	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial									
	Kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.									
2	Pembangunan Ekonomi	Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk mencapai ekonomi daerah yang inklusif melalui pengembangan	90	85	90	90	85	85	87,5	1
	Pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak Pandemic Covid-19 terhadap ekonomi global									



No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
	Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Diperlukan klasterisasi wilayah	kawasan pertumbuhan ekonomi								
	Penguatan ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan									
	Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal									
	Peningkatan ekonomi daerah yang inklusif dan pengembangan Kawasan pertumbuhan ekonomi baru peran yang mandiri									
	Klasterisasi wilayah sesuai potensi sosial ekonomi									
	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri,									

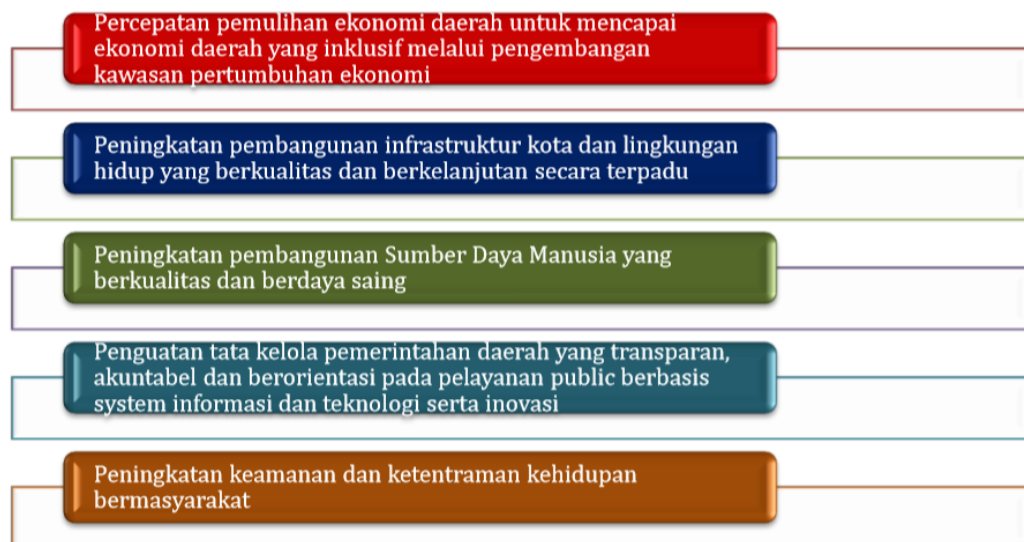


No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
3	pariwisata dan jasa produktif lainnya									
	Infrastruktur dan lingkungan									
	Pembangunan infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu, dan keadilan akses bagi masyarakat	Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu	90	85	90	85	85	85	86,5	2
	Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat									
	Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air									
Penguatan harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup										
4	Sosial kemasyarakatan									
	Penguatan harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup	Peningkatan keamanan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat	85	90	80	85	80	85	84,5	5
Peningkatan harmonisasi kehidupan bermasyarakat										
5	Pemerintahan dan Tata Kelola	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan,	85	90	80	85	85	85	85,25	4
	pembangunan berbasis Smart City									

No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
	Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman dan damai.	akuntabel dan berorientasi pada pelayanan public berbasis system informasi dan teknologi serta inovasi								
	Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional									

Sesuai dengan kriteria diatas, terdapat lima isu strategis pembangunan daerah. Selain itu, berpijak pada analisis atas kondisi daerah dan masukan dari para pemangku kepentingan, maka isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Madiun pada tahun pelaksanaan rencana jangka menengah daerah 2019–2024 adalah sebagai berikut:

Gambar I.12. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Madiun



Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun, 2021



C. Sistematika

Sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Gambaran Umum Daerah (Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Ekonomi), Struktur Organisasi, isu strategis, serta inovasi yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Madiun.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar perjanjian kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 meliputi RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Uraian tentang capaian kinerja Pemerintah Kota Madiun tahun 2022, sesuai dengan sasaran strategis dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, meliputi pengukuran kinerja, perkembangan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran, evaluasi dan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja, serta realisasi keuangan.



BAB IV : PENUTUP

Uraian tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Madiun tahun 2022 dan memberikan rekomendasi yang mungkin untuk dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BAB II

P ERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Madiun tahun 2019-2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Madiun merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Madiun.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan yang matang, berbasis data yang akurat, maka diharapkan dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat, efektif dan efisien guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.



A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Madiun Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Madiun, merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Walikota sebagaimana yang disampaikan kepada masyarakat dan para wakil rakyat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional. RPJMD Kota Madiun memuat gambaran umum kondisi Kota Madiun, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, isu-isu strategis dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Madiun Tahun 2019–2024 ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPJMD Perubahan Kota Madiun Tahun 2019-2024 disusun dengan strategi **keberlanjutan** yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode kepemimpinan sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan sosial, ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu instansi yang berwenang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun yang berkewajiban meningkatkan pembangunan disegala bidang dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menyusun perencanaan ini, sehingga terwujud satu kesatuan perencanaan yang dapat berjalan sesuai dengan keputusan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 2.1. RPJMD 2019-2024



Sumber : Bappelitbangda 2022

1. Visi

Berdasarkan pada gambaran dan analisa kondisi eksisting dan tantangan makro yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun mendatang serta potensi wilayah yang dimiliki dan dapat untuk lebih dikembangkan, maka ditetapkan visi Kota Madiun dalam RPJPD tahun 2005 – 2025 dan selanjutnya berdasarkan visi pembangunan jangka panjang tersebut di tetapkan visi pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Visi RPJPD dan RPJMD

PERIODE	VISI
RPJPD 2005-2025	Terwujudnya Kota Madiun Sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera
RPJMD 2019-2024	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera
Keterkaitan RPJPD dengan RPJMD	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Optimalisasi Peran Kota Madiun Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Sumber : Bappelitbangda 2022



Dalam dokumen ini dijabarkan pengertian atau makna dari maju dan sejahtera. Makna “Kemajuan” berkaitan dengan kondisi yang terus- menerus berkarya dengan dilandasi falsafah bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Pengertian maju secara sederhana antara lain mencakup bidang IPOLEKSOSBUD, melalui peningkatan indikator ekonomi, indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan penerapan indikator *good governance*.

Makna “Sejahtera” berhubungan dengan kemajuan Kota Madiun di segala aspek kehidupan yang harus mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Ukuran dasar kesejahteraan yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok (*basic need*) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang terdistribusi secara proporsional dan adil dalam seluruh struktur dan lapisan masyarakat. Persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan ditangani secara komprehensif dan proporsional. Semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, dapat menyatakan pendapat dan aspirasinya secara demokratis dan memperoleh perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Aspek kesejahteraan disini mencakup juga aspek batiniah dan religiusitas yang secara operasional tercermin dalam kerukunan umat beragama dan perilaku yang dilandasi budi pekerti luhur dalam pergaulan hidup keseharian warga masyarakat.

Visi yang telah ditetapkan tersebut akan tercapai dengan cara mewujudkannya pada 4 (empat) elemen kehidupan kota yaitu Pemerintahan, Masyarakat, Swasta, dan Lingkungan. Pemerintahan dikatakan sejahtera apabila pemerintahan tersebut telah mampu memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar para pegawainya. Untuk masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, perwujudannya adalah rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kesejahteraan swasta dapat tercapai apabila ditandai dengan peningkatan pendapatan atau laba dari hasil usaha ekonominya dan terwujudnya persaingan yang sehat.



Lingkungan yang sejahtera adalah lingkungan yang tata ruangnya mampu mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan mendukung kelestarian alam dan keanekaragaman hayati.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sebagai penjabaran atas visi tersebut, dirumuskan misi selama masa jabatan 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel II.2 Visi dan Misi RPJMD

VISI : "Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"	
M I S I	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)
	2. Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
	3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
	4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun

Sumber : Bappelitbangda 2022

Berbagai misi dan orientasi pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya. Untuk mengimplementasikan keseluruhan tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada pada tahun awal perencanaan.



3. Tujuan Pembangunan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari misi atau orientasi pembangunan atau sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kota Madiun secara umum. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kota Madiun, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan bertitik tolak pada arah misi atau orientasi pembangunan, tujuan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel II.3 Visi, Misi dan Tujuan RPJMD

Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera		
NO	MISI	TUJUAN
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan professional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities
2	Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pembangunan infrastruktur kota yang maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun	<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif2. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan stabilitas kehidupan sosial masyarakat



4. Sasaran Pembangunan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Madiun selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel II.4 Target Kinerja Sasaran Akhir RPJMD

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional yang Berorientasi pada Pelayanan Publik Berbasis Smart Cities			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target RPJMD 2022
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	BB (71)
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sangat Tinggi
		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2,85 (baik) indeks
1.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	86,50 (baik) indeks
		Indeks Inovasi Daerah	55,6 indeks

Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Kota yang Maju, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target RPJMD 2022
2.1.1	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks Infrastruktur	98,25 indeks
2.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,77 indeks



Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target RPJMD 2022
3.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,41 Tahun
		Rata-rata Lama Sekolah	11,39 Tahun
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,83 Tahun
3.1.3	Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,18 indeks

Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target RPJMD 2022
4.1.1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,74%
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	10,16%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	11,32%

Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target RPJMD 2022
4.2.1	Pengurangan kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,46%
4.2.2	Meningkatnya stabilitas kehidupan social masyarakat	Indeks Kerukunan	B skor 74,40 (Harmonis)
		Indeks Rasa Aman	76,2 indeks



B. Perjanjian Kinerja

RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, selanjutnya dijabarkan secara bertahap dalam rencana kinerja tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Target kinerja yang telah ditetapkan tersebut beserta dengan alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Besaran target kinerja yang ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2022 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Madiun tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	BB (71) skor
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,85 (Baik) indeks
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	86,50 (baik) indeks
		Indeks Inovasi Daerah	55,6 indeks
3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks infrastruktur	98,25 indeks
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,77 indeks
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,41 tahun
		Rata-rata Lama Sekolah	11,39 tahun
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,83 tahun
7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,18 indeks
8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,74%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	10,16%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	11,32%
10	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,92%
11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	B skor 74,40 (Harmonis)
		Indeks Rasa Aman	76,2 indeks

No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	731,215,041,009.00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	67,486,374,349.00
3	Program Pengembangan Kurikulum	3,176,536,300.00
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1,423,799,570.00
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	101,308,583,574.00
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	385,299,800.00
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	97,249,200.00
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2,262,643,040.00
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	9,539,718,000.00
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100,569,000.00
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	24,571,909,810.00
12	Program Penataan Bangunan Gedung	26,109,169,800.00
13	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	17,514,171,250.00
14	Program Penyelenggaraan Jalan	60,581,040,250.00
15	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	540,000,000.00
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,637,339,369.00



No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
17	Program Pengembangan Perumahan	3,407,604,960.00
18	Program Kawasan Permukiman	6,555,190,010.00
19	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	27,176,330,250.00
20	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5,421,088,960.00
21	Program Penanggulangan Bencana	1,552,347,000.00
22	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,227,280,000.00
23	Program Pemberdayaan Sosial	4,988,530,100.00
24	Program Rehabilitasi Sosial	2,522,409,247.00
25	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	16,989,344,425.00
26	Program Penanganan Bencana	696,896,928.00
27	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	214,966,380.00
28	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,126,236,770.00
29	Program Penempatan Tenaga Kerja	588,733,762.00
30	Program Hubungan Industrial	1,662,461,160.00
31	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	781,965,670.00
32	Program Perlindungan Perempuan	373,259,905.00
33	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	780,466,550.00
34	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	211,302,480.00
35	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	386,281,631.00
36	Program Perlindungan Khusus Anak	387,947,118.00
37	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,040,105,000.00
38	Program Pengawasan Keamanan Pangan	124,124,000.00
39	Program Pengelolaan Izin Lokasi	347,501,600.00



No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
40	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	36,200,000.00
41	Program Penatagunaan Tanah	15,849,480.00
42	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	450,468,000.00
43	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,549,640,890.00
44	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	56,000,000.00
45	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	23,472,000.00
46	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	565,245,775.00
47	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	603,117,500.00
48	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100,000,000.00
49	Program Pengelolaan Persampahan	9,047,687,014.00
50	Program Pendaftaran Penduduk	282,108,000.00
51	Program Pencatatan Sipil	325,423,000.00
52	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	235,475,000.00
53	Program Pengendalian Penduduk	864,084,050.00
54	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2,203,600,800.00
55	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1,440,627,664.00
56	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	8,453,629,770.00
57	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	4,969,018,580.00
58	Program Aplikasi Informatika	12,652,240,580.00
59	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	436,569,500.00
60	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	180,850,700.00
61	Program Pengembangan Umkm	420,561,000.00



No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
62	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	183,865,600.00
63	Program Promosi Penanaman Modal	233,125,650.00
64	Program Pelayanan Penanaman Modal	365,970,640.00
65	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	454,884,000.00
66	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	80,900,040.00
67	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	546,890,000.00
68	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8,137,659,271.00
69	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	290,000,000.00
70	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	221,296,880.00
71	Program Pengembangan Kebudayaan	2,871,158,634.00
72	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	123,886,145.00
73	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,547,225.00
74	Program Pembinaan Perpustakaan	1,494,897,184.00
75	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	100,000,000.00
76	Program Pengelolaan Arsip	605,608,579.00
77	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	116,488,592.00
78	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	344,650,000.00
79	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	40,360,000.00
80	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	336,122,600.00
81	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	716,601,820.00
82	Program Pemasaran Pariwisata	1,076,057,870.00
83	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	322,452,120.00
84	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,310,831,000.00



No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
85	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	542,900,000.00
86	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	307,100,700.00
87	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	146,300,000.00
88	Program Perizinan Usaha Pertanian	50,000,000.00
89	Program Penyuluhan Pertanian	68,873,500.00
90	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	267,723,000.00
91	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5,932,292,774.00
92	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	6,801,411,200.00
93	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	318,044,100.00
94	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	383,983,850.00
95	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	854,804,236.00
96	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1,003,452,555.00
97	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	14,850,000.00
98	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	12,879,526,978.00
99	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,132,577,235.00
100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	16,644,270,784.00
101	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,117,110,925.00
102	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,633,672,426.00
103	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	7,687,259,894.00
104	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,251,475,980.00
105	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,343,222,850.00
106	Program Kepegawaian Daerah	2,156,679,252.00
107	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,597,265,935.00



No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
108	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	731,038,204.00
109	Program Penyelenggaraan Pengawasan	455,597,821.00
110	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	912,598,000.00
111	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	17,062,333,434.00
112	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25,723,126,883.00
113	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1,762,412,865.00
114	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	297,871,724.00
115	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	453,984,497.00
116	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,009,259,170.00
117	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	254,712,640.00
118	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	589,952,490.00
119	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,697,980,990.00
JUMLAH		1,310,574,608,272.00



BAB III

A KUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actualizing dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.



A. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel III.1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

No	Capaian Realisasi	Kategori Capaian Kinerja
1	> 100 %	Sangat Baik/Istimewa
2	100 %	Baik
3	80 % - 99 %	Cukup
4	60 % - 79 %	Kurang
5	0 % - 59 %	Sangat Kurang

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

(1) **Tingkat Realisasi Positif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$



- (2) **Tingkat Realisasi Negatif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2) Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

Realisasi capaian kinerja Tahun 2022 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikaitkan dengan Misi Walikota dan Tujuan pendukung Misi Walikota adalah sebagai berikut :

Tabel III.2 Pengukuran Realisasi Kinerja Misi 2022

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance)				
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	68 (B)	69,26 (B)	101,85



Misi 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan				
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Liveable City	88,19	90,33	102,43

Misi 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun				
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	81,70	82,01	100,38
	Indeks Pembangunan Gender	94,44	94,57	100,14

Misi 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun				
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,40	6,87*	107,34
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	77,05	81,25	105,45
	Indek Gini	0,37	0,398	92,43

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun, KEMENPANRB dan BPS

*Angka 2021 dikarenakan angka 2022 belum rilis



Tabel III.3 Pengukuran Realisasi Kinerja 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	BB (71) Skor	BB (77,15) skor	108,66
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi (3,3805)*	100
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,85 (Baik) Indeks	2,86 (baik) indeks	100,35
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	86,50 (baik) indeks	86,964 (sangat baik)	100,54
		Indeks Inovasi Daerah	55,6 indeks	53,96 indeks	97,05
3.	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks Infrastruktur	98,25 indeks	98,26	100,01
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,77 indeks	58,13	100,62
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,41 tahun	14,43	100,13
		Rata-rata Lama Sekolah	11,39 tahun	11,67 tahun	104,66
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,83 tahun	73,13	100,41



No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
7.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,18 indeks	76,75*	99,44
8.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,74	6,39	88,67
9.	Meningkatnya pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	10,16	7,98	78,54
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	11,32	21,57	190,54
10.	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,07	4,76	106,11
11.	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Angka Kerukunan	B skor 74,40 (harmonis)	75,68	101,72
		Indeks Rasa Aman	76,2 indeks	82,18	107,84

** Angka Sangat Sementara

*Angka Sementara

IT : Indikator Tujuan

IS : Indikator Sasaran

Sumber Data : Tim Penyusun LKPJ Kota Madiun, data diolah

3) Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

1. Misi Pertama : Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) didukung oleh 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran

Pada Misi 1 Tujuan 1 terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2021 (n-1)	2022 (n)
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	70,01 (BB)	66,25 (B)	69,26 (B)

Sumber : KEMENPANRB 2022

Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	70,01 (BB)	69,26 (B)	98,92

Sumber : KEMENPANRB 2022



**Tabel III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan
Realisasi Provinsi dan Nasional**

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Provinsi 2022	Realisasi Nasional 2022
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	69,26 (B)	BB	N/A

Sumber : KEMENPANRB 2022

Indeks RB Kota Madiun

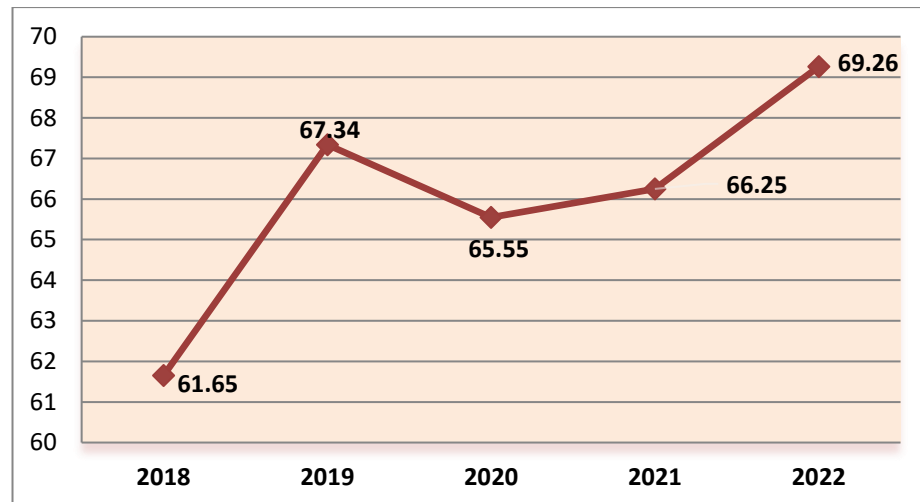
Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut dari pedoman evaluasi tahun sebelumnya adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis holistik.

Evaluasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberika pelayanan publik yang semakin membaik. Selain juga untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.

Perkembangan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



**Gambar III.1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun
Tahun 2018-2022**



Sumber : Kementerian PANRB 2022

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan, sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan PMPRB Tahun 2020 terdapat perbedaan dalam komposisi penilaiannya, jika dulu hanya terdiri dari 2 komposisi yaitu Faktor Pengungkit (60%) dan Hasil (40%), tapi di tahun 2020 terdapat perubahan di komposisi Faktor Pengungkit sebagai berikut:

- Mandatory (20%): poin-poin penilaian dalam *mandatory* adalah poin-poin penilaian dalam faktor pengungkit yang lama, bedanya jika dulu bobotnya 60% sekarang berubah menjadi 20%.
- Kewajiban K/L (10%): adalah penilaian oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang hasilnya antara lain Penilaian Arsip (oleh lembaga kearsipan), indeks kinerja penyerapan anggaran (oleh Kemenkeu), Indeks Pengelolaan Aset (oleh Kemenkeu), Indeks APIP (oleh BPKP), Indeks SPIP (oleh BPKP), dsb.
- Reform (30%): hasil perubahan yang sudah dicapai oleh perangkat daerah.



Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Madiun adalah 69,26 kategori "B" dengan capaian kinerja sebesar 103,37%. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.7. Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	2022
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	13,61
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,79
	III. Reform	30,00	16,19
Total Komponen Pengungkit		60,00	36,59
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,40
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,13
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,54
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,60
Total Komponen Hasil		40,00	32,67
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	69,26

Sumber : Kementerian PANRB



Sedangkan untuk Hasil Antara dari masing-masing *leading sector* adalah sebagai berikut :

Tabel. III.8. Hasil Antara Penilaian Reformasi Birkorasi dari Kementerian/Lembaga

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	130,50	266	KASN
2.	ASN Profesional	0-100	47,39	48,33	BKN
3.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	3,06	2,86	Kementerian PANRB
4.	Kualitas Penegelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	23,79	65,60	LKPP
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,17	4,36	Kementerian PANRB
6.	Kapabilitas APIP	0-5	1	3	BPKP
7.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
8.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	78,47	74,52	Ombudsman RI
9.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	59,01	79,06	ANRI
10.	Reformasi Hukum	0-100	-	66,80	Kementerian Hukum dan HAM

Sumber : Kementerian PANRB Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat, jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara ditahun 2022 yaitu system merit, ASN Profesional, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas Pelayanan Publik, Kapabilitas APIP, dan Kualitas pengelolaan arsip. Meskipun Sistem Pemerintahan Berbasis ELEktronik (SPBE) dan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik mengalami penurunan dari hasil penilaian tahun 2021. Namun penilaian hasil antara Pemerintah Kota Madiun yaitu Reformasi Hukum menunjukkan hasil yang cukup baik dengan nilai sebesar 66,80. Sehingga secara keseluruhan hasil antara Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan.



Capaian dari komponen hasil Pemerintah Kota Madiun adalah :

Tabel. III.9. Capaian Komponen Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi

No.	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Opini BPK	Opini	WTP	BPK
2.	Nilai SAKIP	0-100	77,15	Kementerian PANRB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	91,29	Kementerian PANRB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	85,42	SPI Eksternal oleh KPK
5.	Survei Internal Organisasi	0-100	85,12	SPI Internal oleh KPK

Sumber : Kementerian PANRB 2022

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Kemauan dan komitmen politik yang kuat, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah
2. Kesamaan persepsi dan tujuan mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah
3. Konsistensi dan keberlanjutan, karena reformasi birokrasi merupakan proses panjang dan berkelanjutan
4. Ketersediaan dana/anggaran, untuk melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan pegawai
5. Dukungan masyarakat, berupa partisipasi masyarakat dan sistem kontrol dari berbagai unsur masyarakat

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah masih belum dilaksanakan dengan optimal



2. Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap program/kegiatan RB dan role model (agent of change) di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah sehingga belum sepenuhnya berhasil menciptakan inovasi-inovasi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan
3. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun masih rendah
4. Belum adanya evaluasi mengenai kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
5. Sistem pola karir (career path) pegawai yang ada belum sepenuhnya berbasis hasil kerja/prestasi kerja
6. Belum efektifnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
7. Belum semua unit pelayanan publik yang ada memiliki dan menerapkan Maklumat Layanan (Service Level Agreement) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas agen perubahan di tahun 2022
2. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi agen perubahan pada perangkat daerah
3. Melakukan identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang tumpang tindih, tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat dengan kebijakan lainnya dari tahun 2001 sampai dengan 2021
4. Melaksanakan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan sistem merit diantaranya assessment pegawai, penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) dan pememtaan talenta pegawai



5. Melakukan pembinaan dan pendampingan inovasi pelayanan publik dalam rangka menciptakan inovasi-inovasi yang bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat.
6. Pemerintah Kota Madiun telah melakukan Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebanyak 166 Pejabat Struktural dan telah dilantik pada tanggal 31 Desember 2021 dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang langkah konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Adminisrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
7. Pelaksnaan pembangunan zona integritas dengan mengusulkan unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Puskesmas Demangan dan Puskesmas Sukosari di tahun 2022
8. Melaksanakan survey Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi secara Mandiri dalam rangka pembangunan zona integritas pada unit pelayanan publik.
9. Melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tiap tahun sekali yang hasilnya digunakan sebagai perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat
10. Menindaklanjuti Lapran Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021 sebagai bentuk penguatan manajemen kinerja sektor publik.
11. Melakukan pengembangan aplikasi dengan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi. Untuk tahun 2022 ini telah direalisasikan ashboard Manekin yaitu dashboard yang berisikan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang terdiri dari aplikasi e-kak, sipd, mskp dan e-sakip. MSKP juga merupakan aplikasi pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

**Gambar III.2. Dashboard Manajemen Kinerja
Dashboard Manekin**



12. Melakukan Refreshment dan Pelatihan Awareness SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 kepada pegawai Sekretariat Daerah Kota Madiun. Dan diperolehnya Sertifikasi ISO yaitu SNI ISO 9001:2015 terkait management *Quality System-Requirement* dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyipuan untuk Sekretariat Daerah Kota Madiun dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyipuan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
13. Penguatan kebijakan pengawasan internal dengan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu dengan mengadakan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
14. Memberikan pembinaan dan panduan dalam rangka pengisian LHKASN pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.



Tujuan "Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities" didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator dengan capaian sebagai berikut :

Tabel. III.10. Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 1 Tahun 2022

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	BB (71)	BB (77,15)	108,66
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi	3,3805 (Sangat Tinggi)*	100
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,85	2,86 (baik) indeks	100,35
1.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	83 (baik)	86,964 (sangat baik)	100,54
		Indeks Inovasi Daerah	55,6	53,96	97,05%

Sumber Data : Kementerian PAN RB, Dinas terkait pengampu indikator dan BPS

A. Sasaran 1 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori hasil penilaian SAKIP adalah sebagai berikut :

**Tabel III.11. Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah**

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 - 90	Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
4.	B	>60 -70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja
5.	CC	>50 -60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6.	C	>50 -60	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	>50 -60	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.



Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor : 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 bahwa guna mengintegrasikan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran terdapat beberapa penyesuaian target indikator salah satunya yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun dimana dalam RPJMD dengan target 76 disesuaikan menjadi 71. Hal ini dilakukan dengan berdasarkan kenaikan capaian atas nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 (pada saat penetapan RKPD nilai AKIP 2021 belum keluar) yang rata-rata kenaikannya sebesar 2,12 sehingga dilakukan penyesuaian target nilai AKIP pada RKPD 2022. Selain itu telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

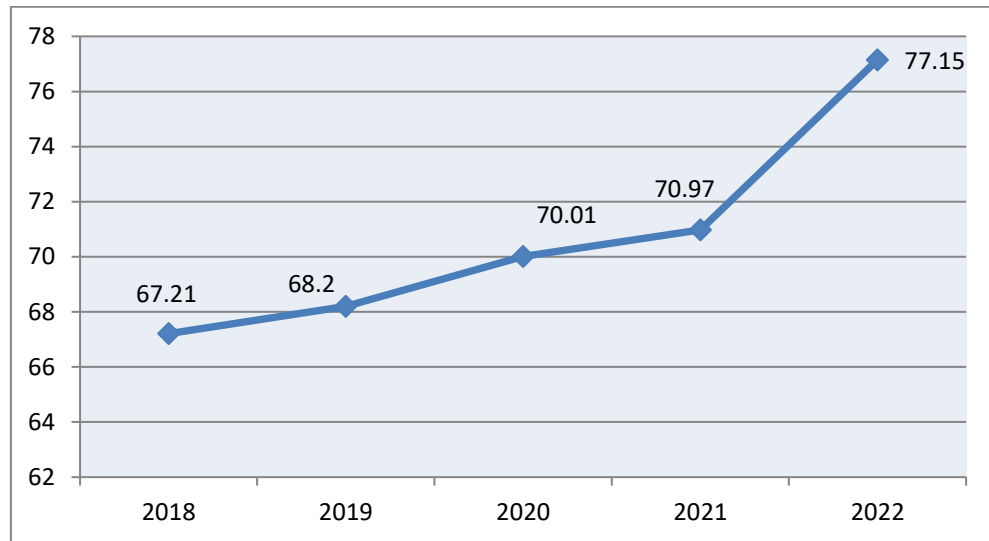
Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,67
2	Pengukuran Kinerja	30	23,16
3	Pelaporan Kinerja	15	11,49
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,83
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Gambar III.3. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja



Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017-2021



Sumber : KEMENPANRB 2022

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 6 Desember 2022 Nomor : B/1071/AA.05/2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, hasil evaluasi Pemerintah Kota Madiun mendapatkan nilai 77,15 dengan dengan Predikat BB tercapai 108,66% dari target sebesar 71. Secara umum perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. "Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun" selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 capaian kinerjanya mengalami kenaikan. Namun hasil evaluasi tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.



Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan pohon kinerja dan penyusunan cascading kinerja mulai dari level atas sampai dengan level unit terkecil dan melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Pohon Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Perubahan 2019-2024
2. Melakukan pendampingan penyusunan RENSTRA Tahun 2019-2024 beserta dokumen perencanaan masing-masing Perangkat Daerah dengan pendekatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan yang ingin dicapai dan keterkaitan dengan sasaran RPJMD serta tupoksi, untuk penyusunan lebih lanjut sesuai regulasi, bersamaan dengan review RPJMD dan RENSTRA tentang implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang berlaku secara serentak bagi pemerintah daerah
3. Melakukan penetapan RPJMD Perubahan dan Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah Perubahan
4. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja pada Perangkat Daerah mulai dari Kepala Perangkat Daerah sampai dengan Pelaksana dan penandatanganan Perjanjian Kinerja
5. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan LKj Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dilaporkan Tahun 2022, dengan penekanan pada analisis terhadap capaian kinerja serta rencana aksi/tindak lanjut tahun berikutnya, cascading dan peta proses bisnis Perangkat daerah
6. Pemanfaatan informasi kinerja melalui aplikasi yang terintegrasi dengan kualitas pengukuran kinerja yang lebih baik sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan yaitu melalui dashboard manajemen kinerja
7. Menetapkan prioritas pembangunan yaitu RKPD Tahun 2022 yaitu penguatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor



unggulan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital dan tahun 2023 yaitu peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital, yang selanjutnya perencanaan penganggaran difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan prioritas pembangunan di Kota Madiun

8. Meningkatkan kapasitas evaluator dengan akan dilakukannya BIMTEK bagi evaluator, melakukan pendampingan dengan Inspektorat Provinsi/Biro Organisasi, dan study banding
9. Melakukan pengembangan aplikasi dengan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi. Untuk tahun 2022 ini telah direalisasikan ashboard Manekin yaitu dashboard yang berisikan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang terdiri dari aplikasi e-kak, sipd, mskp dan e-sakip. MSKP juga merupakan aplikasi pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

Nilai EKPPD Tahun 2022 terhadap hasil LPPD tahun sebelumnya diumumkan terakhir kali pada tahun 2020, maka pada tahun 2021 dan 2022 data yang disajikan masih menggunakan data tahun 2020 yaitu memperoleh



Status Kinerja Sangat Tinggi dengan Skor 3,3805. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan (Kinerja Makro) maupun keberhasilan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menarik menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Makro dilakukan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja indikator, sebagai berikut :

Tabel III.12 Tabel pembobotan Indikator Kinerja Makro Penyelenggaraan Pemerintahan

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	BOBOT INDIKATOR
1	Indeks Pembangunan Manusia	20%
2	Angka Kemiskinan	20%
3	Angka Pengangguran (TPT)	15%
4	Pertumbuhan Ekonomi	10%
5	Pendapatan Perkapita	15%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	20%

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi :

Tabel III.13 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR KINERJA	JUMLAH INDIKATOR
----	-------------------	------------------

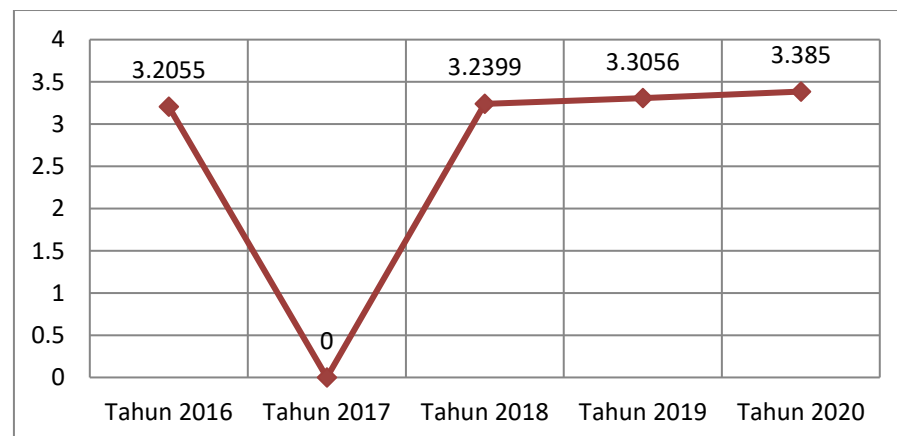


1	IKK Outcome	105
2	IKK Output	488
3	IKK Fungsi Penunjang	18

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun 2020 meraih nilai 3,3850 dengan predikat Sangat Tinggi. Hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang memperoleh nilai 3,3056. Sedangkan di Tahun 2018 yang memperoleh nilai 3,2399 dan Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak ditampilkan (N/A, Not Available). Dan di Tahun 2016 3,2055. Capaian kinerja indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah 100%. Hal ini merupakan bukti adanya partnership yang sangat baik antar stakeholder antara pemerintah eksekutif dengan legislatif dan juga partisipasi dari masyarakat.

Adapun Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Madiun periode 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

Gambar III.4. Tabel Nilai LPPD tahun 2016-2020



Sumber Data : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun

*Data Tahun 2020 karena sampai saat ini data belum dikeluarkan

3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini



seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sedangkan pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

Gambar III.5. Indeks SPBE Pemerintah Kota Madiun

Sumber : Kementerian PAN RB

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang



Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka Nilai indeks SPBE Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 sebesar 2,86 dengan predikat BAIK. Meskipun demikian realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2022 yaitu sebesar 2,85, sehingga capaian kinerjanya 100,35%. Nilai ini turun jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang memperoleh nilai 3,06 (Baik). Sedangkan di Tahun 2019 yang memperoleh nilai 2,82 (baik) dan Tahun 2018 memperoleh nilai 3,16 (Sangat Baik). Untuk penilaian Indeks SPBE Tahun 2020 dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19 diutamakan untuk Daerah atau Kabupaten/Kota yang Indeks SPBE nya masih bernilai rendah, sehingga untuk tahun 2020 ini Pemerintah Kota Madiun tidak dilakukan evaluasi SPBE.

Faktor pendorong :

1. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE
2. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat, yang mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel
3. Tersedianya anggaran yang ada untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan internet Pemerintah Kota Madiun
4. Dukungan kepala daerah dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun
5. Tersedianya layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang saling terintegrasi
6. Tersedianya layanan Publik Berbasis Elektronik dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya
7. Tersedianya infrastruktur dan jaringan TIK yang memadai

Faktor Penghambat :

1. Proses dokumentasi sistem informasi yang belum optimal
2. Belum optimalnya integrasi layanan aplikasi (integrasi masih belum terlihat dilakukan secara menyeluruh)



3. Kompetensi SDM TIK belum mencukupi sesuai kebutuhan
4. Dengan adanya pemerataan akses jaringan internet di wilayah Kota Madiun diperlukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan jaringan internet yang lebih optimal

Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mencapai tingkat kematangan (maturity level) penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses dokumentasi sistem informasi dengan rapi dan terstruktur
2. Meningkatkan integrasi pada layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur TIK
4. Meningkatkan sinergitas seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam penerapan SPBE

Ketersediaan akses internet yang merata tentunya tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi (TIK). Dalam rangka pemerataan akses internet di seluruh wilayah Kota Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun melakukan pemerataan penyediaan akses internet antara lain:

1. Menyediakan akses internet gratis pada Seluruh kantor pelayanan pemerintah Daerah Kota Madiun dan seluruh sekolah Negeri (SD-SMP) di wilayah Kota Madiun
2. Menyediakan akses internet gratis bagi masyarakat, yang ditempatkan pada Poskamling, Ruang terbuka hijau, lapak UMKM, dan fasilitas umum (fasum) di lingkungan RT lainnya.

B. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik :*

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun

Dalam rangka menjaga kepercayaan dari masyarakat, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah



dengan melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari hasil atas Survey Kepuasan Masyarakat akan dibuat suatu penelitian dengan menggunakan analisis statistik atau metode tertentu. Dari hasil penelitian ini diperoleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sehingga dapat diketahui kekurangan dari masing-masing unit tersebut yang kemudian dapat diperoleh saran perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

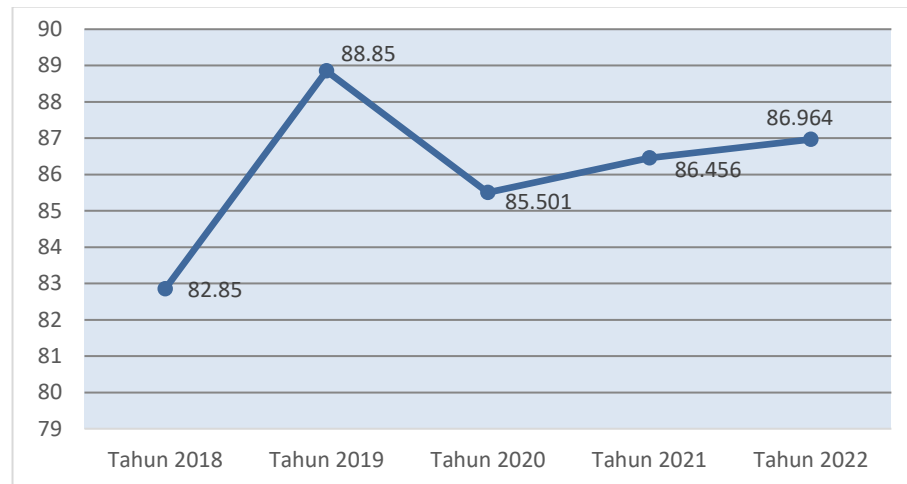
Pada tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor : 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun bahwa terjadi penyesuaian target indikator yang mana pada RPJMD sebesar 83 disesuaikan menjadi 86,50. Hal ini dilakukan karena berdasarkan kebutuhan atas Indeks Kepuasan Masyarakat maka terjadi penambahan lokus untuk pelaksanaan survey sehingga penyesuaian berdasarkan proyeksi dengan memperhitungkan realisasi capaian kinerja Tahun 2021.

Berdasarkan hasil survey pada beberapa perangkat daerah dan unit kerja, diperoleh nilai sebesar 86,964 dengan kategori nilai Baik, hal ini menunjukkan kenaikan nilai dibandingkan dengan nilai tahun 2021 dengan nilai sebesar 86,501 dengan capaian kinerja atas target sebesar 101,54%. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 86,50.



Perkembangan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Gambar III.6. Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kota Madiun (2022)

Trend Indeks Kepuasan Masyarakat mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan di Tahun 2020 terdapat penurunan nilai yang dikarenakan kondisi nasional yaitu adanya pandemi Covid-19 sehingga terdapat perubahan sistem pelayanan dan penyesuaian dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan survey yang dilakukan secara online. Sedangkan pada Tahun 2021 dan 2022 terjadi kenaikan nilai yang dipengaruhi oleh pembiasaan atas pemberlakuan *new normal* dengan adanya pandemi covid-19 sehingga pemberian pelayanan ke Masyarakat bisa dilakukan secara optimal. Namun Pemerintah Kota Madiun melaksanakan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama di bidang pelayanan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Melakukan asistensi dan monitoring terhadap penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun



2. Melakukan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
3. Melaksanakan dan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Madiun, Tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Tingkat Nasional
4. Pemberian penghargaan kepada unit pelayanan publik yang berprestasi
5. Melaksanakan pendampingan dan penyegaran ISO bagi Auditee dan Atuditor dengan menjalin kerjasama dengan BSN (Nota Kesepahaman antar Pemerintah Kota Madiun dengan Badan Standarisasi Nasional Nomor $\frac{80/6/401.011/2019}{02/BSN/MoU/IV/2019}$ tentang Pembinaan dan Pengembangan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian)
6. Menjalinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sehingga hasilnya lebih akurat
7. Menjalinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Evaluasi Pelayanan Publik sehingga hasilnya lebih akurat
8. Melaksanakan Sertifikasi ISO/SNI bagi Unit Pelayanan Publik (tahun 2022 dilaksanakan pada 2 Unit Pelayanan Publik yaitu Sekretariat Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

2. Indeks Inovasi Daerah

Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif atau disebut *Innovative Government Award* merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat yakni Menteri Dalam Negeri untuk menghargai dan mendukung usaha Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam melakukan Inovasi Daerah.

Innovative Government Award (IGA) bertujuan untuk memotivasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota guna meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat. Penilaian tersebut berdasarkan kategorinya terdiri dari :

- Sangat Inovatif;



- Inovatif;
- Kurang Inovatif; serta
- Tidak Dapat Dinilai.

Bapelitbangda khususnya Sub Koordinator Inovasi dan Bangda Bidang Litbang memiliki tanggung jawab dalam pencapaian Indeks Inovasi Daerah/ IID yang dilakukan melalui input data inovasi pada SIM IGA Kemendagri. Dalam RPJMD-P 2019-2023 IID tahun 2022 ditargetkan mencapai angka 2.086, namun dengan adanya perubahan perhitungan indeks sebagaimana ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri, maka target tersebut dikonversikan menjadi 55,6.

Berdasarkan Pedoman Umum pelaksanaan IGA 2022 Kemendagri, IID dinilai berdasarkan laporan inovasi yang di-input dan dilengkapi data dukung pada SIM IGA Kemendagri. Adapun penilaian IID 2022 dihitung dengan melalui tahapan penilaian dengan rumus :

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$$
$$\text{Skor Jumlah Inovasi} = \text{Jumlah Inovasi} \times 0,38$$
$$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^{35} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i) \text{ Inovasi ke } j}{n} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$$
$$\text{Skor Total} = SPD + SID$$

Keterangan:

n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah

i adalah nomor indikator

j adalah nomor inovasi

SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

- Skor Indikator Jumlah Inovasi diperoleh dari Jumlah Inovasi dikalikan bobot sebesar 0,38. Skor Maksimal Indikator Jumlah Inovasi adalah 76. Apabila jumlah inovasi yang diperhitungkan lebih dari 200 inovasi maka akan dinilai sebesar skor maksimal tersebut;
- Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).



Setelah didapatkan nilai Skor Total selanjutnya perhitungan Indeks Inovasi Daerah dirumuskan dengan :

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

Keterangan:

- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
- Skor Total Maksimum adalah 250.
- Skala IID adalah 0 s.d. 100.

Dengan proporsi aspek sebagai berikut :

- Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari:
 - 1) 3 Variabel;
 - 2) 15 Indikator; dan
 - 3) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20% dari 250).
- Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:
 - 1) 5 Variabel;
 - 2) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maksimal senilai 76 atau 30,40%); dan
 - 3) Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80% dari 250).

Sedangkan pengkategorian capaian IID adalah sebagai berikut :

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	60,01 - 100,00
Inovatif	35,00 – 60,00
Kurang Inovatif	0,01 - 34,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara :

- a) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis IGA 2022, dilaksanakan pada Rabu/ 2 Maret 2022 dengan menghadirkan narasumber dari unsur :
 - Pemerintah Kota Madiun : Bp.Walikota Madiun;
 - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) : Adi Suhendra, M.Sosio;



- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)/ Balitbang
Kemendagri : Plh.Kepala BSKDN

Gambar III.7. Apresiasi Capaian IID pada Bimbtek IGA 2022



Kemendagri Apresiasi Wali Kota Madiun atas Capaian Indeks Inovasi Daerah



JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun yang meraih predikat inovatif dalam Indeks Inovasi Daerah 2021. Madiun berhasil menduduki posisi 31 dari 93 kota yang dinilai dalam indeks. "Saya sangat mengapresiasi program-program yang dilaksanakan Pemkot Madiun. Semoga capaian ini dapat ditingkatkan untuk tahun berikutnya," ucap Pelaksana harian (Plh.) Kepala Badan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri, Eko Prasetyanto, dalam diskusi publik bertema *Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Strategi Penguatan Inovasi Daerah*, Rabu, 2 Maret 2022.

Sumber : <https://litbang.kemendagri.go.id/website/kemendagri-apresiasi-wali-kota-madiun-atas-capaian-indeks-inovasi-daerah/>

- b) Desk dan pendampingan, dilaksanakan desk sekaligus pendampingan kepada Perangkat Daerah selama 3 hari di Bulan Agustus 2022.

Gambar III.8. Undangan desk dan pendampingan



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan D.I. Pangeran Negeri (7 Madiun 52137)
Telpun /Faks (0211) 471535
Website : www.kemendagri.go.id

Madiun, 08 Agustus 2022

Kepada

Nomor : 005/Reg./401.204/2022
Sifat : Perintah
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Undangan IGA 2022

Yth. Sdr.
di
MADIUN

Menyebutkan Rancangan Kerentanan Dalam Negeri tanggal 6 Juli 2022 Nomor : 030/2860/2022 perihal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022, sebagaimana pengisian/ pelaporan inovasi daerah dilakukan melalui <https://index.inovasi.kemendagri.go.id> dan pengisian tersebut dilakukan melalui laporan inovasi beserta data dukungnya maksimal 3 September 2022.

Mengingat keterbatasan waktu penginput-an data laporan inovasi dan dalam rangka optimalisasi tingkat kerentanan laporan inovasi pada IGA 2022 yang didukung oleh input data laporan beserta data dukung indikatornya, mengingat dengan format bantuan Sudeira untuk menapakan inovator atau staf yang mendampingi di lingkungan Perangkat Daerah Sudeira (data inovasi terlampir) guna dilakukan desk dan pendampingan besok pada:

hari/ Tanggal : Selasa, Kamis dan Jumat/ 06, 08 dan 09 Agustus 2022
Waktu : 08.30 s/d selesai (seluruh terlampir)
Tempat : R.Rapat Kecil Bapetbangda Kota Madiun
Gd.Graha Krida Paga L2.2,
Jl.Playerni/Perpustakaan No.17 Kota Madiun
Catatan : diharapkan membawa laptop dan dokumen/ data dukung indikator

Demikian untuk dijadikan perhatian dan atas kerjasamanya terimakasih.

PELAKSANA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



c) Input data dan pelaporan inovasi

Gambar III.9. Proses input data dan pelaporan IGA 2022



Pada SIM IGA Kemendagri dilakukan input data baik data profil pemerintah Daerah (SPD) maupun Inovasi Daerah (SID) dengan hasil sebagaimana berikut :

Tabel III.15. Rekap Hasil Laporan IGA 2022

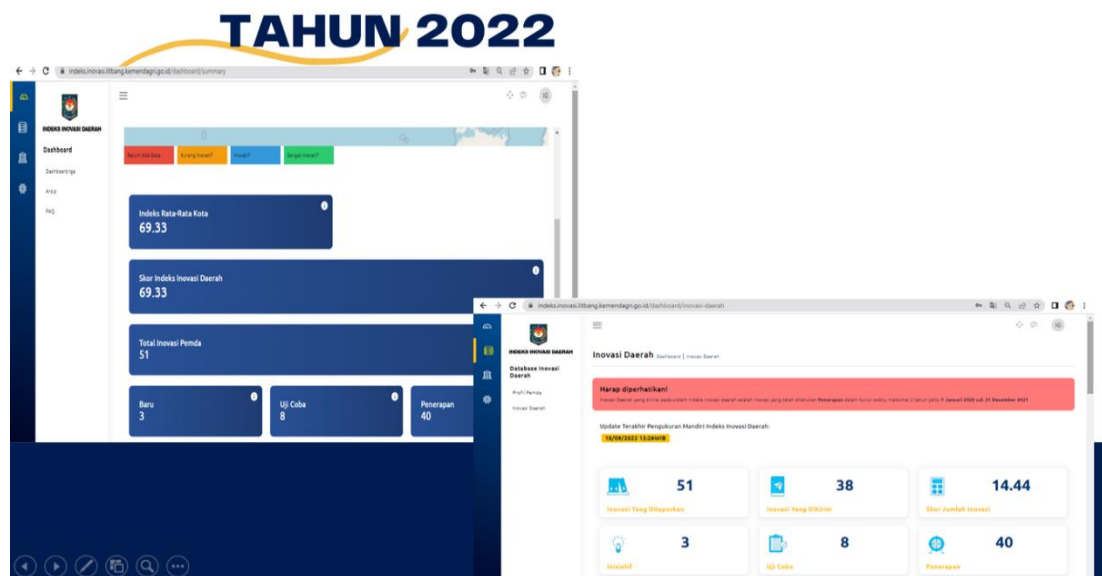
Uraian	Jumlah
<i>jumlah inovasi yang dilaporkan</i>	38
<i>jumlah video</i>	52

<i>rata2 kematangan</i>	106,39
<i>perangkat daerah yang melaporkan</i>	17
<i>Bentuk Inovasi</i>	
- tata kelola pemerintahan	4
- layanan publik	32
- inovasi lainnya	10
total inovasi	51

Sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

Data diolah berdasarkan data yang termuat dalam <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> capaian IGA 2022 Pemerintah Kota Madiun adalah sebagaimana grafis berikut :

Gambar III.10. Capaian IGA 2022 Kota Madiun



sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

Capaian pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersaji sebagaimana berikut :

Gambar III.11. Perbandingan capaian IGA Kota Madiun Tahun 2020 – 2022



Laporan Inovasi

Tahun 2020 - Tahun 2022

PELAPORAN INOVASI	2020	2021	2022
INOVASI YANG DILAPORKAN	30	24	38
JUMLAH VIDEO	21	24	52
RATA-RATA KEMATANGAN	63	112	106,39
PERANGKAT DAERAH YANG MELAPORKAN	13	12	17
TOTAL INOVASI	43	48	51



Bentuk Inovasi

Tahun 2020 - Tahun 2022

BENTUK INOVASI	2020	2021	2022
TATA KELOLA PEMERINTAHAN	3	1	5
INOVASI YANBLIK	36	32	36
INOVASI LAINNYA	4	15	10



sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> (data diolah)

Namun demikian untuk capaian 2022 tersebut masih menunggu informasi resmi dari Kemendagri melalui Kepemendagri tentang IGA 2022.

Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)

Dalam pembangunan dan perkembangan perkotaan, akan ada perubahan dari waktu ke waktu. Akibatnya muncul isu perkotaan baik yang positif maupun yang negatif. Dampak positif yang muncul akan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sedangkan dampak negatif akan menimbulkan permasalahan pada suatu kota. Masalah yang muncul cukup beragam seperti kemacetan, polusi lingkungan, tata kota yang tidak beraturan, maupun masalah sosial dan ekonomi. Banyaknya isu permasalahan akan menyebabkan daya hidup suatu kota berubah.



Perubahan yang terjadi cenderung berakibat pada daya hidup kota yang menurun. Tidak terkecuali pada kota-kota di Indonesia juga Kota Madiun. Kota Madiun memiliki sejarah perencanaan wilayah yang baik dan memiliki letak yang strategis. Kondisi ini menjadi alasan penelitian tentang konsep *livable city* terhadap karakteristik ruang Kota Madiun, yang bertujuan untuk mengidentifikasi variabel, indikator, dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya Kota Madiun yang *livable*.

Untuk menghasilkan kota yang layak huni, maka karakteristik ruang perkotaan yang berlaku harus memiliki standar daya hidup yang baik, dinamis, saling berpengaruh, berintegrasi dan ramah bagi lingkungan serta penghuninya. Konsep *livable city* bertujuan untuk menciptakan kondisi kota yang seimbang dalam interaksi antara manusia dan lingkungannya. Berdasarkan hasil analisis melalui penentuan kriteria dan tolok ukur tingkat *livability* di Kota Madiun, ditemukan bahwa kawasan Kota Madiun masih memiliki tingkat daya hidup yang baik, tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi. Kondisi ini masih dikategorikan *livable* dikarenakan perencanaan awal kawasan yang baik sehingga daya hidup Kota Madiun masih dapat dipertahankan dan diharapkan berkelanjutan.

Kota yang *livable* membutuhkan indikator-indikator yang dapat menjadi suatu ukuran dalam mencapai kota yang layak huni. Indikator diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu indikator umum dan khusus. Indikator yang bersifat umum karena juga diterapkan di kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia. Sementara itu, indikator tambahan lebih bersifat khusus pada Kota Madiun mengacu pada karakteristik kota.

Prinsip-prinsip dasar *livable city* :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik),
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah),
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi,



4. Keamanan, Bebas dari rasa takut,
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya, 6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

Indikator Umum

- I. Sarana Prasarana
 1. Ketersediaan Angkutan/ Transportasi
 2. Kualitas Angkutan/ Transportasi
 3. Kondisi Jalan
 4. Pedestrian
 5. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
 6. Kualitas Fasilitas Kesehatan
 7. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan
 8. Kualitas Fasilitas Pendidikan
 9. Listrik
 10. Ketersediaan Air Bersih
 11. Kualitas Air Bersih
 12. Telekomunikasi
- II. Ekonomi
 1. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan
 2. Biaya Hidup
- III. Penataan Kota dan Pengelolaan Lingkungan
 1. Tata Kota
 2. RTH
 3. Kebersihan
 4. Persampahan
 5. Pencemaran/ Polusi Udara dan Air
- IV. Kehidupan Sosial
 1. Kriminalitas
 2. Ketersediaan Fasilitas Rekreasi
 3. Kualitas Fasilitas Rekreasi
 4. Akses Informasi Pelayanan Publik
 5. Keamanan



Indikator Khusus

- I. Sarana Prasarana
 1. Kantong Parkir
 2. Permukiman/ hunian/ tempat tinggal (kondisi sanitasi, indikator kumuh, drainase, penerangan, ciri khas)
 3. Ketersediaan Fasilitas Difabel dan Lansia
 4. Desain fasilitas umum yang ramah anak, lansia, dan difabel
 5. Jaringan Internet (WIFI)
 - II. Ekonomi
 1. Iklim usaha/investasi dalam perekonomian skala kecil dan menengah
 - III. Kehidupan Sosial
 1. Interaksi Sosial bera toleransi/ kerukunan antar penduduk/agama
 2. Ketersediaan *Public Space*/ Fasilitas Aktivitas Sosial
 3. Kualitas *Public Space*/ Fasilitas Aktivitas Sosial
 4. Komponen Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan (keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan dan lansia)
 5. Event-event yang melibatkan dan menggerakkan masyarakat untuk aktif
 - IV. Pengembangan warisan budaya sebagai pemicu dalam pengembangan variasi rekreasi, fasilitas sosial, tempat kuliner khas, dan museum
 - V. Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai daya dukung lingkungan
 - VI. Kondisi Politik
 - VII. Smart City
 - VIII. Kualitas Hidup Penduduk
- Indeks Kenyamanan Kota (*Livable City*) adalah indikator untuk mengukur seberapa nyaman Kota Madiun dilihat dari:
1. Infrastruktur pendukung meliputi: akses jalan, akses air minum dan akses sanitasi perumahan
 2. Sarana prasarana permukiman meliputi: rumah layak huni, rumah tinggal bersanitasi, cakupan lingkungan yang sehat yang didukung dengan PSU, ruang terbuka hijau, penerangan jalan dan fasilitas permakaman

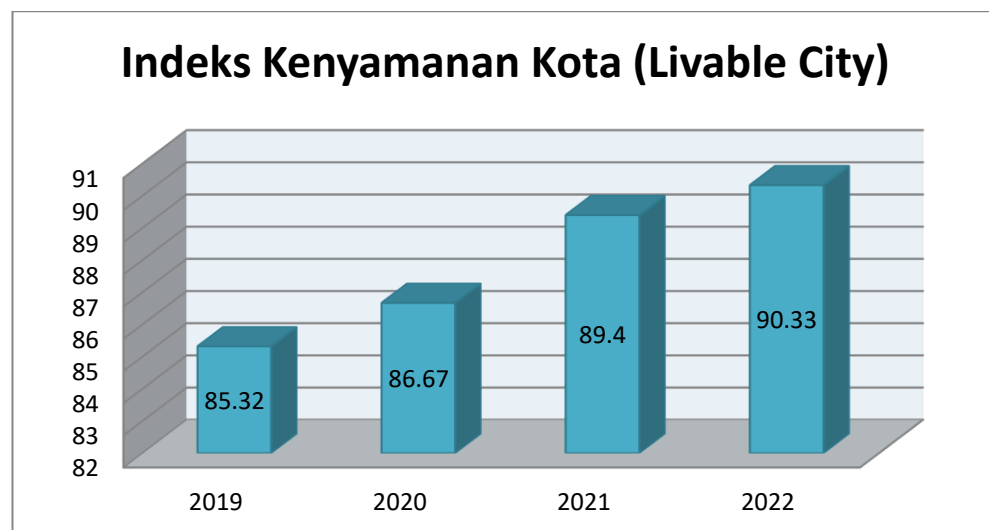


3. Keamanan meliputi: persepsi keamanan dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinnekaan dan keamanan dari kekerasan.

Dari perhitungan indeks kenyamanan kota diperoleh dari masing-masing indikator pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Indeks infrastruktur diperoleh nilai 96,72 (98,27)
2. Indeks sarana dan prasarana permukiman diperoleh nilai (90,54)
3. Indeks rasa aman diperoleh nilai (82,18)

**Gambar III.12. Trend Kenaikan Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)
Tahun 2019-2022**



Sumber : Bapelitbangda

Realisasi kinerja Indeks Livable City Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2022 sebesar 90,33 dengan target 88,19. Sehingga capaian kinerjanya mencapai 102,43%. Sedangkan di tahun 2021 realisasinya sebesar 89,4 dengan capaian kinerja 101,85%. Hal ini menunjukkan peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun.

Tujuan "Terwujudnya pembangunan infrastruktur kota yang maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan" didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator dengan capaian sebagai berikut :



Tabel. III.16. Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 2 Tahun 2022

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
2.1.1	Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Kota	Indeks Infrastruktur	98,25	98,26	100,01
2.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	57,77	58,13	100,62

Sumber Data : Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

A. Sasaran 1 Meningkatkan kualitas layanan Infrastruktur Kota :

Kota yang baik adalah kota yang mempunyai infrastruktur yang memadai dari segi jalan, akses air minum, sanitasi layak, ketersediaan listrik dan kualitas akses internet dan telepon. Perhitungan Indeks infrastruktur dapat memberikan gambaran sejauh mana infrastruktur di suatu daerah dapat dikatakan baik, indeks infrastruktur dibentuk dari berbagai indikator yang diantaranya indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak (limbah domestik dan sampah), persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah

Salah satu aset paling penting dalam pembangunan daerah adalah infrastruktur. Secara umum kondisi infrastruktur di Kota Madiun cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh capaian indeks infrastruktur Kota Madiun yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Di tahun 2019 realisasi Indeks Infrastruktur sebesar 96,72, tahun 2020 96,85, tahun 2021 97,99 dan di tahun 2022 naik 0,27 point dibandingkan dengan tahun 2021. Di tahun 2022 realisasinya adalah 98,26 dengan capaian kinerja sebesar 100,01%. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2022 yaitu 98,25 dengan realisasi kinerja sebesar 98,26.



Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong yang mempengaruhi

- 1) Adanya keinginan masyarakat Kota Madiun agar sarana dan prasana perkotaan representatif
- 2) Adanya aplikasi yang memudahkan pengaduan masyarakat sehingga segera dapat ditangani
- 3) Adanya pembangunan berkelanjutan sehingga pembangunan merata dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat;
- 4) Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pelaksanaan konstruksi selesai tepat waktu sesuai kontrak yang berlaku;
- 5) Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan jasa konstruksi yang tepat, berkualitas dan kompeten sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan;
- 6) Adanya anggaran yang mencukupi sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan.
- 7) Peningkatan pengawasan terhadap perusahaan yang berpotensi sebagai penghasil limbah domestik
- 8) Meningkatnya peran masyarakat pengurangan sampah dalam bentuk Bank Sampah dan Zero Waste

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain :

- 1) Kurangnya tenaga teknis yang berkompeten di bidang infrastruktur
- 2) Kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia penyedia dalam proses penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak
- 3) Kesadaran pengusaha dalam pengolahan limbah domestik yang dihasilkan
- 4) Belum adanya IPLT (Ijin Pengolahan Limbah Tinja)

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan/mempertahankan Indeks Infrastruktur :

- 1) Melaksanakan seleksi terhadap mitra DPUPR/ stageholder pelaku jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia telah dipersyaratkan tenaga teknis yang memiliki kualifikasi tertentu, sehingga tenaga yang



- berada di lapangan harus sesuai dengan dokumen pemilihan dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sarana dan prasarana yang akan dibangun dan yang telah terbangun untuk melakukan pemeliharaan secara berkala;
 - 3) Merencanakan pembangunan dan mengalokasikan anggaran sesuai prioritas.
 - 4) Perlu dilakukan peningkatan dari sisi kuantitas dan kualitas kapasitas lingkungan hidup diseluruh wilayah Kota Madiun. Sehingga dapat meminimalisir dampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup (perubahan iklim mikro, menyusutnya daerah serapan air, berkurangnya sumber mata air, menurunnya kualitas air sebagai akibatintensitas yang tinggi dalam peningkatan pembangunan infrastruktur Terwujudnya infrastruktur kota juga harus memperhatikan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

B. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup yang didasarkan pada data Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas udara, Indeks Kualitas Tutupan lahan. Adapun pembobotan untuk setiap indikator terdiri dari 30 % untuk pencemaran air, 30 % untuk pencemaran udara, dan 40 % untuk tutupan hutan lahan yang diinput dalam aplikasi <https://ppkl.menlhk.go.id/>.



Berdasarkan pengukuran IKLH Kota Madiun menunjukkan perbaikan dengan terus meningkatnya nilai indeks setiap tahun hingga pada tahun 2022 sebesar 58,13. Indeks Lingkungan Hidup terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Capaian IKA Tahun 2022 yaitu 50,00, IKU Tahun 2022 yaitu 84,17 sedangkan IKL Tahun 2022 yaitu 23,94.

Adapun kriteria dalam penilaian IKLH adalah sebagai berikut :

SKOR	KRITERIA
$90 \leq x \leq 90$	SANGAT BAIK
$70 \leq x < 90$	BAIK
$50 \leq x < 70$	SEDANG
$25 \leq x < 50$	KURANG
$0 \leq x < 25$	SANGAT KURANG

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Berikut adalah data realisasi IKLH dalam 4 tahun terakhir

realisasi 2019	realisasi 2020	realisasi 2021	realisasi 2022
63,87	65,42	58,99	58,13

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Madiun Tahun 2021 yaitu 58,99 sedangkan nilai IKLH Kota Madiun di Tahun 2022 adalah 58,13, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan karena terdapat penurunan target IKLH sesuai RPJMN 2020 – 2024 akan tetapi jika angka tersebut melebihi target RPJMD Kota Madiun 2019-2024 yaitu 57,93. Angka indeks ini menyimpulkan bahwa status lingkungan hidup Kota Madiun pada Tahun 2022 berada dalam posisi "sedang". Diharapkan setiap tahun



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selalu mengalami peningkatan karena sebagai tolok ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun.

Faktor pendorong tercapainya IKLH Kota Madiun yaitu :

1. Adanya kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas air dan udara
2. Penambahan RTH yang tertutup penghijauan sebagai penunjang peningkatan indeks kualitas lahan

Faktor penghambatnya yaitu :

1. Nilai IKA sangat sulit untuk di prediksi dikarenakan sumber pencemar pada badan air yang berasal dari luar Kota Madiun sangat berpeluang memberi kontribusi penurunan kualitas air. Proses rekap existing air dari hulu sungai yang masuk Kota Madiun sangat berpengaruh untuk mengetahui kondisi dari inlet ke Kota.
2. Penambahan jumlah kendaraan bermotor yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara
3. Perubahan Aturan tentang Deliniasi Tutupan Lahan, dalam satu RTH hanya lokasi yang memiliki tajuk vegetasi yang boleh di petakan, sehingga mempengaruhi luasan RTH.
4. Kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup masih kurang

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di Kota Madiun yaitu :

- a. Optimalisasi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Optimalisasi penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup
- c. Optimalisasi penambahan RTH dan Penghijauan Kota oleh OPD terkait
- d. Optimalisasi penanaman pohon lindung tepi jalan oleh OPD terkait.
- e. Optimalisasi pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dan tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup dengan wajib lapor ijin PPLH (Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup)



f. Optimalisasi pembinaan kapasitas lingkungan hidup ke masyarakat

2. Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun didukung oleh 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran

Pada Misi 3 Tujuan 1 terdapat 2 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel III.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2021 (n-1)	2022 (n)
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	82,35	81,25	82,01
	Indeks Pembangunan Gender	94,51	94,38	94,57

Sumber : BPS Kota Madiun

Tabel III.18. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD



Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD (%)
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	82,35	82,01	99,58
	Indeks Pembangunan Gender	94,51	94,57	100,06

Sumber : BPS Kota Madiun

Tabel III.19. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Provinsi 2022	Realisasi Nasional 2022
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	82,01	72,75	N/A
	Indeks Pembangunan Gender	94,57	91,67	N/A

Sumber : BPS Kota Madiun

1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.



IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Tabel III.20. IPM Kota Madiun Menurut Komponen

TAHUN	AHH	AHLS	ARLS	PENGELUARAN PER KAPITA
2018	72,59	14,21	11,11	15.616
2019	72,75	14,39	11,13	16.040
2020	72,81	14,40	11,14	16.018
2021	72,83	14,41	11,37	16.095
2022	73,13	14,43	11,67	16.503

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun 2022

Selama 2018 hingga 2022, IPM Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Hanya saja, peningkatan IPM terkecil terjadi di tahun 2020 disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran/kapita/tahun yang disesuaikan. Setelah intensitas Pandemi COVID-19 berangsur menurun, geliat ekonomi memulih yang berpengaruh terhadap besarnya kenaikan IPM Tahun 2021 dan 2022.



Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2018 hingga 2022, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,59 tahun (2018) menjadi 73,13 tahun (2022). Dengan demikian, bayi yang lahir tahun 2022 di Kota Madiun diperkirakan mampu bertahan hidup hingga usia 73,13 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun.

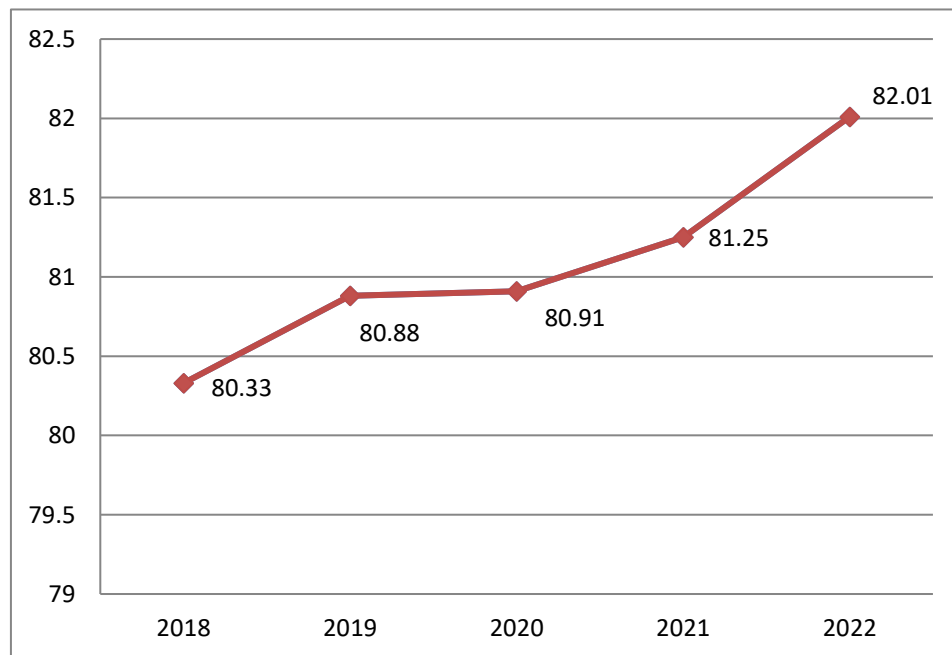
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2018 hingga 2022, HLS Kota Madiun meningkat dari 14,21 tahun (2018) menjadi 14,43 tahun (2022) atau naik sebesar 0,22 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,11 tahun (2018) menjadi 11,67 tahun (2022) atau naik 0,56 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kota Madiun usia 25+ setara dengan tingkat pendidikan SMA kelas XI. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,43 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2. Pertumbuhan yang positif, baik RLS maupun HLS, menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.



Selanjutnya dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita masyarakat Kota Madiun yang disesuaikan mencapai Rp 16,503 juta per tahun, naik sekitar 2,53 persen dibanding tahun 2021 lalu yang tercatat Rp. 16.095.000,00.

Pemulihan ekonomi sosial di tengah Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kota Madiun. Hal ini terlihat dari peningkatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 dibanding tahun- tahun sebelumnya. IPM Kota Madiun tahun 2022 sebesar 82,01 atau tumbuh 0,93 persen (meningkat 0,76 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

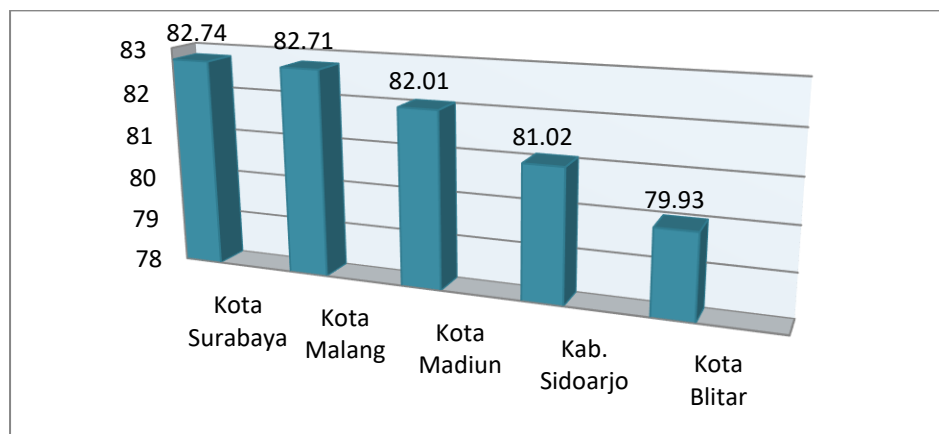
Gambar III.17. Perkembangan IPM Kota Madiun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun 2022

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Madiun pada tahun 2022 Kota Madiun menduduki peringkat ketiga dari 38 (Tiga Puluh Delapan) Kabupaten/Kota Se Jawa Timur dengan angka 82,01. Ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi ini ditunjukkan dari predikat IPM Kota Madiun pada Tahun 2022 masih bertahan menjadi IPM berkategori "sangat tinggi". Walaupun demikian, Pemerintah Kota Madiun tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya.

**Gambar III.18. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022
5 (lima) besar Kab/Kota se Jawa Timur**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2022

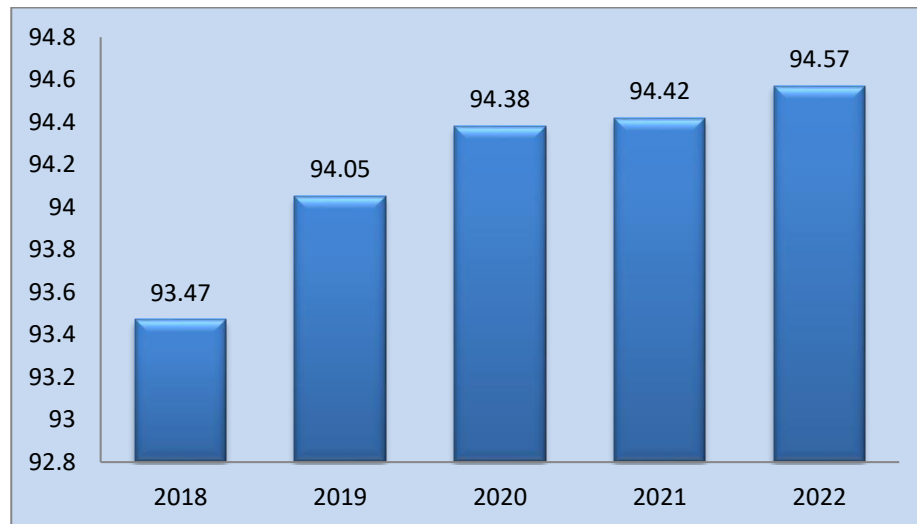
2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki. Semakin kecil jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG), karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.



Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun dari Tahun ke Tahun adalah sebagai berikut :

Gambar III.19. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kota Madiun 2021*

Angka 2022 belum rilis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir IPG Kota Madiun mengalami tren kenaikan walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2018. Indeks terendah ada pada tahun 2018 sebesar 93,47 dan yang tertinggi ada pada tahun 2022 sebesar 94,57. Dengan terus meningkatnya IPG Kota Madiun, menandakan Kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah :

1. Mengoptimalkan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
2. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
3. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA



Tujuan “Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing” didukung oleh 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator dengan capaian sebagai berikut :

Tabel. III.21. Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 3 Tahun 2022

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
3.1.1	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,41	14,43	100,13
		Rata-rata Lama Sekolah	11,39	11,67	104,66
3.1.2	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,83	73,13	100,41
3.1.3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,18	76,75*	99,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

*Angka 2021 dikarenakan angka 2022 belum rilis

A. Sasaran 1 Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat :

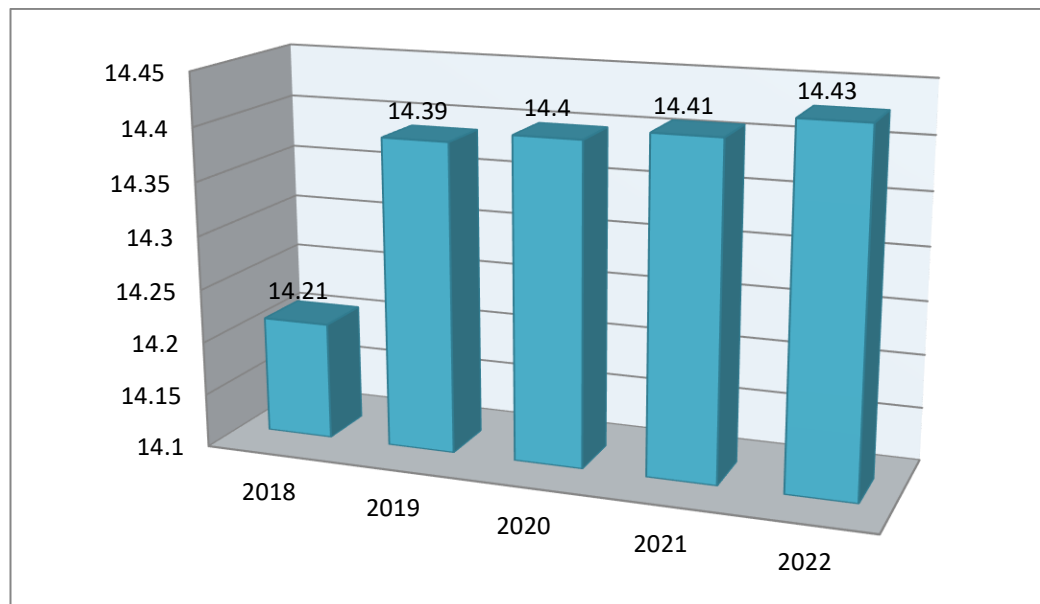
1. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2018 hingga 2022, HLS Kota Madiun meningkat dari 14,21 tahun (2018) menjadi 14,43 tahun (2022) atau naik sebesar 0,22 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator Harapan Lama Sekolah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 14,41 atau 100,13%. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,43 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2. Pertumbuhan yang positif tersebut



menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.

**Gambar III.22. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Madiun
Tahun 2018-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun 2022

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu:

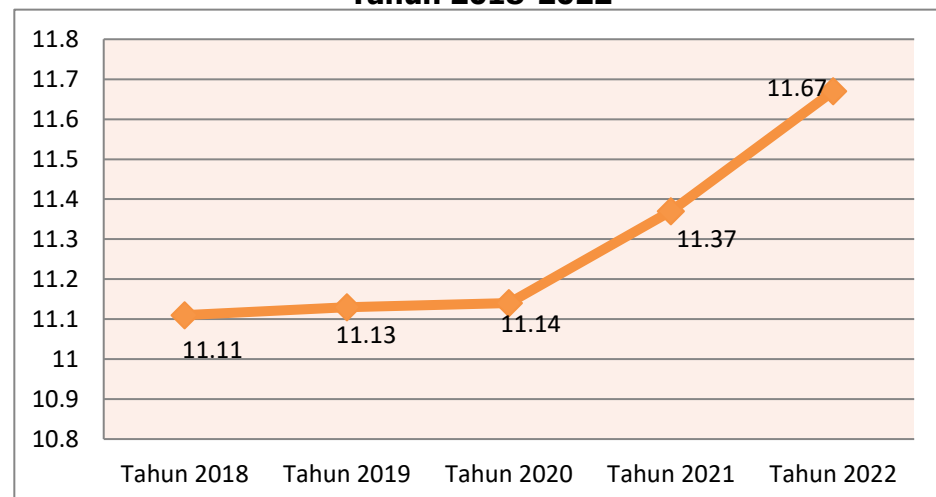
1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelatihan profesi guru (PPG)
2. Akan dibentuk tim untuk pendataan untuk anak tidak sekolah
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan gedung bangunan sekolah, pemberian bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP, laptop gratis siswa SD dan SMP serta sarana dan prasarana belajar mengajar
4. Meningkatkan kualitas pendidikan



2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Indikator sasaran rata-rata lama sekolah di Tahun 2022 terjadi penyesuaian target sebagaimana tertuang dalam pada Peraturan Walikota Madiun Nomor : 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 yang mana pada RPJMD-P target rata-rata lama sekolah sebesar 11,15 dan pada RKPD Perubahan telah disesuaikan menjadi sebesar 11,39. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangan proyeksi rata-rata lama sekolah dengan memperhatikan realisasi rata-rata lama sekolah pada tahun 2021.

Gambar III.23. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun Tahun 2022

Dari grafik tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 Realisasi kinerja Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 sebesar 11,11, kemudian meningkat di tahun 2019 yaitu 11,13, naik lagi di tahun 2020 11,14. Pada tahun 2021 realisasi indikator ini sebesar 11,37 atau naik 0,23 point jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 11,14. Pada tahun 2022 realisasi indikator ini sebesar 11,67 atau naik 0,30 point jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 11,37, sehingga capaian kinerjanya adalah 104,66% dari target yang telah ditetapkan 11,39.



Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan dimensi pengetahuan pada IPM adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan melalui penyediaan gedung sekolah yang representatif, bantuan laptop gratis, serta sarana dan prasarana belajar mengajar
2. Meningkatkan kualitas pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas PAUD dan Pendidikan Dasar dengan pengembangan kurikulum dan melakukan pengelolaan pendidikan
4. Meningkatkan pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan calon guru yang mengikuti seleksi Pendidikan Profesi guru

B. Sasaran 2 "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat":

Angka Harapan Hidup

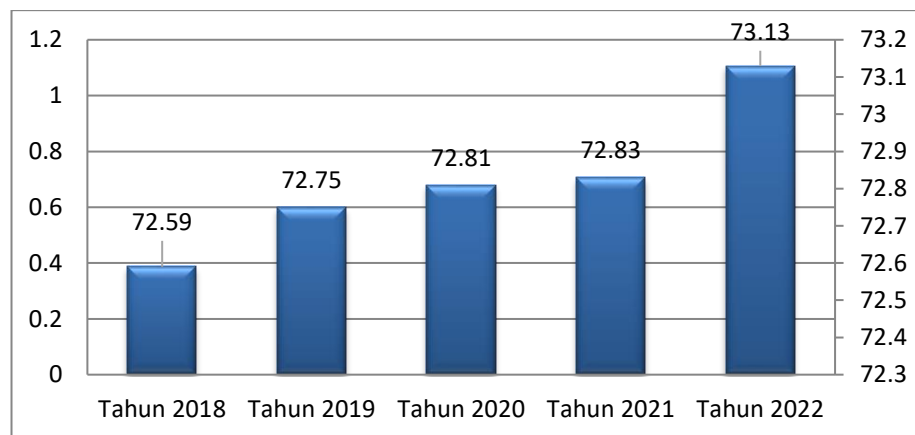
Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah, maka menunjukkan semakin panjang pula tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang lahir di daerah itu pada kurun waktu tersebut. Angka Harapan Hidup (AHH) juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka harapan hidup warga Kota Madiun selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahun, dan hal tersebut akan selalu di dukung oleh perangkat daerah terkait dalam meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan sudah cukup baik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode Tahun 2018 hingga 2022, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia



harapan hidup saat lahir dari 72,59 tahun (2018) menjadi 73,13 tahun (2022) atau naik sebesar 0,54 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun.

Gambar III.24. Trend Angka Harapan Hidup Kota Madiun 2018-2022



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun Tahun 2022

Dari grafik tersebut dapat dilihat adanya tren kenaikan dari AHH di Kota Madiun, dari Tahun 2018 ke Tahun 2022, hal tersebut disebabkan karena dukungan faktor kesehatan berupa:

- Pemantauan status kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.
- Adanya skrining faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok usia produktif dan lansia, dimana adanya transisi epidemiologi dimana penyakit tidak menular trennya meningkat daripada penyakit menular sehingga dengan diadakannya skrining faktor resiko PTM akan berdampak ditemukan sedini mungkin.
- Peningkatan penemuan kasus pada penyakit menular untuk pengendalian penularan dan penurunan mortalitas akibat penyakit tidak menular



- d. Cakupan vaksinasi covid-19 di Kota Madiun yang tinggi pada tahun 2022 menyebabkan penyebaran covid-19 di Kota Madiun terkendali sehingga kematian akibat covid-19 juga mengalami penurunan

Faktor penghambat peningkatan AHH di Kota Madiun pada tahun 2022 antara lain:

1. Masih ada kematian ibu sebanyak 1 orang ibu, sehingga Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Madiun tahun 2022 sebesar 42,42 per 100.000 kelahiran hidup
2. Terdapat 10 kematian bayi dengan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 4,24 per 1.000 kelahiran hidup
3. Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di masyarakat masih belum berjalan optimal sehingga kasus DBD juga meningkat

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan AHH pada tahun 2023 yaitu:

1. Menurunkan Angka Kematian Ibu dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan ibu bersalin
2. Menurunkan kematian bayi dan balita dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk bayi dan balita
3. Menurunkan kematian karena penyakit menular dan tidak menular dengan meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular. Salah satunya dengan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PSN untuk mencegah penularan penyakit DBD dan meningkatkan skrining faktor risiko PTM pada usia produktif dan lansia.
4. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat



C. Sasaran 3 "Meningkatnya Pemberdayaan Gender"

Indeks Pemberdayaan Gender

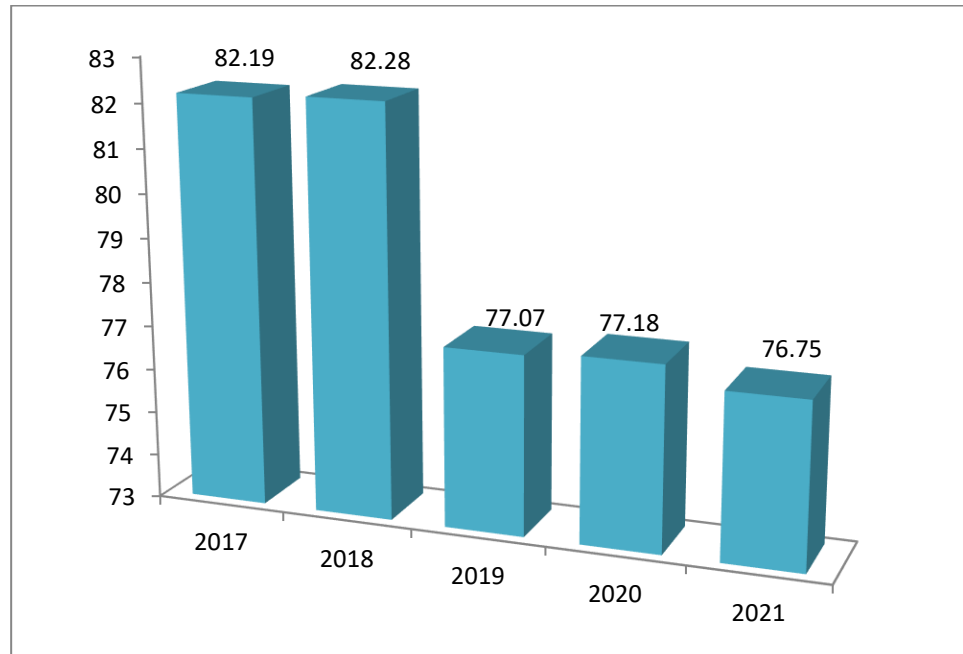
IDG atau Indeks Pemberdayaan Gender, menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.

IDG di Kota Madiun pada Tahun 2018 sebesar 82,28, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun 2018 menjadi 77,07 pada Tahun 2019. IDG Kota Madiun pada Tahun 2019 yang menurun tersebut dipengaruhi oleh persentase keterwakilan anggota perempuan di DPRD Kota Madiun yang kurang dari 30% dari total jumlah anggota DPRD Kota Madiun. Pada Tahun 2020, IDG mengalami kenaikan menjadi 77,18 yang menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Tahun 2021 terjadi penurunan kembali menjadi 76,75, hal ini dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid 19 dimana peranan perempuan dalam pengambilan keputusan sangat dimungkinkan berkurang, selain itu juga kondisi perekonomian secara keseluruhan juga menurun sehingga Distribusi Pendapatan antara laki-laki dan perempuan terjadi ketimpangan. IDG Tahun 2022 belum ada rilis resmi dari Badan Pusat Statistik baik dari Badan Pusat Statistik Pusat maupun Daerah.

Indeks Pemberdayaan Gender Kota Madiun dari Tahun ke Tahun adalah sebagai berikut :



Gambar III.25. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017-2020



Sumber : BPS Kota Madiun 2021* (Angka 2022 belum rilis)

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan capaian kinerja IDG Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi :

- a. Lebih mengintensifkan sosialisasi secara berkelanjutan kepada perempuan agar lebih berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik
- b. Dilakukannya pelatihan kepada perempuan agar lebih mandiri sehingga dapat membantu perekonomian keluarga sehingga terjadi keseimbangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki
- c. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan melalui sosialisasi maupun pembinaan



- d. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
- e. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender melalui sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat maupun dunia usaha

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan pemahaman tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui sosialisasi maupun pembinaan
- b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan;
- c. Peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk :

- a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
- b. Pelaksanaan *review* dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berspektif gender;
- c. Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penanganan tindak kekerasan
- d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG;
- e. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
- f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah;
- g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.

4. Misi Keempat : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun



Pada Misi 4 Tujuan 1 terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :@

Tabel III.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2021 (n-1)	2022 (n)
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,44	6,87	6,87*

Tabel III.23. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD (%)
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,44	6,87*	106,68%*

Tabel III.24. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Provinsi 2022	Realisasi Nasional 2022
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,87*	6,00*	6,31*

Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun, Bappelitbangda Provinsi Jawa Timur

**Angka 2021 dikarenakan angka 2022 belum rilis



1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.

Pilar tersebut yaitu :

1) PILAR 1 : Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, dan pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif.

a. Sub-Pilar 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Dengan indikator :

- Pertumbuhan PDRB rill per kapita
- Share manufaktur terhadap PDRB
- Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal

b. Sub-Pilar 1.2 : Kesempatan Kerja

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat.

Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi. Dengan indikator :

- Tingkat kesempatan kerja
- Persentase Penduduk Bekerja Penuh



- Persentase tenaga kerja dengan tingkat Pendidikan menengah ke atas

c. Sub-Pilar 1.3 : Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator :

- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN
- Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam
- Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang

2) PILAR 2 : Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.

a. Sub-Pilar 2.1 : Ketimpangan

Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.

Dengan indikator :

- Rasio Pendapatan Gini
- Sumbangan Pendapatan Perempuan
- Rasio Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga Desa dan Kota

b. Sub-Pilar 2.2 : Kemiskinan



Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan. Dengan indicator :

- Persentase penduduk miskin
- Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari

3) PILAR 3 : Perluasan Akses dan Kesempatan

Memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas.

a. Sub-Pilar 3.1 : Kapabilitas Manusia

Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Dengan indicator :

- Angka Harapan Lama Sekolah
- Persentase Balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
- Persentase penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan

b. Sub-Pilar 3.2 : Infrastruktur Dasar

Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan.

Dengan Indikator :



- Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak
- Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri

c. Sub-Pilar 3.3 : Keuangan Inklusif

Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Dengan Indikator :

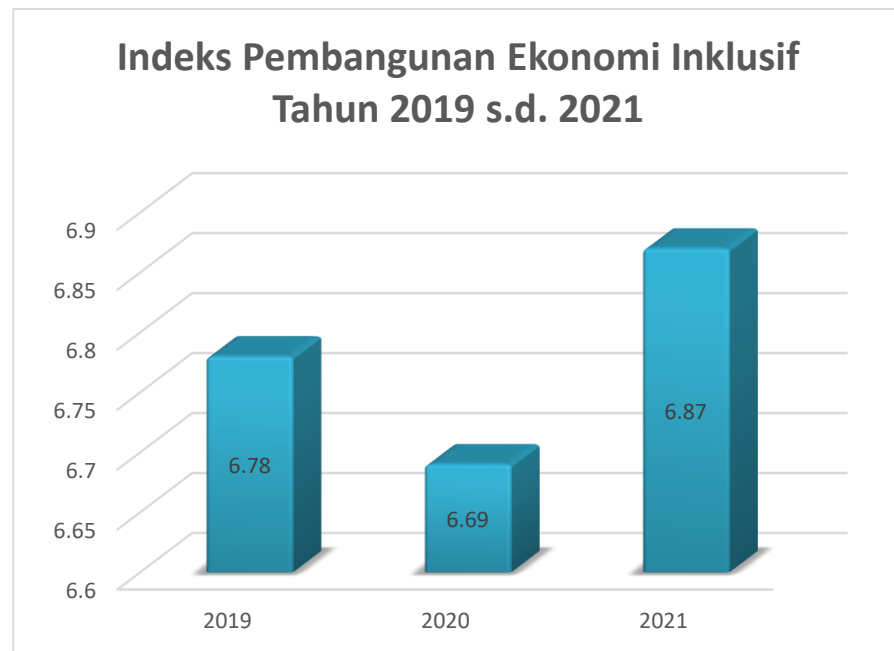
- Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif
- Rasio kredit perbankan UMKM

Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan indikator baru di RPJMD Kota Madiun yang baru ditargetkan di tahun 2022 sebesar 6,40, realisasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada Tahun 2022 belum rilis dari Bappenas sehingga angka IPEI Kota Madiun belum bisa diukur mengalami kenaikan atau penurunan. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kota Madiun tahun 2021 sebesar 6,87 yang tergolong kategori memuaskan. Untuk tahun 2021 Kota Madiun mendapat nilai untuk tiga pilar yaitu:

1. Pilar 1 pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah mendapat nilai poin 6,16 (tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kota Kediri)
2. Pilar 2 pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di daerah mendapatkan nilai poin 6,79 (tertinggi ketiga setelah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Mojokerto)
3. Pilar 3 perluasan akses dan kesempatan di daerah (tertinggi kedua setelah Kota Blitar)



Gambar III.26



Tujuan “Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif” didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator dengan capaian sebagai berikut :

Tabel III. 25. Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 4 Tahun 2022

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
4.1.1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka@	Tingkat Pengangguran terbuka	5,74	6,39	89,8
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	2,44	10,16*	416,39*
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor Jasa	0,76	11,32*	1489,47

Sumber Data : Badan Pusat Statistik



A. Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran terbuka

Pengangguran Terbuka atau sering juga disebut pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan penganggur. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.

Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran.

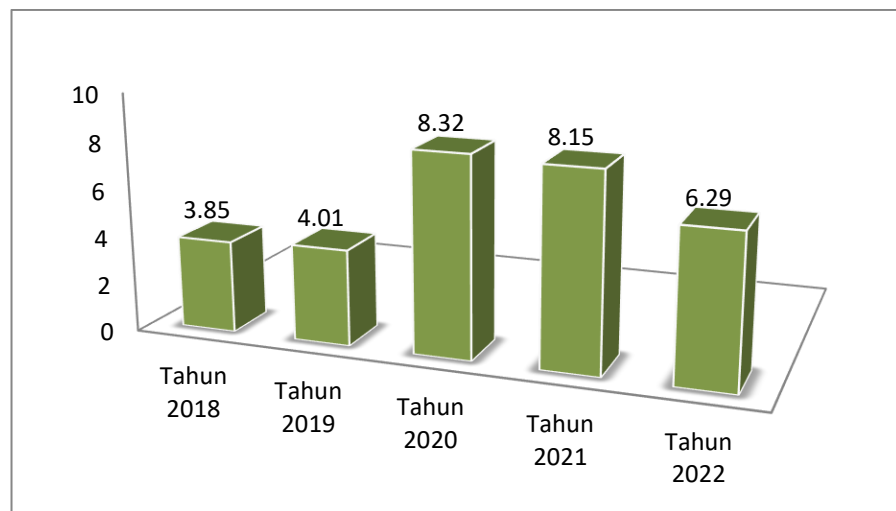
Target Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 dalam Perubahan RPJMD Kota Madiun tahun 2019 – 2024 sebesar 5,74%. Berdasarkan hasil Sakernas oleh Badan Pusat Statistik Kota Madiun menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2022 sebesar 6,39%, dengan demikian Angka TPT tahun 2022 belum memenuhi target TPT tahun 2022, dengan capaian kinerja sebesar 89,8%.



Dengan demikian masih terdapat kelebihan sebesar 0,65% dari target. Sebuah angka yang terbilang kecil namun masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kota Madiun. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Madiun. Namun masih banyak faktor yang menjadi penghambat dalam menurunkan angka pengangguran. Angka 6,39% membuktikan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan telah berhasil menurunkan angka pengangguran. Kedepannya upaya yang dilakukan harus dimaksimalkan dan dioptimalkan sehingga angka pengangguran di Kota Madiun sesuai dengan yang kita harapkan Bersama

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Gambar III.26. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun tahun 2018-2022



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota Madiun tahun 2021 sebesar 8,15% dan TPT tahun 2022 sebesar 6,39%, turun sebesar 1,76 poin persen. Penurunan TPT ini menggambarkan keberhasilan program kerja dan kegiatan bidang ketenagakerjaan di tahun 2021 dan 2022



Penduduk usia kerja di Kota Madiun tahun 2022 tercatat mencapai 144.820 jiwa yang mengalami kenaikan sebesar 601 jiwa apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 144.219 jiwa. Apabila dilihat dari pola usia kerja dalam rentang tiga tahun terakhir ini, usia kerja di Kota Madiun menunjukkan pola yang hampir sama dimana jumlah angkatan kerja lebih banyak dibanding jumlah bukan angkatan kerja.

Tabel III. 26. Status Keadaan Ketenagakerjaan

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Agustus (2021- 2022)	
	orang	orang	orang	persen
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	144.219	144.820	601	0,42
Angkatan Kerja	96.439	96.815	376	0,39
- Bekerja	88.580	90.627	2.047	2,31
- Pengangguran	7.859	6.188	-1.671	-21,26
Bukan Angkatan Kerja	47.780	48.005	-255	0,47
	persen	persen	persen	persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,15	6,39	-1,76	
- Laki-laki	9,82	9,85	0,03	
- Perempuan	6,22	2,30	-3,92	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,87	66,85	-0,02	
- Laki-Laki	75,16	75,94	0,78	
- Perempuan	59,31	58,56	-0,75	

Dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ada pergeseran dari tahun 2021 ke tahun 2022, dimana jumlah angkatan kerja di Kota Madiun mengalami kenaikan sebesar 0,39 persen poin dan bukan angkatan kerja mengalami kenaikan 0,47 persen poin.



Lebih detilnya, penduduk usia kerja di Kota Madiun tahun 2021 sebagian besar adalah penduduk yang bekerja dengan jumlah mencapai 88.580 jiwa, pengangguran sebanyak 7.859 jiwa, dan bukan angkatan kerja sebanyak 47.780 jiwa. Sedangkan untuk kondisi tahun 2022 penduduk bekerja sebanyak 90.627 jiwa, pengangguran 6.188 jiwa, dan bukan angkatan kerja sebanyak 48.005 jiwa.

Berdasarkan data di atas, dari tahun 2021 ke 2022 terdapat kenaikan jumlah angkatan kerja yang disertai dengan jumlah penduduk bekerja yang meningkat, namun jumlah pengangguran menurun. Pada tahun 2022 jumlah penduduk bekerja naik sebanyak 2.047 jiwa atau naik sebesar 2,31 persen. Sedangkan pengangguran turun dari 7.859 menjadi 6.188 jiwa, dengan jumlah penurunan sebanyak 1.671 jiwa atau 21,26 persen. Kenaikan terjadi pada kelompok bukan angkatan kerja dari 47.780 menjadi 48.005 jiwa, dengan jumlah kenaikan sebanyak 255 jiwa atau 0,47 persen. Jadi, Jumlah Penduduk Usia Kerja secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebanyak 144.219 jiwa menjadi 144.820 jiwa di tahun 2022, dengan persentase kenaikan sebesar 0,42%.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2022 adalah sebesar 6,39 %, yaitu perbandingan antara pengangguran sebesar 6.188 orang dengan angkatan kerja sebesar 96.815 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 21,26 % dari TPT tahun 2021 yaitu sebesar 8,15 % atau 7.859 orang, dengan penurunan jumlah pengangguran sebanyak 1.671 orang. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 ini diakibatkan oleh banyaknya formasi lowongan kerja yg tersedia dan wirausaha baru selain itu masyarakat lebih siap dan kompeten menghadapi pasar kerja sehingga menyebabkan jumlah pengangguran semakin menurun, dan ada rekrutmen calon tenaga kerja baru oleh pemberi kerja. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) sebesar 0,42 persen poin dari tahun sebelumnya atau naik sebanyak 601 orang. Peningkatan jumlah usia



kerja di Kota Madiun ini dibarengi dengan peningkatan angkatan kerja sebanyak 376 orang. Apabila di bandingkan dengan target TPT tahun 2022 sebesar 8,26 %, realisasi TPT tahun 2022 sebesar 6,39 %. Untuk TPT apabila Capaian Kinerja lebih kecil dari target maka Capaian kinerja semakin baik, karena angka pengangguran lebih kecil dari target.

Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka menurun tetapi didominasi oleh sektor jasa sedangkan pada sektor ini tidak terlalu besar penyerapan tenaga kerjanya.

A. Faktor Pendorong

1. Pertumbuhan ekonomi sudah mulai berkembang setelah selesainya pandemi COVID-19.
2. Sudah mulai dibukanya sejumlah lowongan pekerjaan oleh para pelaku usaha.
3. Terjalannya kerja sama dengan lembaga maupun perusahaan dalam peningkatan *Soft Skill* dan *Hard Skill* serta penempatan para pencari kerja.

B. Faktor Penghambat

1. Penyebab pengangguran di Kota Madiun adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Mahasiswa dan lulusan magister pun semakin kesulitan memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang tersedia sedikit dan tidak diiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut.
2. Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor penyebab pengangguran di Indonesia. Hal tersebut menjadi penyebab pengangguran dengan banyaknya lulusan muda yang menganggur untuk menunggu pekerjaan.
3. Sebuah perusahaan yang memiliki lowongan pekerjaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria sesuai dengan jabatan yang akan ditempati oleh calon karyawan tersebut. Namun menjadi kendala ketika sebuah perusahaan membutuhkan beberapa



karyawan dengan skill yang tinggi. Secara otomatis, hanya akan ada beberapa pelamar yang memiliki kesempatan. Hal ini disebabkan karena jarang pelamar yang memiliki banyak keterampilan untuk menunjang posisi di suatu perusahaan.

4. Kemajuan teknologi yang semakin pesat kini membebani para angkatan kerja untuk mampu beradaptasi. Sayangnya, jika para angkatan kerja tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka mereka akan mudah ter-PHK dari kesempatan kerja mengingat teknologi kini sudah memasuki seluruh lini kehidupan manusia.

C. Upaya yang dilaksanakan dan Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan kondisi tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pencari kerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
- b. Menyelenggarakan kegiatan job fair/bursa kerja untuk mempermudah pemberi kerja mendapatkan calon tenaga kerja, dan pencari kerja bisa dipertemukan langsung dengan pemberi kerja.
- c. Melakukan pembinaan dan monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah, Lembaga Swasta dan atau Perguruan Tinggi guna terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik untuk dapat menempatkan alumni atau calon pencari kerja baru dengan pemberi kerja sesuai kompetensi masing-masing.
- d. Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)
- e. Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
- f. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan
- g. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- h. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai



- i. Menjalinkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membuka peluang pekerjaan
- j. Updating data pengangguran tenaga kerja sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Kota Madiun

B. Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi”

Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Data realisasi pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2022 adalah sebesar 7,98. Hal ini lebih kecil atau turun sebesar 2,18 dari tahun 2021 yaitu 10,16. Sedangkan kondisi kinerja pada awal periode RPJMD pada tahun 2019 sebesar 6,19. PDRB sektor perdagangan dari tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan yang disebabkan faktor penghambat yaitu adanya pandemi global covid-19 dan menurunnya daya beli masyarakat akibat penurunan sebagian besar kegiatan usaha dan penerapan PSBB dan terbatasnya aktivitas produksi serta konstruksi menyebabkan capaian kinerjanya mengalami penurunan. Di tahun 2021 capaian pertumbuhan PDRB di Kota Madiun mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 470,37 % dibandingkan dengan target tahun 2021. Untuk target pada tahun 2022 terjadi penyesuaian target dari RPJMD Perubahan dimana pada RPJMD perubahan target PDRB sector jasa sebesar 2,44 disesuaikan menjadi 10,16 dengan memperhitungkan realisasi capaian pada tahun 2021. Hal ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan data pada dokumen LKPJ yang menggunakan data total item. Dan di tahun 2022 PDRB sektor ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya faktor penghambat, diantaranya

1. Penataan pedagang informal belum maksimal dengan semakin banyaknya masyarakat yang berjualan dan tempat berjualan yang terbatas.



2. Harga Bahan Pokok di pasaran yang terkadang kurang stabil dan mempengaruhi aktivitas perdagangan.
3. Promosi Produk perdagangan yang belum optimal.

Faktor Pendorong:

1. Diperbolehkannya aktivitas masyarakat secara new normal pasca pandemi Covid-19.
2. Program dan kegiatan yang tepat sasaran.
3. Infrastruktur dan Sarana prasarana pendukung yang memadai.

Upaya-upaya dalam peningkatan capaian PDRB sektor perdagangan:

1. Lebih memanfaatkan sistem informasi manajemen dan teknologi dalam pengelolaan sistem perdagangan contoh: SIM Pasar, E-Retribusi, E- Bakul.
2. Pengendalian Harga dan Inflasi dengan Operasi Pasar dan kegiatan Tekan Inflasi melalui Subsidi Bahan Pokok Kepada masyarakat.
3. Menggalakkan Promosi Produk Perdagangan melalui Pameran produk dan Event-event perdagangan serta pelatihan-pelatihan pada pedagang.
4. Revitalisasi Pasar dan perbaikan sarana prasarana pasar rakyat evitalisasi Pasar dan perbaikan sarana prasarana pasar rakyat.
5. Merintis jalur sistem distribusi perdagangan melalui kerjasama dengan Pasar Induk (Pasar Tanah Abang Jakarta) dan bantuan ongkos kirim pada pedagang pasar rakyat.

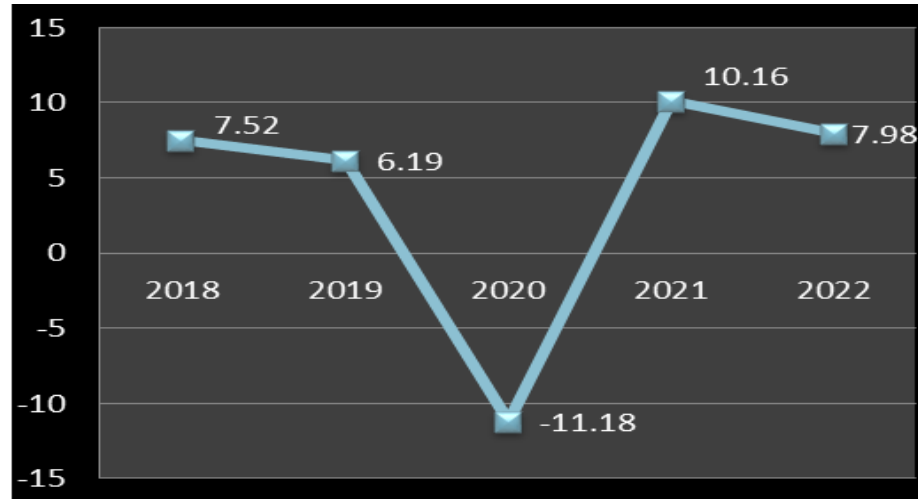
Kontribusi Perangkat Daerah dalam indikator PDRB sektor perdagangan:

1. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi daerah.
2. Mempromosikan produk perdagangan/produk unggulan daerah.
3. Revitalisasi Pasar Rakyat sebagai salah satu pusat perdagangan daerah.
4. Sosialisasi dan Pembinaan kepada pengusaha terkait kemudahan pengurusan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha sesuai peraturan yang berlaku.
5. Pemenuhan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat yang merupakan salah satu sumber PAD dan dapat menggerakkan Belanja Barang/Jasa Daerah yang dapat menunjang pertumbuhan PDRB perdagangan barang/jasa.



Adapun perkembangan PDRB Sektor Perdagangan di Kota Madiun mulai tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

Gambar III.27. PDRB Sektor Perdagangan di Kota Madiun Tahun 2017 – 2021



Sumber : BPS Koa Madiun (angka 2022 belum rilis)

Faktor Penghambat:

1. Penataan pedagang informal belum maksimal dengan semakin banyaknya masyarakat yang berjualan dan tempat berjualan yang terbatas
2. Harga Bahan Pokok di pasaran yang terkadang kurang stabil dan mempengaruhi aktivitas perdagangan
3. Promosi Produk perdagangan yang belum optimal

Faktor Pendorong:

1. Diperbolehkannya aktivitas masyarakat secara new normal pasca pandemi Covid-19
2. Program dan kegiatan yang tepat sasaran
3. Infrastruktur dan Sarana prasarana pendukung yang memadai

Upaya-upaya dalam peningkatan capaian PDRB sektor perdagangan:

1. Lebih memanfaatkan sistem informasi manajemen dan teknologi dalam pengelolaan sistem perdagangan contoh: SIM Pasar, E-Retribusi, E- Bakul



2. Pengendalian Harga dan Inflasi dengan Operasi Pasar dan kegiatan Tekan Inflasi melalui Subsidi Bahan Pokok Kepada masyarakat
3. Menggalakkan Promosi Produk Perdagangan melalui Pameran produk dan Event-event perdagangan serta pelatihan-pelatihan pada pedagang
4. Revitalisasi Pasar dan perbaikan sarana prasarana pasar rakyat revitalisasi Pasar dan perbaikan sarana prasarana pasar rakyat
5. Merintis jalur sistem distribusi perdagangan melalui kerjasama dengan Pasar Induk (Pasar Tanah Abang Jakarta) dan bantuan ongkos kirim pada pedagang pasar rakyat

Kontribusi Perangkat Daerah dalam indikator PDRB sektor perdagangan:

1. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi daerah
2. Mempromosikan produk perdagangan/produk unggulan daerah
3. Revitalisasi Pasar Rakyat sebagai salah satu pusat perdagangan daerah
4. Sosialisasi dan Pembinaan kepada pengusaha terkait kemudahan pengurusan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha sesuai peraturan yang berlaku
5. Pemenuhan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat yang merupakan salah satu sumber PAD dan dapat menggerakkan Belanja Barang/Jasa Daerah yang dapat menunjang pertumbuhan PDRB perdagangan barang/jasa

Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Pertumbuhan PDRB sektor jasa meliputi Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa Lainnya. Jasa Keuangan dan Asuransi mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.



Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional. usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Pendidikan/Education Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini. Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan Pendekatan Produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan Pendekatan Deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi. Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP dan DNPeng BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.



Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Jasa Lainnya/Other Services Activitie Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Untuk data series pertumbuhan PDRB sector jasa menurut BPS pada tahun 2022 adalah sebesar 21,57 dengan capaian sebesar 190,54% jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 11,32. Pertumbuhan PDRB di sektor jasa juga mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 11,32 atau mengalami kenaikan sebesar 10,25. Untuk target pada tahun 2022 terjadi penyesuaian target dari RPJMD Perubahan dimana pada RPJMD perubahan target PDRB sector jasa sebesar 0,76 disesuaikan menjadi 11,32 dengan memperhitungkan realisasi capaian pada tahun 2021. Hal ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan data pada dokumen LKPJ yang menggunakan data total item.



Pemerintah Kota Madiun telah melakukan upaya Rem Covid-19 Gas Ekonomi dalam rangka memperbaiki Pertumbuhan PDRB di Kota Madiun antara lain :

- a) Pembangunan Infrastruktur kesehatan, pendidikan yang memadai
- b) Melakukan Promosi Produk Perdagangan
- c) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan
- d) Melakukan Pengawasan Terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
- e) Meningkatkan Mutu Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
- f) Melakukan Pengawasan Perijinan Perdagangan
- g) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan PKL
- h) Membangun Jejaring Perdagangan Lintas Kota
- i) Melakukan Pendataan Volume Perdagangan Kota Madiun
- j) Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat
- k) Melakukan Promosi Pasar Rakyat
- l) Pembangunan Lapak UMKM di tiap Kelurahan (aplikasi pro UMPKM)
- m) Pembangunan jalur sepeda wisata penghubung lapak
- n) Pembangunan dan pengembangan Pahlawan Street Center (PSC) sebagai pusat wisata baru di Kota Madiun

Faktor Penghambat:

1. Tenaga ahli bidang Kesehatan dan Pendidikan masih banyak dibutuhkan
2. Tingginya suku bunga kredit dari lembaga keuangan
3. Promosi daerah melalui event-event daerah masih perlu diperbanyak
4. Dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022

Faktor Pendorong:

1. Tersedianya Infrastruktur daerah yang memadai. Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum atau fasilitas publik, seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, jaringan telepon, dan sebagainya



2. Tingkat Inflasi Kota Madiun pada Desember 2022 yang mencapai 0,58 persen itu lebih rendah jika dibanding inflasi Jawa Timur sebesar 0,60 persen dan nasional 0,66 persen.
3. Tingkat kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup meningkat Semakin tinggi usia harapan hidup masyarakat maka semakin panjang usia rata-rata hidup masyarakat, sehingga kesempatan masyarakat tersebut untuk melakukan kegiatan yang produktif dari segi ekonomi semakin panjang pula.

Pada Misi 4 Tujuan 2 terdapat 2 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut

Tabel III.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2021 (n-1)	2022 (n)
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	77,2	78,74	81,25
	Indek Gini	0,35	0,345	0,398

Sumber Data : Satpol PP Kota Madiun, Badan Pusat Statistik

Tabel III.28 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD (%)
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	77,2	81,25	105,25
	Indek Gini	0,35	0,398	81,62

Sumber Data : Satpol PP Kota Madiun, Badan Pusat Statistik



Tabel III.29. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Provinsi 2021	Realisasi Nasional 2021
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	78,74	N/A	N/A
	Indek Gini	0,345	0,74	0,384

Sumber Data : Satpol PP Kota Madiun, Badan Pusat Statistik

1. Indeks Ketentraman

Indeks Ketentraman sebagai salah satu alat pengukuran tingkat ketentraman dan ketertiban yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan tingkat ketentraman dan ketertiban. Penyusunan Survei Indeks Ketentraman dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang nilai Indeks Ketentraman dari masyarakat di Kota Madiun. Berdasarkan hal tersebut diharapkan juga mampu menjadi bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

Capaian indeks ketentraman Kota Madiun tahun 2022 adalah 105,45% dan ditargetkan pada akhir periode RPJMD 2019-2024. Peningkatan keamanan dan ketentraman akan meningkatkan toleransi dalam bermasyarakat. Disisi lain, toleransi masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya menjaga kebersamaan dan keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat akan memicu terjadinya konflik sosial. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis, berkesinambungan, konsisten untuk meningkatkan toleransi dan peran/partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta mengurangi angka kriminalitas dan penggunaan NAPZA.

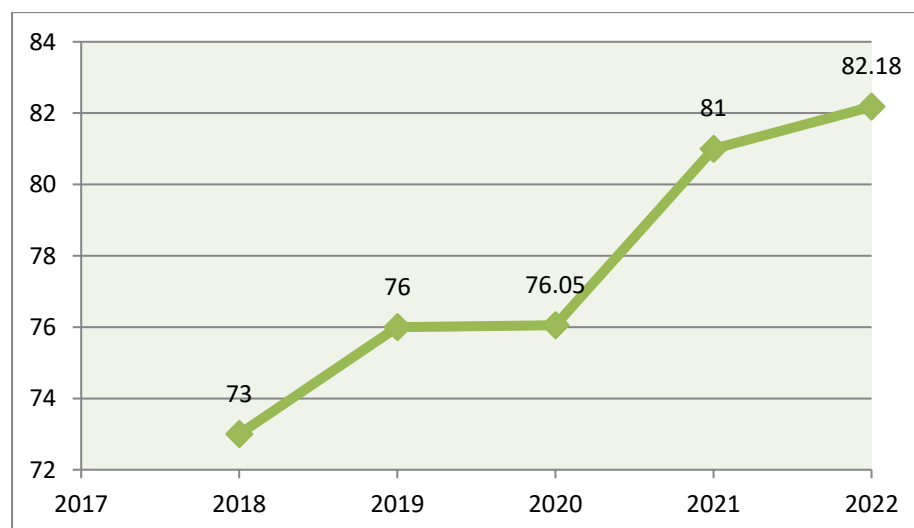


Terdapat empat dimensi pengukuran indeks ketentraman:

1. Dimensi Pada Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma-norma yang ada (Ketertiban Umum)
2. Dimensi Pada Persepsi Suasana Tenang
3. Dimensi Pada Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan
4. Dimensi Pada Persepsi Aman

Berdasarkan hasil survei dan analisis yang dilakukan kepada masyarakat (responden) bahwa penilaian persepsi pada setiap indikator disimpulkan rata-rata Nilai Persepsi Indeks Ketentraman Masyarakat di Kota Madiun Tahun 2022 adalah Nilai Interval 3,25 atau Nilai Konversi 81,25 dengan peringkat "B" atau status/predikat "KONDUSIF" atau naik sebesar 2,51 jika dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 78,74. Sedangkan capaian tahun 2022 adalah sebesar 105,45% dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu sebesar 77,05.

**Gambar III.28 Indeks Ketentraman Kota Madiun
Tahun 2018-2022**



Sumber : Satpol Kota Madiun

Pada deskripsi nilai variable, diketahui bahwa V-20 Kegiatan Pencegahan/Penindakan merupakan peringkat pertama dengan nilai 84,246 sedangkan peringkat paling rendah yakni V-2 Ancaman/Gangguan Kriminalitas



Jalanan/tempat-tempat Umum dengan perolehan nilai 70,881. Variabel lain yang masuk kategori bernilai rendah yakni pada V-3 Resiko Gangguan Keamanan Fisik dan Mental/Spiritual = 71,871, V-13 Bebas dari Pelanggaran HAM = 72,989, V-9 Ekonomi = 74,316 dan V-1 Ancaman/Gangguan Kriminalitas Lingkungan Perumahan/Permukiman = 75,024.

Rekomendasi perbaikan atas Indeks Ketentraman Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihak ke tiga yaitu agar Pemerintah Kota Madiun lebih mampu mendorong dan mewujudkan partisipasi, yaitu kesadaran aparaturnya dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri. Masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan mensosialisasikan sistem keamanan lingkungan yang mengedukasikan dan menyadarkan untuk ikut peduli terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan. Setiap masyarakat/komunitas membutuhkan ketentraman dan ketertiban untuk mendukung berbagai aktivitas.

Rencana tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan:

1. Memberikan pembinaan kegaitan patroli wilayah di Kota Madiun terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota (contoh: memberikan pembinaan ketika patroli kepada pedagang kaki lima dengan memberikan peringatan/himbauan berupa stiker pelanggaran)
2. Memberikan sosialisasi Peraturan Daerah yang terkait dengan pelanggaran tantribum kepada masyarakat (Organisasi Dharma Wanita, PKK, masyarakat kelurahan, dan anak sekolah)
3. Memberikan pembinaan kepada pelanggar Peraturan Daerah secara persuasif dan humanis (contoh: pemberian panggilan dan pembinaan kepada badan usaha yang tidak memiliki izin usaha).



2. Indeks Gini

Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu.

Penghitungan Indeks Gini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$$

dimana,

- GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)
- P_i : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
- F_i : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i
- F_{i-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

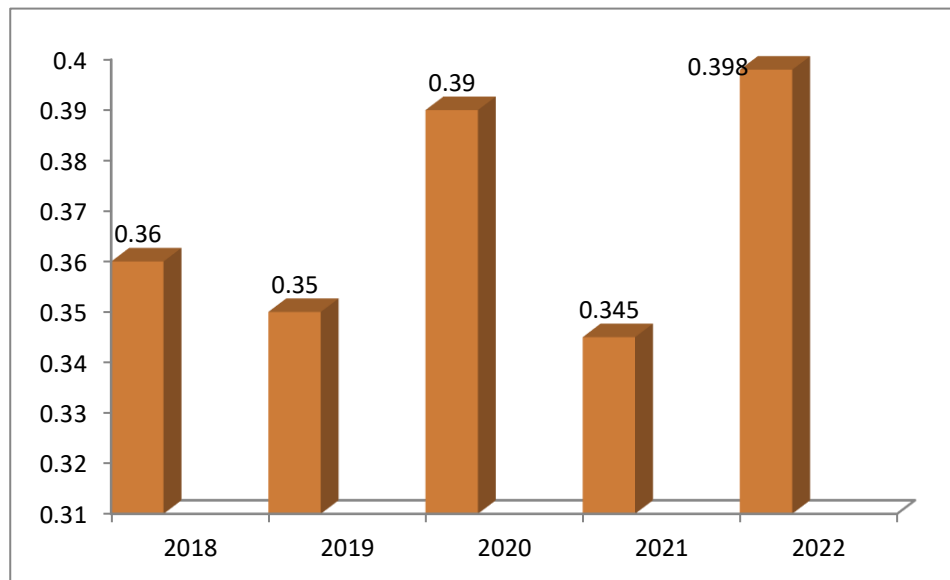
Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini adalah sebagai berikut :

Nilai Koefisien (x)	Distribusi Pendapatan
$x = 0$	Merata sempurna
$0 < x < 0,4$	Tingkat ketimpangan rendah
$0,4 < x < 0,5$	Tingkat ketimpangan sedang
$0,5 < x < 1$	Tingkat ketimpangan tinggi
$x = 1$	Tidak merata sempurna (dikuasai oleh satu pihak)



Adapun data series Indeks Gini Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana berikut :

Gambar III.29 Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

Berdasarkan grafik tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Indeks Gini Kota Madiun pada Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 0,35. Sedangkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan dari Tahun 2019 menjadi sebesar 0,39, penurunan ini dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid 19 dimana kondisi pada saat itu perekonomian secara keseluruhan menurun sehingga terjadi kesenjangan pendapatan antar penduduk dalam satu wilayah. Untuk Tahun 2021 mengalami kenaikan membaik dari Tahun 2020 menjadi sebesar 0,345, hal ini menandakan mulai membaiknya tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk dalam satu wilayah, akan tetapi Indeks Gini pada Tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 0,398, hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 terjadi inflasi yang tinggi hampir di semua daerah bahkan di sebagian besar negara terjadi kenaikan inflasi yang tinggi.



Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah
- 2) Bantuan Sosial Air Bersih
- 3) Bantuan Sosial Lansia Tidak Potensial
- 4) Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar
- 5) Bantuan Sosial Santunan Kematian
- 6) Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya)
- 7) Bantuan Sosial untuk Janda Perintis
- 8) Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
- 9) Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA

Tujuan "Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat" didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator dengan capaian sebagai berikut :

Tabel. III.30. Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 5 Tahun 2022@

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
4.2.1	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,87	4,76	106,11
4.2.2	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	74,40	75,68	101,72
		Indeks Rasa Aman	76,20	82,18	107,84

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Bakesbangpol, Satpol PP, Bakesbangpol Kota Madiun



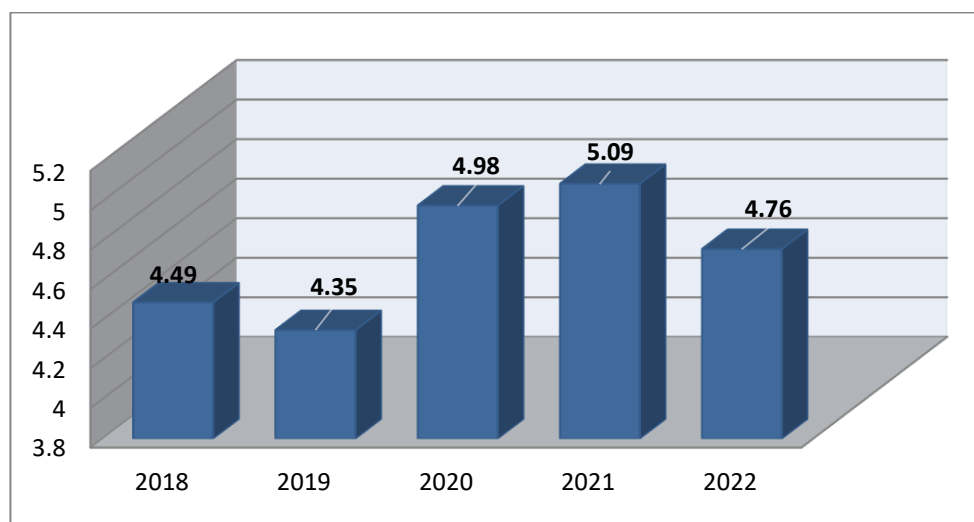
A. Sasaran "Pengurangan Kemiskinan"

Angka Kemiskinan

Sebagaimana tertuang pada Peraturan Walikota Madiun Nomor : 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 bahwa indikator sasaran pengurangan kemiskinan juga mengalami penyesuaian target sebagaimana tertuang pada RPJMD Perubahan, semula pada RPJMD-P target pengurangan kemiskinan sebesar 4,87 disesuaikan menjadi 5,07. Hal ini berdasarkan proyeksi penghitungan angka kemiskinan di Kota Madiun.

Perkembangan Angka Kemiskinan selama periode Maret 2021-Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Madiun berkurang sebanyak 0,57 ribu jiwa, dari 9,06 ribu jiwa pada Maret 2021 menjadi 8,49 ribu jiwa pada Maret 2022 atau mengalami penurunan sebesar 6,29 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kota Madiun dalam rentang waktu satu tahun, angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,33 persen, dari 5,09 persen pada Maret 2021 menjadi 4,76 persen pada Maret 2022.

Gambar III.30 Persentase Angka Kemiskinan Periode 2018-2022



Sumber : BPS Kota Madiun 2022



Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kota Madiun selama periode Maret 2021 antara lain adalah:

1. Aktifitas perekonomian masih belum pulih sebagai dampak pandemi covid-19. Hal ini tercermin dari informasi big data (<https://dataforgood.facebook.com>) pergerakan masyarakat di Kota Madiun yang rata-rata masih - 0,13 terhadap kondisi Februari 2020 (baseline kondisi sebelum pandemi).
2. Dalam upaya mematuhi anjuran pemerintah dalam rangka pencegahan perluasan covid-19, masyarakat di Kota Madiun masih banyak berdiam diri di rumah. Kondisi ini tercermin dari informasi big data (<https://dataforgood.facebook.com>) pergerakan masyarakat di Kota Madiun yang rata-rata masih 0,20 terhadap kondisi Februari 2020 (baseline kondisi sebelum pandemi).

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah.
2. Bantuan Sosial Air Bersih.
3. Bantuan Sosial Lansia Tidak Potensial.
4. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar.
5. Bantuan Sosial Santunan Kematian.
6. Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya).
7. Bantuan Sosial untuk Janda Perintis.
8. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
9. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA.



B. Sasaran "Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat"

1. Indeks Kerukunan

Capaian Indikator Indeks Kerukunan untuk Tahun 2022 adalah 75,68 dengan predikat Harmonis sehingga melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 74,40 dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,72 %. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 74,40 dengan kenaikan sebesar 1,28.

Indikator tersebut diukur berdasarkan beberapa dimensi :

- a. Menghormati
- b. Menerima
- c. Jujur
- d. Teladan
- e. Kesetaraan

Sedangkan faktor pendorong peningkatan capaian kinerja :

1. Kerukunan antar umat beragama
2. Toleransi dalam menjalankan ibadah
3. Kerukunan antar suku yang ada di Kota Madiun
4. Saling menghargai dan menghormati dengan perbedaan
5. Deteksi dini akan timbulnya konflik sosial

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Kerukunan adalah :

1. Rapat koordinasi Forkopimda untuk membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat
2. Sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat dan generasi muda tentang ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
3. Sosialisasi Jejaring Panca Mandala (JPM)
4. Sarasehan Bela Negara
5. Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama
6. Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan
7. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini
8. Fasilitasi/audiensi apabila timbul konflik sosial di masyarakat



**Tabel III.31 Data Series Capaian Indeks Kerukunan Kota Madiun
Tahun 2019-2022**

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI KINERJA
1.	2019	2,65	3,70 atau 73,95
2.	2020	2,77	3,7015 atau 74,0306
3.	2021	74,30	74,36
4.	2022	74,40	75,68

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2022

2. Indeks Rasa Aman

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta dan kehormatan. Indeks keamanan sebagai salah satu alat pengukuran tingkat keamanan dan digunakan untuk mengukur perubahan tingkat keamanan

Indeks Rasa Aman Kota Madiun mengadopsi metodologi penyusunan dan pengembangan Indeks Rasa Keamanan Manusia Indonesia yang merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia dengan mempertimbangkan konteks ke Indonesiaan yang terdiri dari 4 dimensi.

Adapun empat dimensi dalam yang digunakan dalam pengukuran Indeks Rasa Aman yaitu :

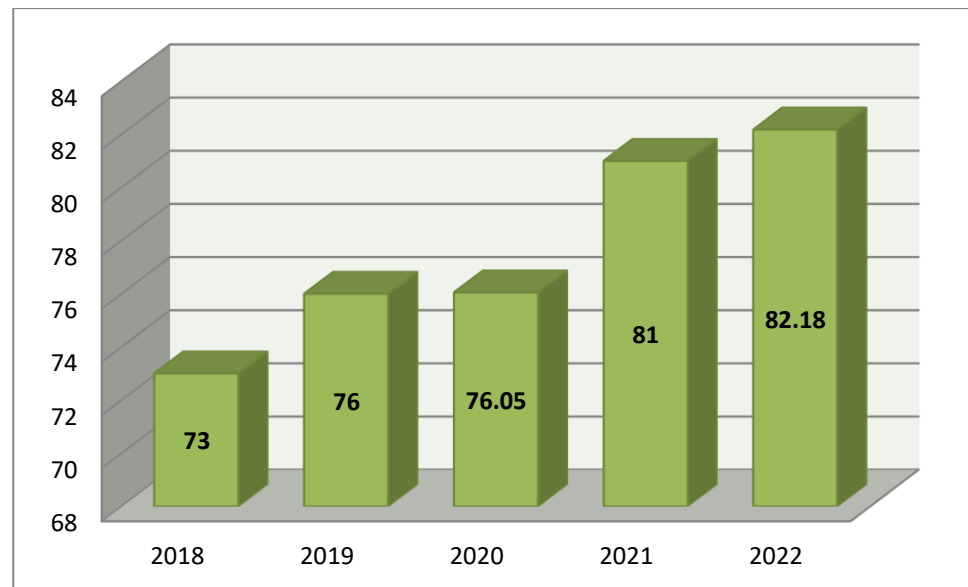
- Dimensi Keamanan dari Bencana (Kebencanaan)
- Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial (Kesejahteraan Sosial)
- Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan (Kebhinnekaan)



d) Dimensi Keamanan dari Kekerasan (Kekerasan)

Capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman tahun 2021 adalah sebesar 81,00 dengan peringkat Aman, sehingga melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 76,15. Capaian Kinerja telah mencapai persentase sebesar 106,36%. Sedangkan capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman tahun 2022 adalah sebesar 82,18 dengan peringkat Aman Terkendali, sehingga melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 76,2. Capaian Kinerja telah mencapai persentase sebesar 107,84%, sehingga Indeks Rasa Aman Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 naik sebesar 1,18 poin.

Gambar III.31 Indeks Rasa Aman Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2022



Sumber : Satpol PP Kota Madiun

Rekomendasi perbaikan atau peningkatan indeks rasa aman Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihak ketiga:

1. Agar menyelenggarakan Gerakan Sadar Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Siskamling merupakan bentuk partisipasi



- masyarakat yang identik dengan ronda keliling. Melalui Gerakan dan realisasi Gerakan Sadar Siskamling diharapkan mampu membuahkan hasil, diantaranya kondisi dan keamanan lingkungan benar-benar terjaga, aman dan nyaman. Gerakan Sadar Siskamling penting dilakukan lagi mengingat gejala Siskamling menjadi memudar seiring dengan menurunnya nilai-nilai kebersamaan serta menguatnya rasa individualisme di masyarakat
2. Agar melakukan sistem pencegahan kejahatan dan pengamanan yang modern dengan mengedepankan Gerakan terintegrasi dan terpadu antar sektor/lini yang terkait. Revitalisasi Siskamling sebagai upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Madiun.

Rencana tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan atau peningkatan indeks rasa aman Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022:

1. Melaksanakan Kegiatan Memukul Kentongan Serentak se-Kota Madiun di Pos Kamling oleh Linmas kelurahan sebagai upaya menghidupkan kembali Pos Kamling
2. Mengadakan lomba Siskamling tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat Kota Madiun sebagai upaya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.

J. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Madiun tahun 2021, total anggaran belanja tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.275.325.306.646,00. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja operasi sebesar dan belanja modal. Belanja operasi terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan



belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja operasi dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis.

Realisasi belanja APBD Kota Madiun Tahun 2021 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Tabel III.32 Realisasi APBD Kota Madiun Tahun 2022

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Belanja Modal	253.194.750.870,00	230.866.858.606,97	91,18%
Belanja Tidak Terduga	5.534.885.274,00	2.502.082.962,00	45,21%
Belanja Operasi	1.051.844.972.128,00	930.484.675.287,31	88,46%
Total APBD	1.310.574.608.272,00	1.163.001.551.809,93	88,74%

Sumber : BKAD Kota Madiun

**Tabel III.33 Realisasi APBD Kota Madiun Tahun 2022
Per Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	802.007.129.221,00	701.335.697.084,00	87,45%



Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	46.293.612.189,00	42.107.054.946,00	90,96%
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota	159.010.342.219,00	153.903.608.445,00	96,79%
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	39.971.512.509,00	37.113.667.777,14	92,85%
Meningkatnya Pemberdayaan Gender	2.921.223.354,00	2.491.715.445,00	85,30%
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	73.681.607.403,00	66.179.461.798,04	89,82%
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	108.562.088.128,00	85.535.698.629,96	78,79%
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	3.392.281.692,00	3.179.860.395,00	93,74%
Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	32.525.824.530,00	31.744.566.799,96	97,60%



Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Pengurangan Kemiskinan	30.002.381.280,00	27.972.320.763,00	93,23%
Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	12.206.605.747,00	11.437.899.727,00	93,70%
TOTAL	1.310.574.608.272,00	1.163.001.551.809,93	88,74%

Sumber : BKAD Kota Madiun

**Tabel III.34 Realisasi Anggaran Per Program
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022**

No	Program	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	636,997,520,926.93
2	Program Pengelolaan Pendidikan	60,377,355,861.04
3	Program Pengembangan Kurikulum	2,921,959,628.00
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1,342,679,200.00
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	79,393,015,039.96
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	347,491,250.00
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	53,117,550.00
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,968,645,700.00
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	9,292,654,088.00
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100,350,000.00
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	23,520,766,501.00
12	Program Penataan Bangunan Gedung	25,390,241,359.00
13	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	17,136,694,870.00
14	Program Penyelenggaraan Jalan	59,120,143,095.00
15	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	323,442,395.00
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,468,555,934.00
17	Program Pengembangan Perumahan	3,064,494,874.00



No	Program	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
18	Program Kawasan Permukiman	6,284,738,772.00
19	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	25,771,250,886.45
20	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4,940,533,969.00
21	Program Penanggulangan Bencana	1,504,743,976.00
22	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,032,636,800.00
23	Program Pemberdayaan Sosial	4,757,933,258.00
24	Program Rehabilitasi Sosial	2,335,979,740.00
25	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	15,648,307,647.00
26	Program Penanganan Bencana	567,282,344.00
27	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	203,042,000.00
28	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,100,609,715.00
29	Program Penempatan Tenaga Kerja	520,076,900.00
30	Program Hubungan Industrial	1,545,145,030.00
31	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	718,108,200.00
32	Program Perlindungan Perempuan	272,529,525.00
33	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	713,371,480.00
34	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	185,306,320.00
35	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	381,646,960.00
36	Program Perlindungan Khusus Anak	220,752,960.00
37	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,017,604,477.00
38	Program Pengawasan Keamanan Pangan	119,739,048.00
39	Program Pengelolaan Izin Lokasi	346,000,675.00
40	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	32,958,750.00
41	Program Penatagunaan Tanah	13,201,500.00
42	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	420,538,285.00
43	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,526,875,800.00
44	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	55,474,400.00
45	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	17,596,050.00
46	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	529,480,100.00
47	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	550,697,700.00
48	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	98,223,850.00
49	Program Pengelolaan Persampahan	7,751,369,780.69



No	Program	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
50	Program Pendaftaran Penduduk	281,584,330.00
51	Program Pencatatan Sipil	310,070,880.00
52	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	234,427,750.00
53	Program Pengendalian Penduduk	846,425,654.00
54	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1,840,921,486.00
55	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1,086,081,950.00
56	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	8,201,526,557.00
57	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	4,883,769,446.00
58	Program Aplikasi Informatika	12,570,184,502.00
59	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	394,568,450.00
60	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	170,362,900.00
61	Program Pengembangan Umkm	410,510,200.00
62	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	165,478,636.00
63	Program Promosi Penanaman Modal	207,663,500.00
64	Program Pelayanan Penanaman Modal	362,465,020.00
65	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	422,531,450.00
66	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	79,506,750.00
67	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	543,392,304.00
68	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7,918,285,741.00
69	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial	282,806,434.00
70	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	215,592,550.00
71	Program Pengembangan Kebudayaan	2,852,553,215.00
72	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	123,331,000.00
73	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	87,160,375.00
74	Program Pembinaan Perpustakaan	1,439,971,609.00
75	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	97,495,500.00
76	Program Pengelolaan Arsip	600,211,432.00
77	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	114,659,915.00
78	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	336,535,866.00
79	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	37,905,320.00



No	Program	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
80	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	325,546,043.00
81	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	700,642,560.00
82	Program Pemasaran Pariwisata	1,047,013,524.00
83	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	309,131,955.00
84	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,272,466,874.00
85	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	525,135,000.00
86	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	293,494,925.00
87	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	130,879,200.00
88	Program Perizinan Usaha Pertanian	37,547,250.00
89	Program Penyuluhan Pertanian	62,909,000.00
90	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	264,933,250.00
91	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5,765,636,098.96
92	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	6,779,921,545.00
93	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	284,392,730.00
94	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	380,991,500.00
95	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	796,427,223.00
96	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	977,679,644.00
97	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	14,028,750.00
98	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	12,152,352,976.78
99	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,080,016,426.00
100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	14,045,717,357.00
101	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,085,081,596.00
102	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,587,735,390.00
103	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4,559,374,172.00
104	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	483,044,000.00
105	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,229,110,690.00
106	Program Kepegawaian Daerah	1,467,316,950.00
107	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,468,188,034.00
108	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	678,830,632.00
109	Program Penyelenggaraan Pengawasan	420,614,500.00
110	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	911,312,014.00



No	Program	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
111	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	16,454,343,133.00
112	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25,354,743,128.12
113	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1,686,234,465.00
114	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	287,908,400.00
115	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	432,707,750.00
116	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,009,236,900.00
117	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	254,616,000.00
118	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	588,407,482.00
119	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,675,016,850.00
JUMLAH		1.163.001.551.809,93

Sumber : BKAD Kota Madiun

K. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

Tabel III.35
Efisiensi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
1	2	3	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	108,66%	87,14%	21,52%
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	100%	94,35%	5,65%



No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
1	2	3	5	6	7
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	100,35%	99,32%	1,03%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	100,54%	87,63%	12,91%
		Indeks Inovasi Daerah	97,1%	96,29%	-
3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks Infrastruktur	100,01%	96,79%	3,22%
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100,22%	92,85%	7,37%
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	100,13%	89,47%	10,66%
		Rata-rata Lama Sekolah	104,66%	93,65%	11,01%
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	100,41%	78,79%	21,62%
7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	99,44%	85,30%	-
8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	88,67%	93,74%	-



No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
1	2	3	5	6	7
9	Meningkatnya pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	78,54%	97,44%	-
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	190,54%*	97,81%	92,73%
10	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	106,11%	93,23%	12,88%
11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Angka Kerukunan	101,72%	98,85%	2,87%
		Indeks Rasa Aman	107,84%	91,19%	16,65%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum target kinerja dari 17 (tujuh belas) indikator tahun 2022 pada masing-masing sasaran strategis sudah berhasil dicapai, tetapi terdapat 4 (empat) indikator yang belum mencapai target yaitu Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pemberdayaan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. Secara umum capaian indikator kinerja sudah tercapai di atas 100%. Hal ini mengindikasikan keluaran dan hasilnya sudah efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.

Tingkat efisiensi pada masing-masing sasaran dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3 (tiga) indikator sasaran sudah efisien yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan tingkat efisiensi sebesar 21,52%, Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dengan tingkat efisiensi sebesar



- 5,65% dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tingkat efisiensi sebesar 1,03%.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator, satu indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sudah menunjukkan tingkat efisiensi yaitu sebesar 12,91%, sedangkan untuk Indeks Inovasi Daerah belum efisien karena capaian kerjanya tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
 3. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota
Terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks Infrastruktur dengan tingkat efisiensi sebesar 3,22%.
 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indikator pada sasaran ini yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 7,37%.
 5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
Indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah sudah efisien dengan tingkat efisiensi masing-masing sebesar 10,66% dan 11,01%
 6. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup sudah menunjukkan efisiensi dengan tingkat efisiensi sebesar 21,62%
 7. Meningkatnya Pemberdayaan Gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender belum efisien karena realisasi kinerja kurang dari target yang telah ditetapkan
 8. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka belum efisien karena realisasi kinerja kurang dari target yang telah ditetapkan
 9. Meningkatnya pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi
Indikator Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan pada sasaran ini belum efektif, sedangkan Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa menunjukkan tingkat efisiensi yang signifikan yaitu sebesar 92,73%
 10. Pengurangan Kemiskinan dengan indikator Angka Kemiskinan sudah efisien dengan tingkat efisiensi 12,88%
 11. Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat
Pada sasaran ini tingkat efisiensi untuk indikator Angka Kerukunan adalah sebesar 2,87% dan indikator Indeks Rasa Aman sebesar 16,65%



Dalam masa pemerintahan tahun 2022 terdapat inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun:

1. PEMBANGUNAN

1) Pahlawan Street Center (PSC)

Pembangunan saluran multi manfaat, Pembangunan PSC memiliki fungsi antisipasi banjir instalasi kabel jalur bawah tempat wisata juga peningkatan UMKM setempat

2) Lapak UMKM Kelurahan

Setiap Kelurahan wajib memiliki satu tempat menarik untuk pelaku UMKM setempat

3) RTLH + Tempat Usaha

Program perbaikan rumah tidak layak huni sekaligus penambahan tempat usaha

4) Edupark Ngrowo Bening

Edupark Ngrowo Bening juga memiliki banyak fungsi, mulai bumi perkemahan, kebun sayur dan buah, budidaya lebah, budidaya ikan, tempat wisata an ekonomi tentunya

5) Saluran Lingkungan Tertutup

Dalam priyek perbaikan saluran dan trotoar lingkungan Walikota menginstruksikan pemindahan saluran dari posisi tepi jalan ke tengah jalan. Sakuran dibuat besar di titik tengah dan tertutup. Jalan gang menjadi lebih lebar dan rapi. Tidak ada pemandangan sauran yang kotor dan bau.

2. EKONOMI

1) Jalur Sepeda

Olah raga dan wisata menjadi upaya peningkatan ekonomi di Kota Madiun. Jalur ini melewati lokasi Lapak UMKM Kelurahan.

2) Budidaya Lebah Madu

Budidaya lebah madu merupakan tindak lanjut dari prgram Kota Sejuta Bunga.



- 3) Pecel Porang
Kolaborasi pecel dan porang diyakini bakal menjadi alternatif kuliner lokal dan menyebabkan bantunya
 - 4) Aplikasi Pro UMKM
Walikota mewajibkan ASN untuk berbelanja di UMKM dan PKL sekitar tempat tinggal atau kantor. Pelaporan program ini melalui aplikasi pro UMKM
 - 5) Kunyit Hitam dan Jahe Merah
Budidaya bibit kunyit hitam dan jahe merah untuk dibagikan kepada warga
3. SOSIAL
- 1) Siaga Kita
Program asuransi kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja sektor
 - 2) Santunan Kematian
Santunan Rp. 1 Juta kepa ahli waris setiap kematian
 - 3) Bekerja di Pemkot
Anak yatim/piatu dan atlet berprestasi diberikan pekerjaan di Pemkot Madiun
 - 4) Gerai Pakaian Bekas
Walikota Madiun menginstruksikan ASN untuk menyumbangkan pakaian bekas pantas untuk ditawarkan ke warga dalam gerai pakaian bekas
 - 5) Hadiah sepeda motor bagi masyarakat yang melaporkan adanya PUNGLI
4. PENANGANAN COVID-19
- 1) Satu RT satu Dapur Umum
Penyediaan konsumsi bagi warga isoman melalui dapur umum dengan menggandeng pelakuPKL di RT tersebut. Program terpaksa dihentikan karena muncul kebijakan pemindahan isoman ke isoter
 - 2) Gerai Masker Gratis
Gerai masker mudah dijumpai di Kota Madiun. Selain itu juga ada gerai masker keliling menggunakan mobil.



3) Mobil Logistik Covid-19

Bantuan sembako Covid-19 terus diberikan secara door to door

4) Beasiswa Mahasiswa Anak Yatim Piatu Korban Covid-19

Mahasiswa anak korban Covid-19 tidak boleh putus kuliah

5) Gerai Vaksinasi Covid-19

Layanan vaksinasi di tempat keramaian dan jemput bola dari rumah ke rumah. Masyarakat beruntung juga mendapatkan hadiah usai vaksinasi.

6) Vaksinasi dalam Kegiatan Resmi Pemerintahan

Layanan vaksinasi selalu dihadirkan dalam kegiatan resmi pemerintahan yang menghadirkan masyarakat

7) Rapid Antigen Gratis

Pemerintah menggandeng laboratorium swasta untuk menyediakan layanan rapid antigen gratis guna melakukan testing kepada masyarakat.

Selain pencapaian kinerja dimaksud Pemerintah Kota Madiun telah mendapatkan penghargaan di tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Penyerahan LKPD kepada BPK tercepat tingkat nasional
2. Walikota Madiun sebagai Pembina K3 terbaik tingkat Jawa Timur
3. Penghargaan Top City Branding dari SuaraPemerintah.Id
4. Penghargaan Top Government Leader for Personal Branding Award 2022
5. Penghargaan terkait penyaluran, penyerapan, dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2021 tercepat dari KPPN Madiun
6. Predikat WTP kali kelima secara berturut
7. Juara 1 Lomba Kerapian dan Ktertiban Pasukan HUT 72 Satpol PP Tingkat Provinsi Jatim
8. Penyerahan LPPD Pertama kepada Kemendagri (secara sistem dan fisik)
9. Penghargaan Website Pemerintah Daerah Terbaik, Berita Jatim Award
10. Terbaik II kategori Kota dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022 tingkat Provinsi Jawa Timur



11. Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2021 dari 70,01 pada 2020 menjadi 70,97 pada 2021
12. Terbaik ke-3 Realisasi APBD Tertinggi 2021 Tingkat Nasional
13. Juara 1 PKK Sehat Lestari Berencana tingkat Provinsi
14. Juara 1 Kampung KB Kategori Pemerintah Kota
15. Juara 1 Lini Lapangan Kategori Petugas KB ASN Pusat
16. Juara 1 Lini Lapangan Keluarga Lestari 20 tahun
17. Penghargaan Anugerah Manggala Karya Kencana (MKK) Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun Yuni Setyawati Maidi
18. Rekor Muri Pemasangan Sambung Tuwuh Prosesi Pernikahan Adat Terbanyak
19. Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas keberhasilan Kota Madiun sebagai Pemda pertama di Jawa Timur yang menuntaskan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
20. Green Leadership Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup
21. Anugerah Kota Paling Berkelanjutan dalam bidang Tata Kelola Limbah sekaligus peringkat ke-4 Kota Paling Berkelanjutan dari total 34 peserta UI Green Metric
22. Penganugerahan Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya
23. Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kemenpan RB melalui Inovasi Profit M-Tech (Program Wifi Gratis untuk Madiun Genggam Teknologi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
24. Penganugerahan BKN Award 2022 kategori Special Mention – Pilot Project SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara)
25. Penghargaan Indonesia Visionary Leader Kategori Best Overall Kepada Walikota Madiun, Drs. H. Maidi, S.H.,M.M.,M.Pd., dari MNC Portal Indonesia
26. Pembina Program Kampung Iklim Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur kepada Walikota Madiun, Maidi



27. Penghargaan Proklamasi Utama Tingkat Nasional 2021 kepada Kelurahan Pandean
28. Penghargaan Proklamasi Utama Tingkat Nasional 2021 kepada RW 11 Kelurahan Taman
29. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 8,6 Miliar dari Kemenkeu atas Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
30. Penghargaan ASN Achievement Award 2022 kategori Kepala Daerah Peringkat Terbaik dengan predikat Pengembangan Kompetensi Berbasis SDG's Transformatif
31. Penghargaan Excellent Public Service Digitalization Initiatives Indonesia Awards 2022 oleh iNews
32. Piagam Apresiasi Pembinaan Proklamasi Tingkat Kota untuk Walikota Madiun, Maidi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
33. Penghargaan Kota Sehat tingkat Provinsi Jawa Timur
34. Penghargaan Indonesia Smart Nation Award 2022 sebagai Kota Inovasi Smart Branding Terbaik – Terbaik (Best of the Best) kategori Kota
35. Penghargaan STBM Award tingkat Nasional kategori Kota/Kabupaten STBM Award Berkelanjutan
36. Penghargaan STBM Award tingkat Nasional kategori Kota/Kabupaten Penerapan Lima Pilar STBM
37. Penghargaan STBM Award tingkat Nasional kategori Kota/Kabupaten terbaik STBM Berkelanjutan dimensi Peningkatan Kebutuhan Sanitasi (Demand Creation)
38. Juara Harapan 2 Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional II (Wilayah Jawa dan Bali) Tahun 2022
39. Juara 1 Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur
40. Juara 1 Pelaksana Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur



41. Penghargaan Lembaga Pemerintah Terbaik Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Surat Dinas dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
42. Penghargaan Badan Publik Layanan Permohonan Informasi Terbaik kategori Pemerintah Kota/Kabupaten dari Komisi Informasi Jawa Timur
43. Penghargaan Badan Publik Informatif kategori Pemerintah Kota/Kabupaten dengan nilai 99,25 (Tertinggi di Jawa Timur) dari Komisi Informasi Jawa Timur
44. Penghargaan Kota/Kabupaten Terbaik Gerakan Menuju Smart City 2022 Dimensi Smart Environment
45. Penghargaan Dwija Praja Nugraha (DPN) untuk Walikota Madiun dari Pengurus Besar PGRI atas komitmen, dedikasi, dan perhatian akan kemajuan pendidikan daerah
46. Penghargaan Anugerah Meritokrasi KASN 2022 terkait Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kategori Baik dengan nilai 266
47. Rekor MURI Program Pembangunan Jalan atau Pavingisasi Serentak di Lokasi Terbanyak (46 Ribu Meter)
48. Penghargaan Peduli HAM dari Kemenkumham dengan nilai 98,5
49. Penghargaan KPK RI terkait Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan Indeks Terbaik kategori Pemerintah Kota dengan nilai 83,00

Terdapat 176 penghargaan untuk yang diterima oleh Walikota Madiun di Tahun 2022 ini.

Pemerintah Kota telah melakukan perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan penetapan tema pembangunan terhadap pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun. Tema Pembangunan



Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 adalah "Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Sejahtera".

Gambar III.34. Tema Pembangunan Pemerintah Kota Madiun



Sumber Data : Bapelitbangda Kota Madiun

Berdasarkan capaian kinerja Pemerintah Kota Madiun sampai dengan tahun 2021, telah ditetapkan kebijakan pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2023. Hal ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan laporan kinerja Pemerintah Kota Madiun sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh pimpinan dalam rangka peningkatan kinerja dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.



Gambar III.35. Kebijakan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023

Tema
“Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Sejahtera”

KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
KOTA MADIUN
TAHUN 2023

PRIORITAS

- 1 Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital
- 2 Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia
- 3 Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi
- 4 Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan

Sumber Data : Bapelitbangda Kota Madiun

Penetapan kebijakan Pemerintah Kota Madiun juga dengan memperhatikan isu strategis, prioritas pembangunan baik nasional maupun provinsi dan pohon kinerja.

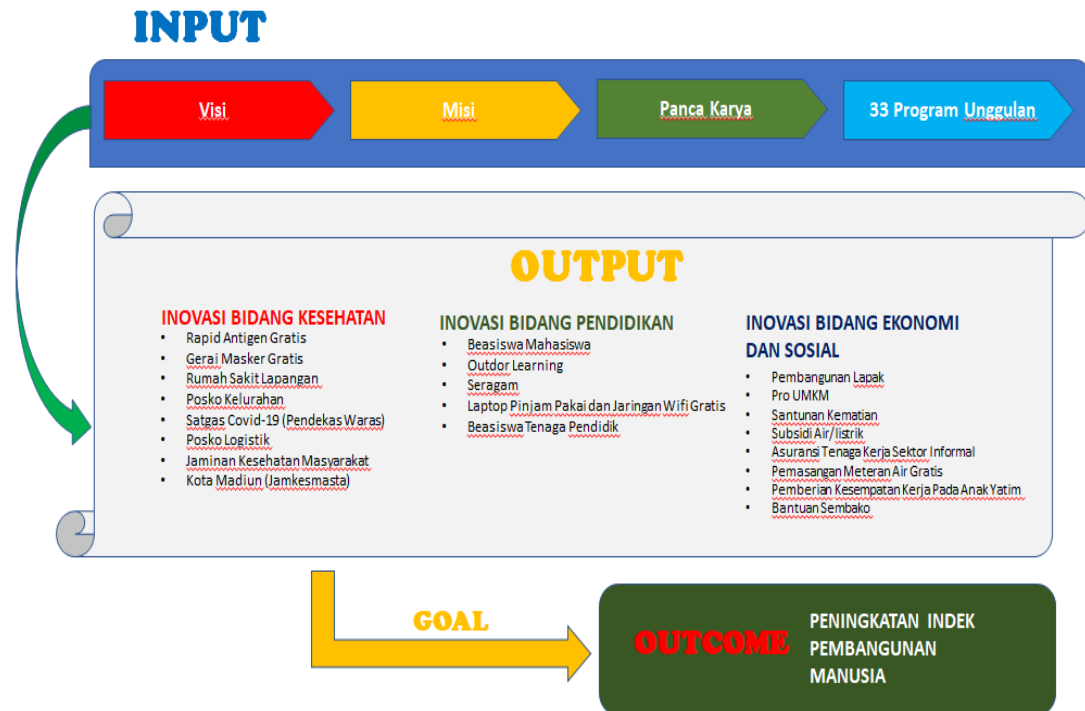
Gambar III.36. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Madiun Tahun 2023



Sumber Data : Bapelitbangda Kota Madiun



**Gambar III.37. Skema Pencapaian Outcome Pemerintah Kota Madiun
Tahun 2023**



Sumber Data : Bapelitbangda Kota Madiun



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Madiun berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Madiun dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dikategorikan memuaskan, karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan 7 (tujuh) indikator. Dari capaian 7 (tujuh) indikator terdapat 6 indikator yang telah melampaui target yang ditetapkan, 1 (satu) indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Indeks Gini.

Kelima indikator tersebut didukung oleh 11 (sebelas) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator. Dari 17 (tujuh belas) indikator tersebut 13 (tigas belas) indikator telah melebihi target dan 4 (empat) yang tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pemberdayaan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan



B. Permasalahan

Permasalahan pembangunan berdasarkan 5 (lima) prioritas pembangunan :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - a. Penanganan PMKS perlu dioptimalkan
 - b. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana sekolah sesuai SPM perlu ditingkatkan
 - c. Masih ada kematian ibu dan anak
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
 - e. Penanganan PMKS perlu dioptimalkan
 - f. Kualitas SDM tenaga kerja perlu ditingkatkan
 - g. Penyediaan lapangan pekerjaan perlu peningkatan jaringan ketenagakerjaan
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau
 - a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik perlu ditingkatkan dan dipelihara
 - b. Drainase perkotaan perlu ditingkatkan
 - c. Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat perlu pemeliharaan kualitas
 - d. Sarana sanitasi masyarakat perlu ditingkatkan
 - e. Sarana dan prasarana persampahan perlu di tingkatkan
 - f. Luasan RTH perlu ditingkatkan
 - g. Pemanfaatan pengelolaan air tanah perlu ditingkatkan
 - h. Mitigasi bencana perlu ditingkatkan
3. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
 - a. Iklim investasi / usaha perlu peningkatan daya saing
 - b. Belum optimalnya kinerja BUMD



- c. Belum optimalnya daya saing produk dan akses pasar bagi produk UMKM
- d. Masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana usaha untuk UMKM
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
 - a. Reformasi Birokrasi belum optimal sehingga kinerja pemerintah belum dapat terukur dengan jelas
 - b. Kualitas SDM Aparatur masih perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kinerja
 - c. Perlu peningkatan kualitas pelayanan publik
 - d. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - a. Masih perlu ditingkatkannya peran FKUB dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat
 - b. Peran tokoh masyarakat dan ulama masih perlu ditingkatkan
 - c. Masih terbatasnya keterlibatan dan pelestarian budaya adat masyarakat

C. Upaya Meningkatkan Kinerja

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan kinerjanya antara lain :

1. Melakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 - a. Penanganan PMKS perlu dioptimalkan
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelatihan profesi guru (PPG)
 - c. Akan dibentuk tim untuk pendataan untuk anak tidak sekolah



- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan gedung bangunan sekolah, pemberian bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP, laptop gratis siswa SD dan SMP serta sarana dan prasarana belajar mengajar
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan melalui penyediaan gedung sekolah yang representatif, bantuan laptop gratis, serta sarana dan prasarana belajar mengajar
- f. Meningkatkan kualitas pendidikan
- g. Meningkatkan Kualitas PAUD dan Pendidikan Dasar dengan pengembangan kurikulum dan melakukan pengelolaan pendidikan
- h. Meningkatkan pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan calon guru yang mengikuti seleksi Pendidikan Profesi guru
- i. Menurunkan Angka Kematian Ibu dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan ibu bersalin
- j. Menurunkan kematian bayi dan balita dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk bayi dan balita
- k. Menurunkan kematian karena penyakit menular dan tidak menular dengan meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular. Salah satunya dengan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PSN untuk mencegah penularan penyakit DBD dan meningkatkan skrining faktor risiko PTM pada usia produktif dan lansia.
- l. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat
- m. Penanganan PMKS perlu dioptimalkan
- n. Meningkatkan kualitas pencari kerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
- o. Menyelenggarakan kegiatan job fair/bursa kerja untuk



- mempermudah pemberi kerja mendapatkan calon tenaga kerja, dan pencari kerja bisa dipertemukan langsung dengan pemberi kerja.
- p. Melakukan pembinaan dan monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah, Lembaga Swasta dan atau Perguruan Tinggi guna terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik untuk dapat menempatkan alumni atau calon pencari kerja baru dengan pemberi kerja sesuai kompetensi masing-masing.
 - q. Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)
 - r. Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi TenagaKerja dan Masyarakat
 - s. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan
 - t. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
 - u. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
 - v. Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membuka peluang pekerjaan
 - w. Updating data pengangguran tenaga kerja sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah penganggutan di Kota Madiun
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau
- a. Melaksanakan seleksi terhadap mitra DPUPR/ stageholder pelaku jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia telah dipersyaratkan tenaga teknis yang memiliki kualifikasi tertentu, sehingga tenaga yang berada di lapangan harus sesuai dengan dokumen pemilihan dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan;



- b. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sarana dan prasarana yang akan dibangun dan yang telah terbangun untuk melakukan pemeliharaan secara berkala;
 - c. Merencanakan pembangunan dan mengalokasikan anggaran sesuai prioritas.
 - d. Perlu dilakukan peningkatan dari sisi kuantitas dan kualitas kapasitas lingkungan hidup diseluruh wilayah Kota Madiun. Sehingga dapat meminimalisir dampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup (perubahan iklim mikro, menyusutnya daerah serapan air, berkurangnya sumber mata air, menurunnya kualitas air sebagai akibat intensitas yang tinggi dalam peningkatan pembangunan infrastruktur. Terwujudnya infrastruktur kota juga harus memperhatikan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
3. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
- a. Lebih memanfaatkan sistem informasi manajemen dan teknologi dalam pengelolaan sistem perdagangan contoh: SIM Pasar, E-Retribusi, E- Bakul.
 - b. Pengendalian Harga dan Inflasi dengan Operasi Pasar dan kegiatan Tekan Inflasi melalui Subsidi Bahan Pokok Kepada masyarakat.
 - c. Menggalakkan Promosi Produk Perdagangan melalui Pameran produk dan Event-event perdagangan serta pelatihan-pelatihan pada pedagang.
 - d. Revitalisasi Pasar dan perbaikan sarana prasarana pasar rakyat



- e. Merintis jalur sistem distribusi perdagangan melalui kerjasama dengan Pasar Induk (Pasar Tanah Abang Jakarta) dan bantuan ongkos kirim pada pedagang pasar rakyat
 - f. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi daerah.
 - g. Mempromosikan produk perdagangan/produk unggulan daerah.
 - h. Revitalisasi Pasar Rakyat sebagai salah satu pusat perdagangan daerah.
 - i. Sosialisasi dan Pembinaan kepada pengusaha terkait kemudahan pengurusan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha sesuai peraturan yang berlaku.
 - j. Pemenuhan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat yang merupakan salah satu sumber PAD dan dapat menggerakkan Belanja Barang/Jasa Daerah yang dapat menunjang pertumbuhan PDRB perdagangan barang/jasa
 - k. Pembangunan Lapak UMKM di tiap Kelurahan (aplikasi pro UMPKM)
 - l. Pembagunan jalur sepeda wisata penghubung lapak
 - m. Pembangunan dan pengembangan Pahlawan Street Center (PSC) sebagai pusat wisata baru di Kota Madiun
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
- a. Melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas agen perubahan di tahun 2022
 - b. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi agen perubahan pada perangkat daerah
 - c. Melakukan identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang tumpang tindih, tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat dengan kebijakan lainnya dari tahun 2001 sampai dengan 2021



- d. Melaksanakan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan sistem merit diantaranya assessment pegawai, penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) dan pememtaan talenta pegawai
- e. Melakukan pembinaan dan pendampingan inovasi pelayanan publik dalam rangka menciptakan inovasi-inovasi yang bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat.
- f. Pemerintah Kota Madiun telah melakukan Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebanyak 166 Pejabat Struktural dan telah dilantik pada tanggal 31 Desember 2021 dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang langkah konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Adminisrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
- g. Pelaksnaan pembangunan zona integritas dengan mengusulkan unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Puskesmas Demangan dan Puskesmas Sukosari di tahun 2022
- h. Melaksanakan survey Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi secara Mandiri dalam rangka pembangunan zona integritas pada unit pelayanan publik.
- i. Melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tiap tahun sekali yang hasilnya digunakan sebagai perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- j. Menindaklanjuti Lapran Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021 sebagai bentuk penguatan manajemen kinerja sektor publik.



- k. Melakukan pengembangan aplikasi dengan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi. Untuk tahun 2022 ini telah direalisasikan ashboard Manekin yaitu dashboard yang berisikan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang terdiri dari aplikasi e-kak, sipd, mskp dan e-sakip. MSKP juga merupakan aplikasi pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
 - l. Melakukan Refreshment dan Pelatihan Awareness SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 kepada pegawai Sekretariat Daerah Kota Madiun. Dan diperolehnya Sertifikasi ISO yaitu SNI ISO 9001:2015 terkait management *Quality System-Requirement* dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Sekretariat Daerah Kota Madiun dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
 - m. Penguatan kebijakan pengawasan internal dengan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu dengan mengadakan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
 - n. Memberikan pembinaan dan panduan dalam rangka pengisian LHKASN pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 6. Memberikan pembinaan kegaitan patroli wilayah di Kota Madiun terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota (contoh: memberikan pembinaan ketika patroli kepada pedagang



- kaki lima dengan memberikan peringkatan/himbauan berupa stiker pelanggaran)
7. Memberikan sosialisasi Peraturan Daerah yang terkait dengan pelanggaran tantribum kepada masyarakat (Organisasi Dharma Wanita, PKK, masyarakat kelurahan, dan anak sekolah)
 8. Memberikan pembinaan kepada pelanggar Peraturan Daerah secara persuasif dan humanis (contoh: pemberian panggilan dan pembinaan kepada badan usaha yang tidak memiliki izin usaha)
 9. Melaksanakan Kegiatan Memukul Kentongan Serentak se-Kota Madiun di Pos Kamling oleh Linmas kelurahan sebagai upaya menghidupkan kembali Pos Kamling
 10. Mengadakan lomba Siskamling tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat Kota Madiun sebagai upaya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.